



KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD

NOVEMBER 2014 – NOVEMBER 2015

Membentuk **Insan** dan **Ekosistem**
Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter



KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD

NOVEMBER 2014 – NOVEMBER 2015

Membentuk **Insan** dan **Ekosistem**
Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter

KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD

NOVEMBER 2014 – NOVEMBER 2015

Pelindung

Didik Suhardi *didik.suhardi@kemdikbud.go.id*

Penanggung Jawab

Iza Mayuni *ilza.mayunii@kemdikbud.go.id*

Pengarah Materi

Kurniawan *kurniawan@kemdikbud.go.id*

Azis Purwanto *azis.purwanto@kemdikbud.go.id*

Mochammad Abduh *moch.abduh@kemdikbud.go.id*

Muhammad Husnil *muhammad.husnil@kemdikbud.go.id*

Penulis

Muhammad Husnil *muhammad.husnil@kemdikbud.go.id*

Yudi Anugrah *fx.maghribi@gmail.com*

Editor

Anton Kurnia *anton.kurnia@gmail.com*

Desain sampul dan tata letak

Robby *robby@eebor.com*

Rahmat Hidayat (Otheng) *othenggrafik@gmail.com*

Nur Aly *nur4aly@gmail.com*

Ilustrator

Rizal Zulfadli

Raharjo Tri Maryanto

Sekretariat

Senza Arsendy

M. Ihsan Nugraha

Sobar Rachmayana

Ade Tito

Muhammad Nana Suprihatna

Kuangan

Rusprita Putri Utami

Dedy Junaidy

Diterbitkan Oleh

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270

KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD

ISBN 978-602-73386-0-9

TAKRIF:

SILA HUBUNGI SURAT ELEKTRONIK DI ATAS

UNTUK MENDISKUSIKAN ISI BUKU INI LEBIH LANJUT.

KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD

NOVEMBER 2014 – NOVEMBER 2015

KILASAN SETAHUN KINERJA KEMENDIKBUD



DAFTAR ISI

1 STRATEGI 1 Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan



2 Kurikulum 2013 *Kurikulum 2013 tidak matang dipersiapkan. Pada Desember 2014, Kemendikbud menunda penerapannya secara nasional.*

8 Program Indonesia Pintar *Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.*



12 Ujian Nasional *UN tahun 2015 tak lagi digunakan dalam penentuan kelulusan siswa.*



21 Guru Garis Depan *Mengirim guru tetap ke ujung negeri, mencerahkan masa depan anak-anak wilayah terdepan.*



27 Uji Kompetensi Guru *Menakar elemen kompetensi guru, meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik.*

31 Data Pokok Pendidikan *Pada akhirnya Kemdikbud pada 2015 ini berhasil menyatukan semua data di lingkungan kementerian. Data pendidikan lebih cepat disusun, kebijakan lebih tajam dan efisiensi dapat ditingkatkan.*

33 Hari Pertama Sekolah

Pendidikan adalah kemitraan antara orang tua dan guru. Kini orang tua tak lagi menjadi penonton di luar pagar sekolah. Kemendikbud membuat tradisi baru agar sekolah bisa lebih aktif bermitra dengan orang tua dan orang tua lebih aktif dalam proses pendidikan anak.



39 Masa Orientasi Siswa

Hentikan perpeloncoan di sekolah. Siswa datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk dipermalukan dan disiksa.

43 Penumbuhan Budi Pekerti

Karakter positif siswa harus diajarkan, dibiasakan, dan dikonsistenkan hingga menjadi budaya.



48 Registrasi Cagar Budaya

Menangkal lenyapnya cagar budaya lewat pendaftaran objek cagar budaya.

53 Sekolah Aman Asap

Keselamatan dan kesehatan siswa lebih utama.

57 STRATEGI 2

Peningkatan Mutu dan Akses



58 Lintasan Berisiko Bagi Siswa

Kemendikbud menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas.

61 Belajar Bersama Maestro

Sengatan inspirasi maestro bakal menjadi bekal generasi muda sepanjang hidup.

65 Gerakan Terima Kasih Guru

Bisakah kita sampai pada posisi kita saat ini tanpa bantuan guru? Kemendikbud periode ini mengajak kita untuk menjalin lagi silaturahmi dengan guru-guru yang telah mengantarkan kita ke keadaan kita sekarang.



- 70 Gerakan Indonesia Membaca-Menulis**
Membaca dan menulis tak sekadar aktivitas kelas, tetapi penggerak roda peradaban.



- 76 Menuju Wajib Belajar 12 Tahun**
Program ini memberikan kesempatan luas kepada anak bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu dan difasilitasi pemerintah.

- 80 Afirmasi Pendidikan Menengah**
Merajut tenun kebangsaan melalui gerakan pendidikan.

- 82 Kawah Kepemimpinan Pelajar**
Mencetak para pemimpin muda penggerak perubahan yang berkarakter, berintegritas, dan anti korupsi.



- 85 Penghargaan Internasional untuk Siswa**
Siswa-siswi terbaik Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai ajang internasional.

- 89 Gerakan PAUD Berkualitas**
Hasil investasi pada pendidikan usia dini sangat besar jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain.



- 92 Penerbitan Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia**
Mengabadikan jejak kebudayaan Islam Nusantara.

- 95 Penominasian Warisan Budaya Dunia**
Menjaga warisan budaya menjadi tugas bersama.



101 STRATEGI 3

Pengembangan Efektivitas Birokrasi Melalui Perbaikan Tata Kelola dan Pelibatan Publik



103 Lokakarya: Membangun Visi Bersama

Menyatukan langkah untuk bergerak bersama melunasi salah satu janji kemerdekaan, mencerdaskan anak bangsa.

106 Simposium Pendidikan Nasional

Kemendikbud membuat sejarah baru, dengan meningkat-eratkan pelibatan publik dalam isu-isu pendidikan.

108 Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan

Ajang para guru bertukar ide gagasan, inovasi pembelajaran, dan terobosan melalui karya ilmiah. Guru mulia karena karya.



112 Pembentukan Struktur Baru dalam Kemendikbud

Dengan perombakan dan pembentukan struktur baru ini, Kemendikbud ingin bergerak optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

114 Seleksi Terbuka Pejabat di Lingkungan Kemendikbud

Meski seleksi dilakukan secara terbuka, pejabat yang terpilih memang benar-benar kompeten di bidangnya.

118 Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Menghentikan gratifikasi, memberantas korupsi sejak dari hulu.



122 Penyerapan Anggaran

Di tengah pergulatan restrukturisasi, kinerja dan penyerapan anggaran Kemendikbud tetap efektif.

124 Menjadi Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015

Mengenalkan kekayaan literasi Indonesia lewat pesta buku terbesar di dunia.

128 DARMASISWA

Menyebarkan duta-duta Indonesia ke dunia internasional.



TAHUN YANG BERBEDA

SESUNGGUHNYA pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan semesta sudah ada dalam darah daging sejarah Indonesia. Ia tak pernah berwujud sebagai program pemerintah semata. Dalam sebuah rapat pada 5 Februari 1945, Ki Hadjar Dewantara menggambarkan bahwa – salah satunya – pemberantasan buta huruf telah lama berkembang sebagai gerakan rakyat masa itu.

Menghidupkan kembali ruh itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan kembali visi tersebut. Dalam kerangka strategis 2014-2019, visi kita adalah membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter berlandaskan semangat gotong royong.

Ekosistem berlandaskan gotong royong pada dasarnya adalah gerakan semesta. Ekosistem mengharuskan adanya pelaku-pelaku yang berdaya serta interaksi yang positif di antara anggota ekosistem. Pemerintah merupakan salah satu anggota dalam ekosistem itu. Layaknya ekosistem yang sehat, hidup dan tumbuhnya semua anggota ditentukan bagaimana interaksi yang saling mendukung dan bergotong royong menggapai tujuan bersama.

Pendidikan dan kebudayaan, karena itu, tidaklah bergerak semata-mata karena kegiatan atau program pemerintah. Semua orang (atau pelaku) diandaikan berpartisipasi secara luas dalam segenap aspeknya. Dan, inilah titik terpenting kebaruan dalam strategi kementerian ini. Pendidikan dan kebudayaan tidaklah pernah hanya program pemerintah maka ia harus dikembalikan sebagai gerakan semesta.

Tentu saja pemerintah harus menjadi pelaku terpenting di dalamnya. Ia harus menjadi pendorong sekaligus fasilitator terkuat, seperti motto Tut Wuri Handayani. Karena itu dalam kerangka strategis dinyatakan secara jelas bahwa strategi ketiga Kemendikbud adalah mengembangkan efektivitas birokrasi melalui pelibatan publik, pelibatan masyarakat, dan perbaikan tata kelola.

Negara harus hadir, harus efektif. Dan birokrasi pendidikan dan kebudayaan adalah motor dalam gerakan semesta ini. Birokrasi di tingkat pusat harus menjadi contoh bagaimana mesin birokrasi bekerja secara efektif. Kemendikbud sadar, untuk itu perlu pelibatan publik serta perbaikan tata kelola. Reformasi birokrasi, khususnya perbaikan tata kelola, yang selama ini didengungkan memang penting. Tapi, untuk mendorong efektivitas birokrasi lebih jauh, cara terbaiknya adalah membuka luas pelibatan publik.

Ekosistem yang sehat membutuhkan pelaku yang berdaya. Ekosistem akan timpang bila sebagian pelakunya tidak berdaya, lemah dalam interaksi dengan pelaku lain. Karena itu strategi pertama Kemendikbud ini adalah melakukan penguatan atau pemberdayaan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbud sungguh percaya bahwa kita harus menggeser fokus pengelolaan kebijakan dari hanya sebagai pelaksanaan program (atau bahkan penyelenggaraan *event*) tetapi pada penguatan manusianya. Justru karena pendidikan dan kebudayaan hakikatnya penumbuhan manusia yang utuh maka pembangunannya juga berfokuskan pada



“

Saya punya keyakinan bahwa kita bersama bisa saling dukung untuk kemajuan republik ini.

seluruh manusia pendidikan dan kebudayaan di dalamnya, dari guru, siswa, kepala sekolah, seniman, pengawas, orang tua serta berbagai pelaku lainnya.

Tantangan lebih jauh adalah ekosistem kita bergerak tumbuh lebih besar. Jumlah penduduk tumbuh dan diperkirakan pada 2035 menjadi 305,7 juta dengan sebagian besar adalah usia produktif. Maka untuk mencerdaskan generasi bangsa sebesar itu dibutuhkan akselerasi peningkatan mutu dan akses. Kita perlu menyediakan layanan pendidikan dan kebudayaan secara lebih luas dan meningkat dengan akselerasi yang kuat, baik dari perspektif mutu maupun akses. Hanya dengan itu kita bisa memastikan bonus demografi kita di masa depan adalah generasi cerdas yang menjadi aset hakiki bangsa ini.

Dan dengan mengembalikan ruh gerakan semesta pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja keras sejak Oktober 2014 untuk menghadirkan kebaruan dalam semesta pendidikan dan kebudayaan kita. Dengan segala kerendahan hati serta permohonan maaf atas berbagai kekurangan di sana sini, izinkan saya menyampaikan kilasan satu tahun kerja kami dengan harapan semoga setahun terakhir ini sungguh menjadi pijakan awal menyongsong kebaruan dalam perjalanan bangsa ini.

Jakarta, November 2015

Anies Baswedan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



PENDAHULUAN

SEJAK dilantik secara formal pada 27 Oktober 2014, Kemendikbud periode 2014-2019 segera berpacu. Tak tunggu tempo. Pada minggu-minggu pertama, Kemendikbud periode ini belanja masalah-masalah di dunia pendidikan dan kebudayaan, sekaligus menyusun jalan keluarnya. Lalu, perlahan tapi pasti, kami mulai melangkah setapak demi setapak pada November 2014.

Kami sadar, masalah di dunia pendidikan dan kebudayaan ini bejibun. Seakan tiada habisnya. Namun, potensi anak bangsa Indonesia dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa membantu kami-lah yang membuat kami ringan melangkah. Memang, sudah menjadi akar bangsa kita bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah urusan kita bersama. Salah satu contoh konkretnya adalah Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya yang membuka kesempatan kepada semua anak bangsa untuk bersekolah tanpa memandang dari suku dan kelas ekonomi mana mereka berasal.

Karena itu, Kemendikbud memastikan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Demi memenuhi semangat tersebut kami mencetuskan visi “terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong.”

Visi itu, kemudian, kami terjemahkan ke dalam tiga strategi; ketiganya kami jadikan asas untuk membagi buku ini. Pertama, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Bagian ini berisi sejumlah program/gerakan yang sedang kami lakukan untuk lebih memperkuat peran para pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kami

memasukkan faktor orang tua di sini sebagai ikhtiar awal untuk mengajak orang tua bermitra lebih erat dalam pendidikan anak-anak.

Pendidikan dan kebudayaan senantiasa berkembang setiap saat. Kami menangkap ruh perkembangan itu dan menuturkannya dalam bagian kedua: percepatan dan peningkatan mutu dan akses. Dalam bidang kebudayaan, misalnya, Kemendikbud menerbitkan *Sejarah dan Kebudayaan Islam Indonesia (SKII)*. Penerbitan *SKII* ini sangat penting karena selama ini pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Islam Indonesia masih berupa mozaik, belum ada buku yang merangkum kesemuanya. Adanya satu buku yang menyatukan semua itu sangat bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam Indonesia.

Bagian ketiga adalah peningkatan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan publik. Sebagai tonggak penting kualitas manusia Indonesia, Kemendikbud bertekad menjadikan lembaga ini berintegritas. Caranya dengan terus melakukan perbaikan internal. Kemendikbud juga mengambil terobosan penting, di antaranya, dengan membentuk struktur baru, mengadakan seleksi terbuka bagi pejabat di lingkungan Kemendikbud, serta mengajak publik untuk lebih berperan aktif dalam isu-isu pendidikan dan kebudayaan.

Tentu saja, setiap program/gerakan yang ada di setiap bagian tak hanya memenuhi satu strategi. Bisa jadi satu program/gerakan itu saling beririsan antara strategi satu dan strategi dua, atau malah tiga strategi sekaligus. (Untuk lebih jelasnya, sila simak Tabel Program/Gerakan).

Tabel Program/Gerakan

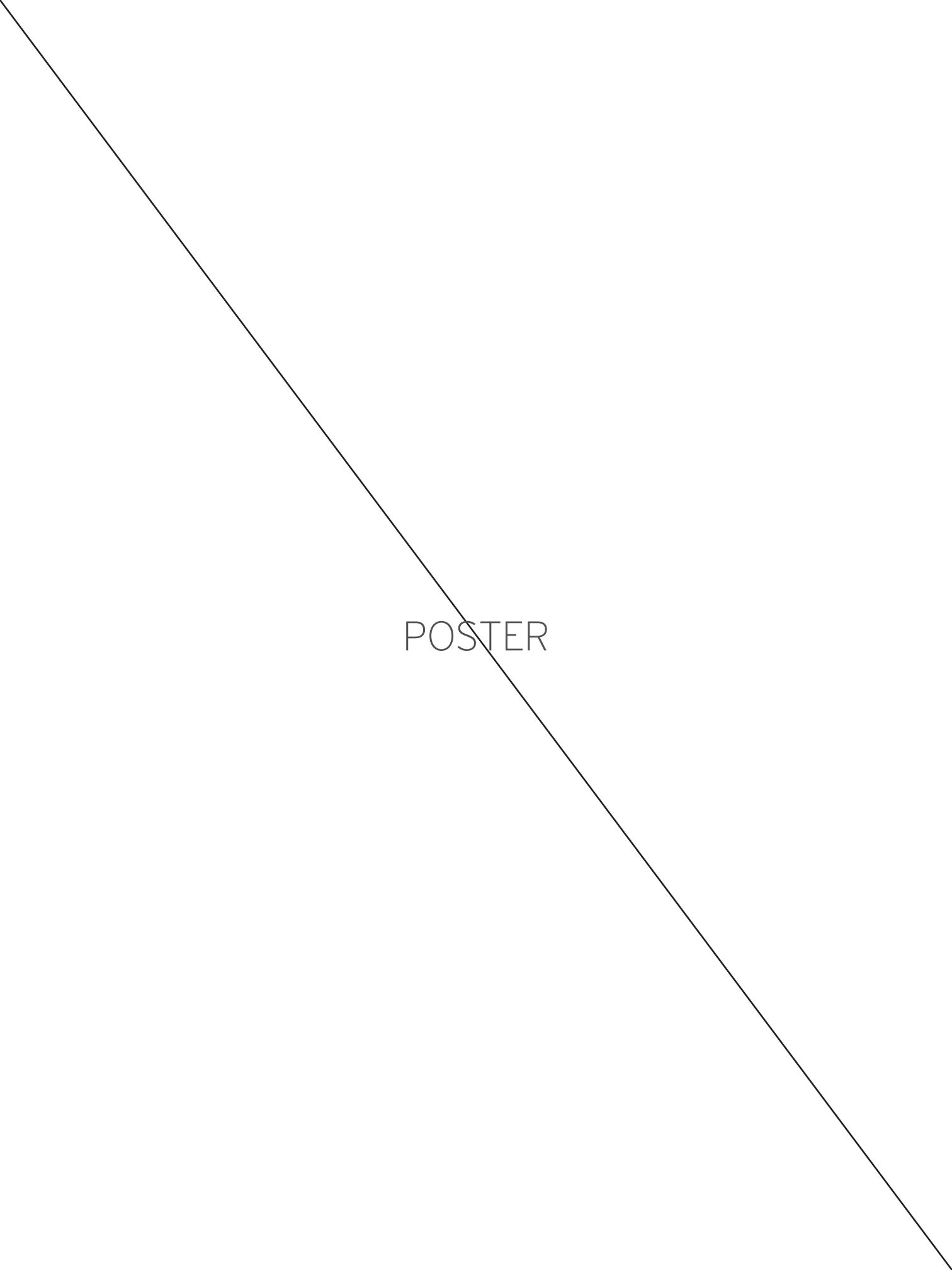
PROGRAM/GERAKAN	STRATEGI 1	STRATEGI 2	STRATEGI 3
Kurikulum 2013	√	√	
Guru Garis Depan	√	√	
Ujian Nasional	√	√	
Program Indonesia Pintar	√	√	
Data Pokok Pendidikan	√		√
Uji Kompetensi Guru	√	√	
Masa Orientasi Siswa	√	√	
Hari Pertama Sekolah	√	√	
Penumbuhan Budi Pekerti	√	√	
Registrasi Cagar Budaya	√	√	√
Lintasan Berbahaya		√	
BBM		√	√
Terima kasih Guru		√	√
ADEM	√	√	
Kawah Kepemimpinan Pelajar	√	√	
Penghargaan Internasional untuk Siswa	√	√	
Penerbitan Buku Sejarah	√	√	
Penominasian Warisan Dunia		√	√
Seleksi Terbuka		√	√
Simposium Pendidikan Nasional	√		√
Simposium Guru	√		√
Pembentukan Struktur Baru	√	√	√
Penyerapan Anggaran		√	√
Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi		√	√
Lokakarya: Membangun Visi Bersama			√
Darmasiswa		√	√
Tamu FBF		√	√



Sebagaimana sifatnya hidangan pembuka yang membangkitkan nafsu makan, semoga buku ini bisa membuat semua pihak untuk bersama-sama bergairah memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Sebelum berakhir, satu hal yang perlu kami tekankan: melalui buku ini kami tak hendak bicara capaian-capaian. Kami akan membicarakannya dalam tahun-tahun mendatang. Pula, buku ini bukan laporan tahunan. Jadi, kami hanya mengulas kilasan kinerja kami setahun ini. Ibarat makan, ini hidangan pembuka. Sebagaimana sifatnya hidangan pembuka yang membangkitkan nafsu makan, semoga buku ini bisa membuat semua pihak untuk bersama-sama bergairah memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. •





POSTER





1

PENGUATAN PELAKU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bangunan yang kokoh bertumpu pada dasar yang teguh.

MESKI kerap memperbaiki pendidikan dan kebudayaan, pemerintah selama ini belum menyentuh optimalisasi peran pelakunya. Karena itu, kini Kemendikbud fokus pada program-program penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan itu, di antaranya:

- 1) Kemendikbud menunda penerapan kurikulum 2013 yang kerap bermasalah.
- 2) Program Indonesia Pintar (PIP) membantu siswa miskin, rentan miskin, dan anak putus sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak.
- 3) Dalam soal Ujian Nasional (UN), kami membuat tiga terobosan: UN tak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan mengadakan indeks integritas.
- 4) Sebagai pengembangan dan penajaman Program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), Kemendikbud melahirkan Program Guru Garis Depan (GGD).
- 5) Kemendikbud menyatukan pendataan semua tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 6) Meningkatkan pelibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui Hari Pertama Sekolah (HPS);
- 7) Menghapus perpeloncoan dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), atau yang lebih dikenal dengan Masa Orientasi Siswa (MOS);
- 8) Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) lewat berbagai kegiatan yang diharapkan menumbuhkan karakter dan perilaku yang baik dalam diri tunas-tunas muda bangsa ini;
- 9) Registrasi Benda Cagar Budaya agar generasi mendatang tetap bisa membaca dan mengetahui betapa luhurnya kebudayaan nenek moyang mereka.
- 10) Kemendikbud mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa di daerah darurat asap dengan membuat Sekolah Aman Asap. •



Siswa sebuah sekolah menengah atas belajar membuat film dengan latar belakang mural berisi curahatan siswa tentang Kurikulum 2013. Karena diterapkan secara tergesa-gesa, Kurikulum 2013 akhirnya malah kerap mendatangkan masalah. Kemendikbud menunda penerapannya secara nasional dan mengevaluasinya secara menyeluruh.



KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 tidak matang dipersiapkan. Pada Desember 2014, Kemendikbud menunda penerapannya secara nasional.

KURIKULUM 2013 bagus secara ide. Namun, karena langsung diterapkan tanpa pernah diuji dan terburu-buru diterapkan secara nasional, maka ia mendatangkan banyak masalah. Saking bermasalahnya Kurikulum 2013, bahkan banyak sekolah yang menolak menjalankannya.



Buku adalah teman setia di mana pun. Kurikulum 2013 memang mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam belajar dan mandiri. Proses penerapan yang menyeluruh secara bertahap akan memastikan nilai-nilai positif seperti itu bisa merembes dengan baik kepada anak didik.

Mestinya, Kurikulum 2013 melalui empat tahap. Pertama, evaluasi atas kurikulum yang ada. Kedua, pendadaran ide kurikulum baru; dari situ lalu masuk ke penyusunan desain dan penulisan dokumen kurikulum. Tahap terakhir adalah penerapan kurikulum. Pada periode lalu, Kurikulum 2013 hanya berfokus pada dua tahap, yaitu tahap pendadaran ide lalu langsung tahap penerapan seluruh Indonesia. Aspek evaluasi kurikulum (sebelumnya) serta penyusunan desain dan penulisan dokumen kurikulum digarap secara terburu-buru dan sepintas. Bahkan Permendikbud Nomor 159 Tahun 2014 yang memerintahkan evaluasi atas konsistensi enam hal yaitu ide, desain, dokumen, implementasi, hasil, dampak; baru dikeluarkan Oktober 2014, tiga bulan sesudah seluruh sekolah diwajibkan melaksanakan kurikulum baru. Padahal, perubahan kurikulum itu menyangkut kematangan konsep karena akan digunakan sekitar 3 juta guru di 212 ribu sekolah dengan sekitar 57 juta siswa yang memiliki pemahaman, kesiapan dan ketersambungannya sangat bervariasi.

Setelah melaksanakan serangkaian evaluasi, rapat koordinasi dan diskusi dengan berbagai pihak, Kemendikbud periode ini memutuskan untuk menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 secara nasional. Kemendikbud ingin memastikan bahwa tahapan proses penerapan kurikulum nasional ini benar dengan kepastian akan tingginya standar kualitas di setiap proses tersebut. “Standar bekerja yang harus dimiliki adalah



Suasana perpustakaan sebuah sekolah

mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna. Kesalahan satu saja dapat mengganggu proses pendidikan Indonesia,” kata Mendikbud.

Agar konsisten dengan tahapan yang benar di atas maka Kemendikbud melakukan evaluasi menyeluruh atas kurikulum sebelumnya; dan kemudian memperbaiki penyusunan desain serta penulisan dokumen kurikulum ini. Kemudian selain menunda penerapan secara nasional, Kemendikbud menetapkan sekitar 6.000 sekolah yang telah menjalankan kurikulum nasional ini selama tiga semester untuk tetap menggunakannya. Sekolah-sekolah ini akan menjadi perintis dan model dalam penerapan kurikulum baru

ini dan kemudian dari sana mengembangkannya ke berbagai sekolah secara nasional yang direncanakan bertahap sampai Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kemendikbud juga tetap membuka kemungkinan bagi sekolah lain yang hendak menerapkannya. Namun, sekolah itu harus mengajukan diri untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Sekolah yang lolos verifikasi baru akan ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013.

Kemendikbud konsisten menerapkan pelaksanaan kurikulum nasional ini secara bertahap dengan skenario pada 2016/2017 diproyeksikan

ada 25% sekolah yang menerapkan kurikulum baru ini, tahun 2017/2018 ada 60% sekolah dan diharapkan pada tahun 2019/2020 tercapai 100%. (Grafik Tahapan Penerapan Kurikulum 2013)

Menuju arah itu, hingga saat ini Kemendikbud telah melakukan berbagai upaya untuk penyempurnaan. Beberapa perubahan fundamental itu adalah:

1. Menjalankan proses pengembangan guru sebagai pilar terpenting dalam proses belajar secara berlanjut. Pelatihan guru seharusnya tidak hanya terkait dengan penerapan kurikulum tetapi juga terkait



- pengembangan kompetensi dan kinerja guru.
2. Membuka ruang-ruang partisipasi publik seluas mungkin. Karena kerumitan dan kompleksitas penyusunan kurikulum maka Kemendikbud mendesain berbagai model pelibatan publik, baik yang luas dan terbuka maupun yang spesifik dan mendalam. Intinya Kemendikbud membuka diri seluas mungkin dalam berbagai tipe pelibatan yang konstruktif dalam penyusunan dokumen ini.
 3. Pemerintah menyiapkan kerangka regulasi untuk mengembalikan sistem penyediaan buku pelajaran kepada ekosistem

perbukuan. Pemerintah tidak lagi menjadi penulis sekaligus pencetak buku. Pemerintah mengundang para guru, akademisi dan penulis buku pelajaran pada umumnya serta pelaku lainnya untuk ikut serta menyediakan buku pelajaran. Syaratnya adalah semua buku yang diusulkan akan dinilai oleh Kemendikbud dan yang layak akan diizinkan untuk digunakan oleh sekolah. Diharapkan dengan demikian penyediaan buku lebih beragam dan secara logistik dapat disediakan tepat waktu; dan di sisi lain kita bisa mendapatkan buku-buku yang lebih berkualitas dengan

memanfaatkan semangat penerbitan yang kuat dari para guru dan penulis lainnya.

Khusus mengenai pelibatan publik, Kemendikbud percaya bahwa perbaikan akan lebih cepat terjadi dengan mendengarkan saran dan kritik dari para praktisi pendidikan. Kemendikbud telah beberapa kali menggelar pertemuan terbuka dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pendidikan tentang kurikulum kita ini. Masyarakat banyak menyampaikan saran dan kritik, baik secara langsung maupun tertulis.

Kemendikbud mengadakan tatap muka publik bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kami terbuka

PENERAPAN KURIKULUM 2013 DI SEMUA SEKOLAH DAN SEMUA KELAS

No	Tahun/Bulan	Persentase Penerapan Kurikulum 2013	Keterangan
1	Januari - Desember 2015	6	Tahap Perbaikan Dokumen
2	Juli 2016 - Juli 2017	19	Kelas 1,4,7, Dan 10
		6	Semua Kelas
3	Juli 2017 - Juli 2018	35	Kelas 1,4,7, Dan 10
		19	Kelas 1,2,4,5,7,8,10, Dan 11
		6	Semua Kelas
4	Juli 2018 - Juli 2019	40	Kelas 1,4,7, Dan 10
		35	Kelas 1,2,4,5,7,8,10, Dan 11
		25	Semua Kelas
5	Juli 2019 - Juli 2020	40	Kelas 1,2,4,5,7,8,10, Dan 11
		60	Semua Kelas



Standar bekerja yang harus dimiliki adalah mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna. Kesalahan satu saja dapat mengganggu proses pendidikan Indonesia.

—MENDIKBUD ANIES BASWEDAN

terhadap masukan dari seluruh pelaku pada ekosistem pendidikan mulai siswa, sekolah, guru, ahli, orangtua serta dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga-lembaga lintas sektor. Dengan proses ini, diharapkan lahir kurikulum nasional yang menimbulkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menantang bagi

siswa, yang mendorong percepatan mutu sekolah, serta memberikan keleluasaan pada guru untuk mengembangkan proses dan alat belajar yang bermutu dan beragam sesuai potensi lokal,” kata Mendikbud.

Bentuk lain partisipasi publik adalah tersedianya media daring bagi para pelaku pendidikan untuk

menyampaikan langsung aspirasi, kritik, dan bahkan undangan untuk diskusi tatap muka. Media daring ini dapat diakses di situs <http://kurikulum.kemdikbud.go.id>.

Hasil dari semua tahapan ini adalah kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. •

“

Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tak akan berhasil, kalau tidak dimulai dari bawah.

— KI HADJAR DEWANTARA





Seorang siswa sekolah dasar memperlihatkan Kartu Indonesia Pintar.



PROGRAM INDONESIA PINTAR

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.

ASET terbesar Indonesia bukanlah sumber daya alam, melainkan manusianya. Karena itu, pembangunan manusia Indonesia menjadi prioritas utama. Hal ini bahkan tercantum dalam konstitusi kita, yakni bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak anak bangsa yang belum bisa bersekolah. Inilah tantangan

terbesar dalam pembangunan pendidikan kita. Yakni, mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas. Juga meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko

Widodo bertekad mengatasi masalah ini dengan mencantumkannya ke dalam Nawa Cita butir kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Secara konkret, Kemendikbud mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP).

PIP melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di samping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan

“

PIP ini bisa membantu saudara sebangsa kita untuk bisa bersekolah sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Program ini ditujukan bagi anak sekolah dan remaja berumur 6-21 tahun yang tak bersekolah. Selain pendidikan formal, mereka juga dapat menikmati program pendidikan kesetaraan.



Tampak dua siswa menuju ke sekolah mereka di SDN Songgela, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NTB. Program Indonesia Pintar menjamin semua anak bangsa mendapatkan pendidikan.

pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.

PIP ini bisa membantu saudara sebangsa kita untuk bisa bersekolah sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Program ini ditujukan bagi anak sekolah dan remaja berumur 6-21 tahun yang tak bersekolah. Selain pendidikan formal, mereka juga dapat menikmati program pendidikan kesetaraan. Anak-anak putus sekolah itu dapat mengikuti program seperti Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP dan Paket C untuk setara SMA. Selain itu, mereka yang ikut paket kesetaraan lainnya dari lembaga nonformal, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lainnya juga bisa diusulkan ikut PIP.

Kemendikbud menetapkan delapan kriteria yang menjadi sasaran PIP, yakni:

1. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/ KKS).
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/ KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan siswa miskin (BSM).
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di panti sosial/panti asuhan.
5. Siswa (6-21 tahun) dari pondok pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM



- madrrasah) melalui jalur Form Usulan Madrasah (FUM).
6. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam melalui jalur Form Usulan Sekolah (FUS)/FUM .
 7. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada semester dua tahun pelajaran 2014/2015.

8. Penerima BSM dari mekanisme usulan sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014.

Dalam penyaluran PIP, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Tiap-tiap siswa yang menerima bantuan harus sudah terverifikasi oleh Kemendikbud, Kemensos, dan TNP2K,” kata Mendikbud.

Kemendikbud menargetkan penyaluran PIP tahun 2015 adalah 17,9 juta siswa. Melihat pencapaian yang ada, Kemendikbud optimis bisa memenuhi target itu. Untuk itu, Kemendikbud mengajak setidaknya 107 bupati untuk memperbaiki pendidikan di wilayah masing-masing. Seiring waktu, jumlah ini akan bertambah.

“Ini penting karena semua elemen, mulai pendidikan usia dini, kuncinya pada pemimpin daerah. Maka komitmen daerah harus kita perkuat,” kata Mendikbud. •

PROGRAM INDONESIA PINTAR

DALAM NAWA CITA Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla butir kelima disebutkan bahwa pemerintah bertekad untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini memungkinkan semua anak bangsa bersekolah dan mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.

TUJUAN PIP:

3

Mengurangi kesenjangan dalam memperoleh layanan pendidikan antara anak dari keluarga kaya dan miskin/kurang mampu

2

Membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

1

Mengurangi jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah

4

Meringankan beban orangtua yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anaknya.

5

Membantu anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah



8 KRITERIA PENERIMA PIP:

- Anak usia sekolah (6–21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS).
- Anak usia sekolah (6–21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan siswa miskin (BSM).
- Anak usia sekolah (6–21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Anak usia sekolah (6–21 tahun) yang tinggal di panti sosial/panti asuhan.
- Siswa (6–21 tahun) dari pondok pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM madrasah) melalui jalur Form Usulan Madrasah (FUM).
- Anak usia sekolah (6–21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam melalui jalur Form Usulan Sekolah (FUS)/FUM.
- Anak usia sekolah (6–21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada semester dua tahun pelajaran 2014/2015.
- Penerima BSM dari mekanisme usulan sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014.

REALISASI PENYALURAN MANFAAT KIP TAHUN 2015

Tahap (2015)	Realisasi Sasaran	Siswa Mencairkan
Tahap I-II (Juni)	34,5 %	-
Tahap III (Juli)	40,0%	-
Tahap IV (Agustus)	56,9%	8,8%
Tahap V (September)	61,5%	20,5%
Tahap V (Oktober)	62,3%	20,5%
Tahap VI (November)	100%	33,7%

PERKEMBANGAN REALISASI SASARAN

Sekolah	Total Sasaran (Siswa)
SD	10.754.805
SMP	4.399.430
SMA	1.306.644
SMK	1.809.526
JUMLAH	18.270.405

PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN (Triliun Rupiah)

Alokasi 2015	Siswa Penerima (per November)
RP 9,77 Triliun	18.270.405



UJIAN NASIONAL

UN tahun 2015 tak lagi digunakan dalam penentuan kelulusan siswa.

MENGAJI ulang Ujian Nasional (UN) menjadi agenda penting Kemendikbud periode 2014-2019. UN terbukti tak efektif menjadi alat penentu kelulusan. Alih-alih menikmati masa belajar di sekolah, siswa malah terbebani dengan adanya UN. Proses belajar mengajar di kelas menjadi terlalu berfokus pada persiapan lulus UN. Guru pun memusatkan perhatiannya dengan hanya mengajarkan materi-materi yang akan diujikan.

Sebenarnya, 11 tahun sudah masyarakat sipil berupaya mengubah UN, bahkan sampai ke tangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ikhtiar mereka tetap mentok.

Menyadari keinginan khalayak dan tak hendak membebani guru dan anak-anak Indonesia lebih jauh, Kemendikbud kini memutuskan untuk mereformasi UN. Reformasi yang paling mendasar adalah kelulusan diserahkan sepenuhnya pada sekolah dan guru dalam rapat dewan guru. UN tak lagi dipakai sebagai penentu kelulusan seorang siswa. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah No 13/2015 yang mengatur bahwa UN bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu dan hasilnya digunakan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
- c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Keputusan tersebut disambut dengan sangat positif oleh siswa, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Melalui reformasi tersebut, tidak saja negara menghargai keragaman yang ada di sekolah, tapi juga memberi kepercayaan dan tanggung jawab yang luas kepada guru dan sekolah dalam meluluskan siswa, dalam menentukan dan memastikan ketercapaian SKL siswa. Hasil UN menjadi bagian dari berbagai penilaian lainnya untuk mengukur dan memantau ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). •





Search jarum jam: 1) Mulai tahun 2015 Kemendikbud membuat sistem untuk menumbuhkan kejujuran dan integritas siswa dalam UN (hal. 17–20); 2) Demi meningkatkan kualitas dan efektivitas UN, Kemendikbud meluncurkan UNBK (hal.14–16); 3) Siswa sebuah SMA di Bandung melakukan sujud syukur di Alun-alun Bandung atas perubahan UN yang tak lagi menjadi penentu kelulusan; 4) Suasana UN di sebuah sekolah.



Siswa di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta mengerjakan ujian berbasis komputer. Kemendikbud membuat terobosan dalam pelaksanaan UN dengan mengenalkan ujian nasional berbasis komputer. Selain menjadi lebih efektif, UNBK juga dinilai lebih efisien.

MENUJU UN BERBASIS KOMPUTER

*Langkah awal pemerintah
melakukan efisiensi UN*

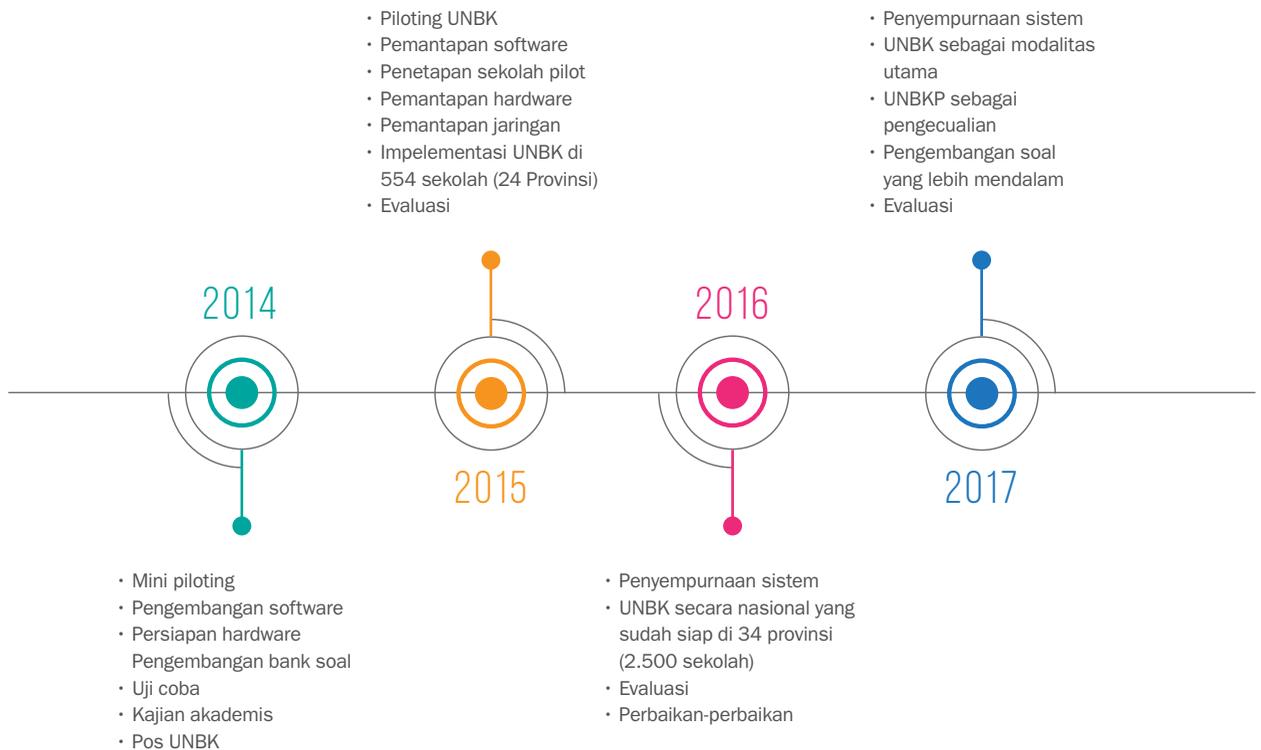
SELAIN mereformasi UN, terobosan penting Kemendikbud pada periode 2014-2019 lainnya adalah mengubah

sistem penilaian nasional dari ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNBKP) menuju ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Perubahan UN dari UNBKP menjadi UNBK dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi ujian nasional, serta penilaian pendidikan lainnya.

Dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa dan diselenggarakan di lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, serta Kelompok Belajar Paket B dan C),

UN merupakan pekerjaan besar dan massif. Logistik yang dikelola sangat besar, 35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 kontainer paket soal) harus dikirimkan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu.

PETA JALAN PENGEMBANGAN UNBK KE DEPAN



Pencetakan bahan UN juga merupakan pekerjaan besar yang pengadaannya dilakukan melalui proses pelelangan umum sesuai Perpres 70 Tahun 2012 dengan pengawasan selama pencetakan yang harus dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM luar biasa besar karena melibatkan lebih dari 700.000 panitia dan pengawas dari berbagai kalangan, pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan ujian berbasis

kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk soal selain pilihan ganda (*multiple choices*). Sementara, kebutuhan penilaian pendidikan mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran kompetensi kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda.

Perubahan dari UNBKP menuju UNBK akan memberi banyak perubahan penting untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas

penilaian pendidikan secara nasional. Manfaat reformasi ini dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dan pemerintah pusat. Reformasi ini berdampak jangka panjang karena menyentuh aspek mendasar pengembangan kompetensi lulusan. Literasi lulusan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan kompetensi dasar pada abad ke-21.

Pelaksanaan perintisan UNBK pada 2015 berjalan sangat baik.

MANFAAT UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER

SEBELUM	ASPEK	SESUDAH
Sekali pakai	Soal ujian	Tetap tersimpan
Terbatas	Jenis paket tes	Generate jumlah yg banyak
Hanya <i>check point</i>	Ragam soal	Beragam bentuk
Tidak fleksibel jadwal	Administrasi ujian	Fleksibel dilakukan berulang
Lama (2 bulan) mahal	Pelelangan bahan	Tidak ada, murah
Lama (2 bulan) mahal	Pencetakan soal	Cepat (1 bulan), murah
Fisik, sulit, mahal	Pengamanan	Soft copy, lebih mudah, murah
Sulit, berjenjang	Pengawasan	Lebih mudah, langsung
Sulit, mahal	Mengatasi kecurangan	Lebih kredibel
Lama (1 bulan), mahal	Pengolahan hasil	Lebih cepat (2 minggu), murah
Rumit, berjenjang	Akuntabilitas	Lebih transparan

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan UNBK diapresiasi tidak saja di dalam negeri, tapi juga oleh negara-negara lain dan lembaga-lembaga dunia (ACER, Australian Center for Education Research, Pearson, Google, dan sebagainya). Selain Indonesia, belum satu pun negara ASEAN yang menerapkan UNBK dalam ujian nasionalnya. Dari hasil angket siswa, 99% siswa setuju dan merekomendasikan UNBK digunakan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan temuan ini, pemerintah merencanakan perluasan layanan UNBK pada tahun-tahun mendatang. (Peta Jalan Perkembangan UNBK Ke depan). Selain itu,

UNBK ini mengurangi kebocoran soal UN.

Meski diawasi secara ketat, UNBK tahun ini masih saja bocor. Pada 13 April 2015 tersebar tautan menuju Google Drive yang berisi soal-soal UNBK. Begitu mengetahui hal ini, Kemendikbud segera mengirim surat kepada kantor pusat Google di California, Amerika Serikat, untuk menutup akses. Dua jam kemudian tautan tersebut sudah ditutup tak bisa diakses siapa pun. Hari itu juga tim Kemendikbu melakukan penyelidikan dan melaporkan tindakan pengunggahan dokumen rahasia negara tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Setiap tahun, kebocoran soal UN selalu menjadi masalah. Namun, menurut catatan Kemendikbud, dari total 11.730 paket soal, yang bocor hanya 30 paket. Dalam soal ini Kemendikbud takkan tinggal diam. “Gangguan terhadap UN mencederai jutaan anak Indonesia yang belajar dengan keras, serta guru yang bekerja dengan keras, yang ingin jalankan UN dengan jujur. Kami tidak tinggal diam, meski skalanya kecil,” kata Mendikbud. Hingga laporan ini ditulis, kasus ini masih ditangani Bareskrim RI.

Untuk mengurangi kebocoran UN pada tingkat sistem, Kemendikbud mendorong penggunaan UNBK secara luas. •



Dua Siswa SMPN 10 Kota Bima sedang menyampaikan pesan kepada lingkungan sekolah bahwa mereka sedang ujian. Ujian mestinya menjadi wahana untuk mengasah kemampuan dan kejujuran siswa. Mulai tahun ini masyarakat tak bisa lagi melaporkan kecurangan yang terjadi dalam ujian. Negara sendiri yang melaporkan kecurangan yang terjadi dalam UN dan mengukurnya, melalui IIUN.



INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL

Menumbuhkan sikap integritas dari kelas

UN selama ini sangat rentan terhadap kecurangan. Dan, kecurangan itu berdampak sangat buruk bagi siswa dan masa depannya. Siswa yang curang diuntungkan sementara, tetapi dirugikan dalam jangka panjang; dia, sebenarnya, belum kompeten

tetapi dianggap kompeten, sehingga dia sendiri yang akan merugi. Dengan kecurangan itu pula nilai sekolah yang tak bagus menjadi lebih tinggi daripada sekolah yang bagus. Nilai daerah yang sebetulnya masih sangat membutuhkan pembinaan

dan peningkatan mutu justru terlihat lebih tinggi dibanding daerah yang telah baik mutunya.

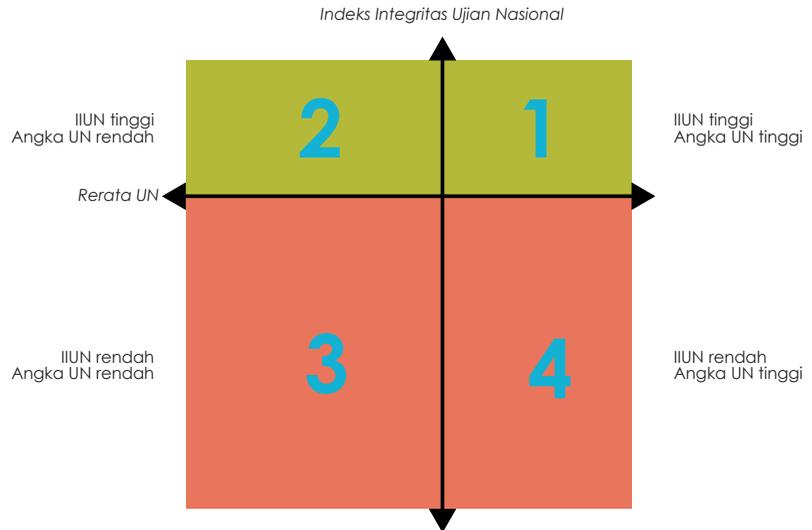
Kondisi ini tak bisa dibiarkan, harus dihentikan. Karena itulah Kemendikbud melahirkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Ini terobosan terpenting Kemendikbud 2014-2019. Juga, sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Untuk pertama kalinya negara mengakui kecurangan yang terjadi dalam UN, hal yang selama ini ditutup-tutupi. Dengan adanya IIUN, masyarakat tak usah lagi mengadu soal kecurangan

dalam UN; negara sendiri yang mengakui dan melaporkannya melalui IIUN. Kemendikbud bertekad untuk membuka setiap kecurangan yang terjadi dalam UN. Tak sekadar mengakuinya, negara juga mengukurnya.

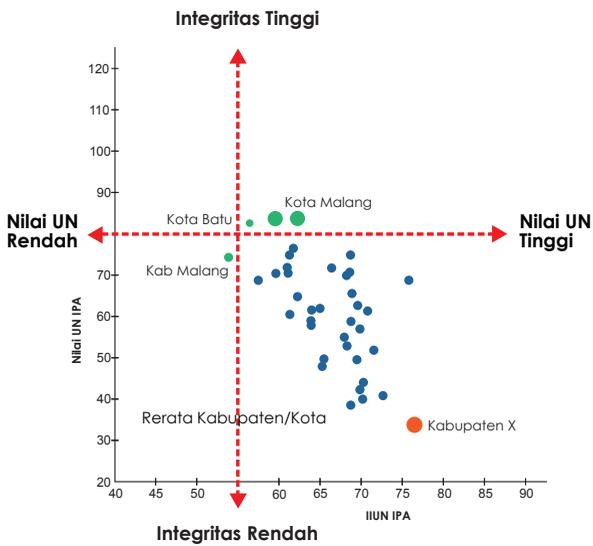
Karena itu mulai tahun ini laporan UN selain berisi angka juga memuat laporan kualitatif tambahan berupa deskripsi atas angka yang diperoleh siswa dan dekomposisi atas skor yang diperoleh siswa tersebut.

Selain mengukur siswa, IIUN juga berfungsi untuk mengukur integritas sekolah. “Jika, misalnya, suatu sekolah mendapat indeks integritas 85 maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15% telah terjadi kecurangan,” kata Mendikbud. Jadi, semakin besar nilai indeksnya, tingkat kejujuran di

Matrix IIUN & Capaian UN

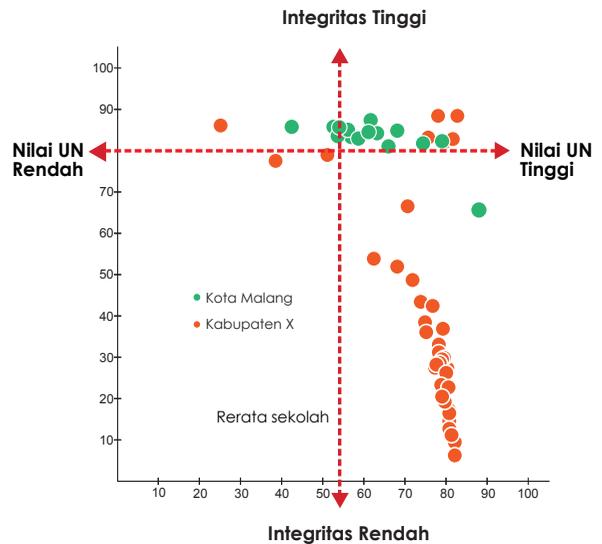


Ilustrasi Perbandingan IIUN Provinsi Jawa Timur



Rata-rata indeks integritas kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

Ilustrasi Perbandingan IIUN SMA & Sederajat di Kota Malang & Kabupaten X



Meskipun indeks integritas di kabupaten X rata-rata rendah, ada juga sekolah yang memiliki indeks integritas UN tinggi (kuadran 1)



Suasana Ujian Nasional.

sekolah tersebut makin tinggi (lihat Matrix IIUN & Capaian UN).

Kemendikbud telah mengumumkan hasil IIUN 2015. Toh, Mendikbud mengakui secara nasional unsur integritas dalam pelaksanaan UN masih rendah. Baru ada tujuh provinsi yang berhasil meraih indeks integritas tertinggi untuk SMA atau sederajat. Peringkat pertama diperoleh DI Yogyakarta, selanjutnya berturut-turut Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemendikbud lebih mudah melaksanakan program intervensi bagi daerah yang memiliki nilai UN rendah dengan modal integritas tinggi.

Intervensi yang dilakukan dapat berupa pembinaan prestasi

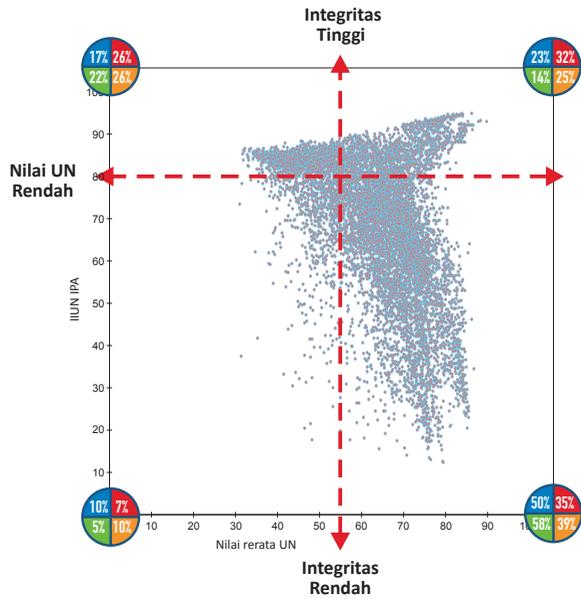
akademik. Untuk tingkat SMP dan sederajat, data hasil UN dan IIUN 2015 menunjukkan memang masih banyak yang harus dibenahi. Dari total total 52.163 SMP/Sederajat yang melaksanakan UN, hanya 12% yang memiliki nilai UN dan IIUN tinggi. Sebanyak 50% dari total tersebut meraih nilai UN tinggi, tetapi IIUN rendah. Sebanyak 17% meraih nilai UN rendah tetapi IIUN tinggi. Sementara, 22% sisanya meraih nilai UN rendah dan IIUN rendah.

“Bagaimanapun yang namanya ujian, kalau integritasnya itu tidak terjaga, makna ujinya itu lalu hilang karena ujian itu harus mencerminkan adanya integritas,” kata Mendikbud. Ke depan, baik nilai UN maupun IIUN akan menjadi penentu

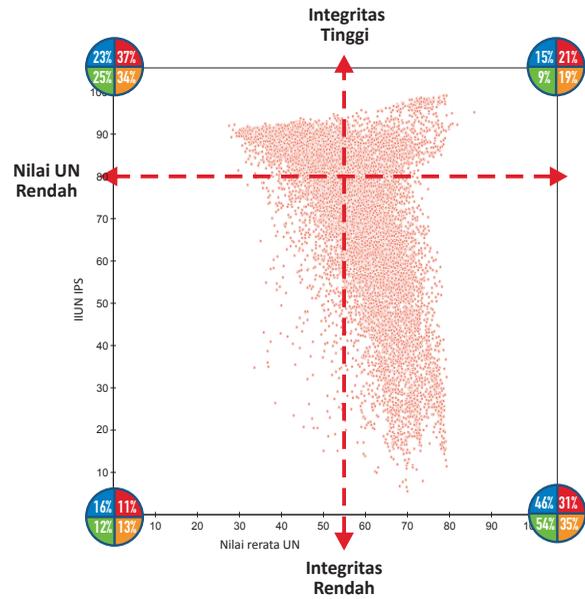
kualitas pendidikan selanjutnya. IIUN ini dapat diketahui siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Maka, masyarakat dapat memilih kualitas sekolah yang lebih baik bagi anaknya. Angka UN tidak semata-mata menjadi patokan dalam memilih sekolah, tetapi juga indeks integritasnya. Soalnya, “Otomatis nilai UN yang tinggi menjadi tidak bermakna jika sekolah tersebut memiliki nilai integritas yang rendah,” kata Mendikbud. Sebaliknya, indeks integritas tinggi justru akan menaikkan nilai atau bobot angka UN yang diraih. “Kita ingin agar perilaku jujur dan integritas menjadi norma baru,” katanya. •

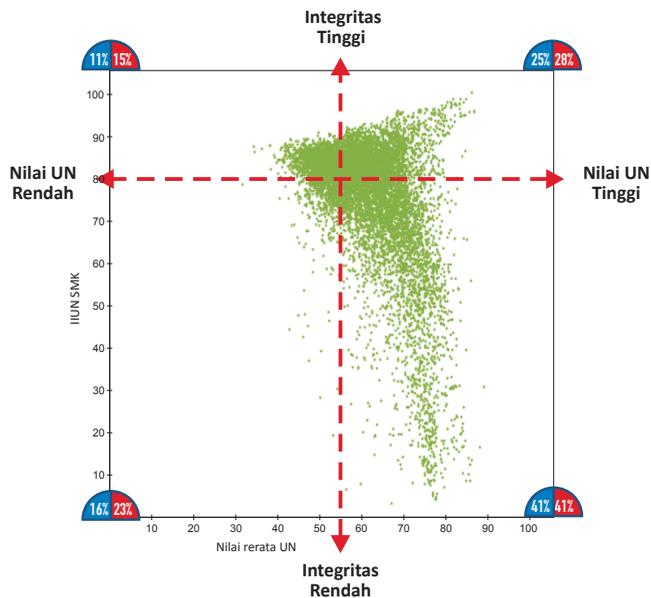
Hasil SMA/MA-IPA



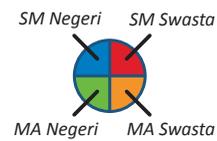
Hasil SMA/MA-IPS



Hasil SMK



Legenda:





Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Anies Baswedan melepas para pejuang Guru Garis Depan.



GURU GARIS DEPAN

Mengirim guru tetap ke ujung negeri, mencerahkan masa depan anak-anak wilayah terdepan.

PEMERATAAN pendidikan di Indonesia masih menjadi tugas besar yang harus segera dikerjakan. Wilayah perbatasan dan daerah terpencil teridentifikasi sebagai lokasi yang tingkat pelayanan pendidikannya rendah. Dalam menyelesaikan masalah ini negara harus hadir secara permanen, bukan temporer seperti yang dijanjikan pemerintah selama ini lewat program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal



Negara harus hadir secara permanen, bukan temporer seperti selama ini yang negara lakukan lewat program SM3T. Karena itu Kemendikbud membuat program terobosan: Guru Garis Depan.

(SM-3T). Untuk lembaga masyarakat sipil, seperti Indonesia Mengajar atau Dompot Dhuafa, mengirimkan guru yang bertugas hanya setahun memang lumrah karena mereka bukan “negara”. Pemerintah, dalam hal ini, harus bisa menghadirkan guru terbaik secara terus-menerus.

Karena itu Kemendikbud kini menaikan semangat menghadirkan negara itu dengan membuat program baru: Guru Garis Depan. Mereka adalah guru yang berkomitmen jangka panjang di daerah-daerah terdepan. Perbedaan penting GGD dan SM3T adalah masa kerja dan status. Jika SM-3T hanya ditempatkan setahun dan tak diangkat menjadi PNS, GGD memang ditugaskan untuk menjadi guru permanen dan berstatus PNS di wilayah penempatan.

Rumusan GGD ini sesuai dengan butir ketiga dan kelima Nawacita yang menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran” dan “meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak”.

Karena itu Presiden Jokowi sengaja meluangkan waktu menerima 798 guru dari pelbagai penjur

Nusantara yang lolos seleksi akhir menjadi pionir GGD di Istana Negara. Kepada mereka, Presiden Jokowi, menaruh harapan besar agar pelayanan pendidikan menyebar ke wilayah 3T. “Saudara-saudara semuanya adalah pejuang karena yang akan dituju adalah tempat-tempat yang sulit, terpencil, dan lokasi-lokasi perbatasan,” kata Jokowi di hadapan para guru, 25 Mei 2015.

Predikat pejuang Presiden Jokowi sematkan kepada para guru yang berbaris mengenakan kemeja putih berompi coklat itu bukannya tanpa alasan. Mereka adalah angkatan pertama GGD yang akan ditempatkan sebagai tenaga pendidik di lokasi-lokasi yang sulit ditempuh, yakni di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi: Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Pelayanan pendidikan di wilayah itu akan ditingkatkan, tak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendidikan, tapi juga distribusi guru. Pengiriman 798 guru dalam program GGD merupakan wujud upaya pemerataan distribusi guru. Pengiriman tenaga guru angkatan pertama ini akan berlanjut dengan pengiriman angkatan-angkatan berikutnya

sampai target kualitas pelayanan pendidikan yang sama di seluruh wilayah Indonesia tercapai.

“Program GGD merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang paling membutuhkan. Khususnya untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia,” kata Mendikbud. “Pengiriman guru di daerah terpencil ini mendapat ilham dari Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) tahun 1950-an yang digagas mantan Rektor UGM, almarhum Koesnadi Hardjasoemantri.”

Angkatan pertama GGD yang berjumlah 798 guru ini adalah hasil seleksi para calon yang berasal dari alumni SM3T yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM-3T untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi GGD ini disahkan dengan penerbitan Kebijakan Permenpan RB No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus Aparat Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No. 762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS untuk SM-3T.

Jamaluddin yang bertugas di Warmare, Papua, pada Program SM-3T, merasa tertantang ingin mendidik anak-anak yang berada di tempat yang sulit dicapai. “Saya langsung mendaftar karena merasa tertantang dan ingin menjawab tantangan itu,” katanya. Banyak hal unik yang Jamaluddin alami ketika mengajar di Warmare.

Pernah suatu kali siswanya bertanya, “Bapak, dari Makassar ke Surabaya naik kereta bisa berapa



Keceriaan siswa-siswa SD di sebuah distrik di Papua.

lama?” Bagi para pelajar di wilayah Indonesia Barat pertanyaan semacam itu akan menjadi bahan tertawaan, tapi bagi pelajar di Papua itu lumrah. Mereka memang sungguh tidak tahu. “Untung saya punya atlas, di sekolah sama sekali tak ada. Anak-anak lalu saya beri penjelasan dengan atlas. Baru mereka mengerti,” ungkap Jamaluddin.

Pria asal Bone berusia 27 tahun itu pernah juga dibuat kaget lantaran anak didiknya kesal tak mendapat Kartu Indonesia Pintar. Muridnya mengamuk.

Program GGD ini bisa disebut juga sebagai kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru di wilayah 3T. Program ini akan mengubah pandangan dan kebijakan bahwa guru terbaik berasal dari daerah setempat. “Guru terbaik adalah yang kompetensinya baik dan bisa ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mendikbud. Selain itu, ada pesan lain yang sesungguhnya terkandung lewat Program GGD. Para guru muda ini diharapkan dapat menginspirasi anak-anak, para siswa, dan peserta

didik di wilayah mereka ditempatkan untuk meraih sukses dalam pendidikan.

Lebih jauh lagi, para guru muda itu juga membawa pesan kepada anak-anak di daerah untuk memahami bahwa setiap daerah di Indonesia adalah rumah mereka. Anak-anak itu juga kelak bisa menyanam pendidikan dan berkarier di daerah lain, tidak harus di kampung halaman atau daerahnya sendiri. Dengan kata lain, para guru muda ini ikut mengemban misi mempersiapkan tenun kebangsaan. •



“

Pengajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya. Merdeka pikiran dan tenaganya.

— KI HADJAR DEWANTARA



PETA SEBARAN GURU GARIS DEPAN

217
GURU

Nangroe Aceh Darussalam

Aceh Besar	34
Aceh Selatan	44
Aceh Singkil	26
Aceh Timur	35
Gayo Lues	39
Simeulue	39

288

Nusa Tenggara Timur

Alor	35
Flores Timur	34
Kupang	47
Manggarai	44
Manggarai Timur	46
Rote Ndao	32
Sumba Timur	51

Papua Barat

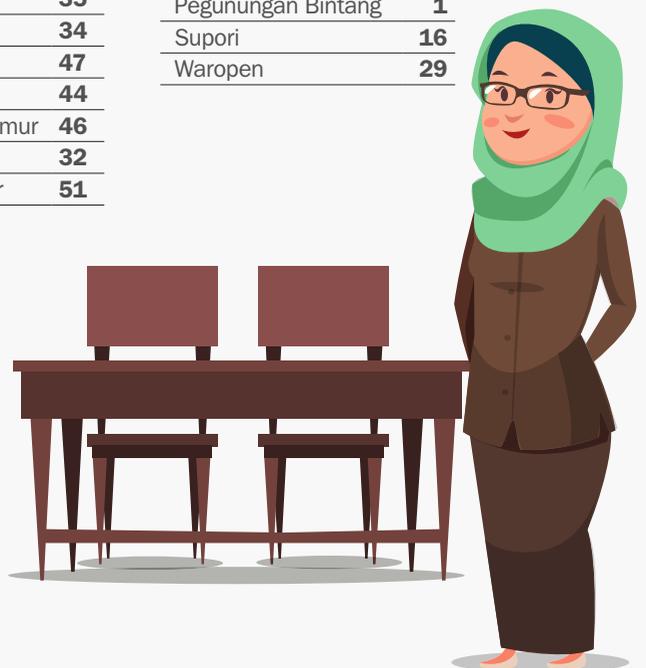
Manokwari	35
Manokwari Selatan	32
Raja Ampat	31
Sorong	35
Sorong Selatan	24
Tambrau	10
Teluk Bintuni	27

194

98

Papua

Deiyai	1
Jaya Wijaya	16
Kepulauan Yapen	13
Lanny Jaya	17
Pegunungan Bintang	1
Supori	16
Waropen	29





Sejumlah guru mengikuti UKG di SMAN 74, Jakarta Selatan. Diikuti hampir 3 juta guru se-Indonesia, Kemendikbud menyelenggarakan UKG dalam rangka pemetaan guru. Karena itu, tak ada sanksi apa pun atas hasil UKG.



UJI KOMPETENSI GURU

Menakar elemen kompetensi guru, meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik.

PENGEMBANGAN potensi, kompetensi, dan peningkatan kinerja guru menjadi agenda utama pelaksanaan pendidikan berkualitas. Kemendikbud menyediakan sarananya melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Berbeda dengan UKG sebelumnya yang hanya

menyasar guru bersertifikat, kini seluruh guru bisa mengikutinya, baik swasta maupun negeri. Kemendikbud ingin semua guru bisa mengikuti UKG.

Diperkirakan hampir 3 juta guru yang mengikuti UKG ini. Dengan

catatan, mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dilaksanakan dua gelombang, UKG kali ini diselenggarakan di 4035 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di semua provinsi se-Indonesia. Pertama pada 9-27 November 2015, dan gelombang kedua



Tim IT Kemendikbud sedang memantau perkembangan UKG se-Indonesia.

akan dilaksanakan pada Desember 2015.

Peserta UKG menjalani ujian sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan tempatnya bertugas. Mendikbud mengumpamakan UKG itu sebagai alat bercermin bagi para guru. “Alat bercermin itu maksudnya, nanti hasil UKG bisa untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru. Kemendikbud bertugas menyiapkan alat untuk bercermin, dan guru-guru menyiapkan kompetensinya untuk diukur. Setiap guru akan berbeda pelatihannya, tergantung masing-masing hasilnya nanti,” kata Mendikbud.



UKG ini mengukur dua kompetensi, profesional dan pedagogis. Profesional berkaitan dengan kompetensi materi ajar yang diampu, sedangkan pedagogis adalah metode pengajaran. Hasil UKG akan menjadi acuan program pelatihan lanjutan. Karena itu, tak ada sanksi apa pun atas hasil UKG ini.

Kemendikbud merancang UKG sebagai langkah untuk memetakan kompetensi mendetail yang menggambarkan kondisi objektif guru. Hasilnya per individu. Dengan begitu, seorang guru bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya; bagi

Kemendikbud, hasil UKG ini akan dijadikan pijakan untuk meningkatkan kompetensi guru per individu. Dengan begitu, penanganannya tepat guna. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, memberi gambaran

ihwal UKG ini. “Biasanya, jika ada pelatihan peningkatan maka kopral, letnan, dan jenderal dimasukkan dalam satu kelas. Padahal masalah mereka berbeda-beda. Nah, UKG ini akan memasukkan mereka sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing individu dan kemampuannya. Kalau kopral, ya dengan kopral, bukan dengan jenderal,” katanya.

UKG ini mengukur dua kompetensi, profesional dan pedagogis. Profesional berkaitan dengan kompetensi materi ajar yang diampu, sedangkan pedagogis adalah metode pengajaran. Dua kompetensi lainnya, sosial dan kepribadian memang tak menjadi acuan dalam UKG. Kedua kompetensi itu diukur melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) di masing-masing sekolah. Hasil UKG akan menjadi acuan program pelatihan lanjutan. Karena itu, tak ada sanksi apa pun atas hasil UKG ini.

Perhatian khusus terhadap potensi dan peningkatan kinerja guru tak bisa dianggap hal sepele. “Kerja guru lebih berisiko. Kalau salah diagnosa bisa mati satu generasi,” kata Tagor Alamsyah, Kepala Seksi Penyusunan Program Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. “Kalau kita tidak profesional, maka akan ada guru jago mengajar yang salah. Cara penyampaian andal, bersimulasi dengan infografis, tapi apa yang guru itu sampaikan keliru. Siswa menangkap dengan cepat, tapi salah. Karena itu substansi kompetensi pedagogis dan profesionalnya diukur melalui UKG.”

Mengapa Guru Perlu Ikut Uji Kompetensi?

Guru bisa menggunakan UKG sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Guru yang terus belajar akan jadi inspirasi nyata bagi siswa.

Langkah awal guru untuk mengembangkan kompetensi

Guru bisa mengetahui capaian kompetensinya selama ini.

Pelatihan yang sesuai dengan rapor kompetensi guru

Kesempatan mengembangkan diri dan prestasi bagi guru

Meningkatkan mutu pembelajaran. Guru-guru jadi contoh nyata pembelajar yang terus belajar.

Mengukur diri, mengembangkan potensi!

Apa Saja yang Baru di UKG 2015?

UKG mengukur dua dari empat kompetensi guru yaitu kompetensi profesional dan pedagogis. Keseluruhan kompetensi guru, termasuk kompetensi sosial dan kepribadian, diukur melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG).

UKG 2012-2014:

- Peserta adalah sebagian guru yang ingin disertifikasi.
- Guru menjalani uji kompetensi hanya berdasarkan mata pelajarannya.

UKG 2015

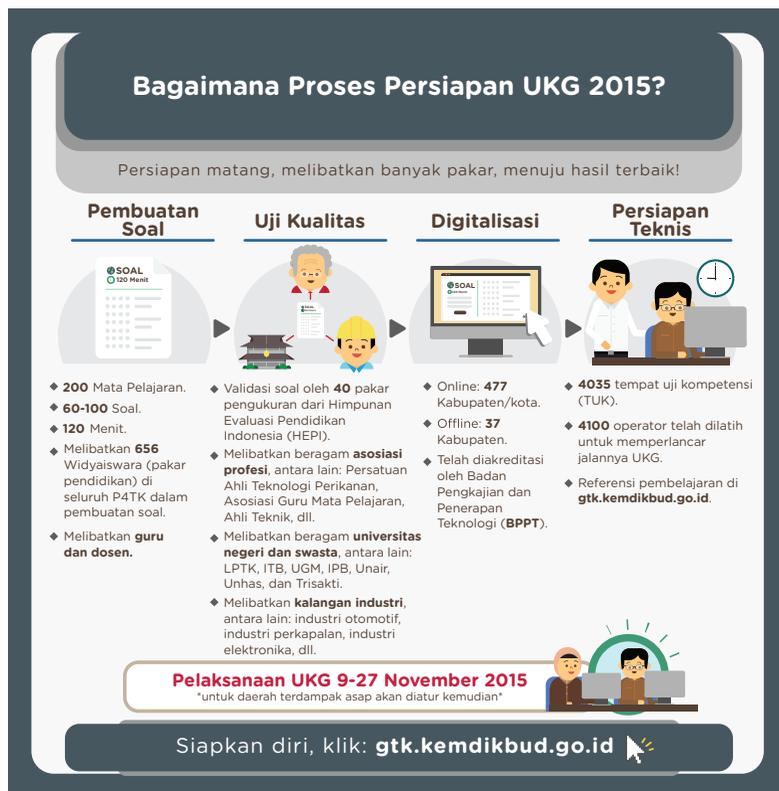
Peserta UKG adalah semua guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Rapor Kompetensi

Pengembangan Kompetensi

Guru menjalani uji kompetensi sesuai mata pelajaran dan jenjang pendidikan tempatnya mengajar.

UKG 2015 Menuju Guru Berkualitas



jawab dengan profesi saya sebagai guru. Menjalani ujian itu tantangan,” katanya. Ujian kompetensi ini merupakan ajang kali keduanya. Dia berharap agar UKG bisa meniru Ujian Nasional (UN) yang tak lagi jadi penentu tunggal kelulusan. “Semoga ke depan UKG tak lagi jadi penentu tunggal evaluasi guru. Seperti UN saat ini misalnya, kan sudah tak lagi jadi satu-satunya penentu kelulusan. Kegiatan mengajar para guru juga tak kalah penting menjadi bagian evaluasi,” katanya.

Harapan lain datang dari peserta UKG asal SLTP Al-azhar Bintaro, pengajar matematika, Musa Abdilah. “Semoga ada tindak lanjut setelah UKG. Jangan cuma selesai pada ujian, tapi bagaimana selanjutnya bagi guru yang mendapat nilai di bawah standar, apakah ada pembinaan atau lokakarya? Agar ada peningkatan mutu dan kualitas kompetensi guru,” kata Musa Abdilah.

Tindak lanjut pasca-UKG memang kerja yang musti dipikul bersama. “Tugas kita yang paling berat sebenarnya paska-UKG. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru sesuai potretnya. Tantangannya adalah kemauan dari tenaga pendidik, kesiapan pemerintah yaitu sarana-prasarana, bahan diklat, dan dukungan pemerintah daerah,” kata Tagor Alamsyah. Setelah mengetahui secara konkret peta sesungguhnya kondisi para guru, Kemendikbud akan bersegera untuk meningkatkan kompetensi mereka. Skema peningkatannya pun sudah ada. Karena, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak Indonesia. •

Mengenai sistem, UKG ini dikembangkan tim Kemendikbud sendiri. Tim yang dikomandani Muhammad Rafie Pawellangi ini membuat sistem ujian yang sangat mudah digunakan dan aman. Hanya perlu kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer, seperti mengetik dan menggerakkan tetikus. “Para peserta ujian tak perlu khawatir salah pencet, karena kami hanya menghidupkan tombol-tombol dalam papan ketik yang dipakai dalam ujian,” kata Rafie. Dia juga menjamin bahwa soal-soal dalam UKG ini tak bocor karena timnya sudah membuat pengamanan tersendiri. Dan, sistem ini sudah diakui banyak lembaga, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, telah pula dimanfaatkan berbagai lembaga lain, seperti Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil.

Para peserta menyambut baik penyelenggaraan UKG tahun ini. “Proses menjelang UKG, seperti sosialisasi, dan ada praktik pengerjaan sebelum dimulai sangat membantu. Sangat baik,” kata Warno Ekariyanto, guru olahraga, SMAN 74. Namun, dia cukup kepayahan berpacu dengan waktu yang tersedia. “Kalau bisa pesertanya dibagi ke dalam kategori usia. Seperti saya, sudah sepuh (tua), mengerjakan soal cerita yang panjang, butuh konsentrasi dan waktu pengerjaan yang lebih,” katanya.

Berbeda dengan Warno, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SLTP Bina Nusantara, Vivi Trenggono, menganggap UKG sebagai sesuatu tantangan. “Saya harus bertanggung



DATA POKOK PENDIDIKAN

Pada akhirnya Kemdikbud pada 2015 ini berhasil menyatukan semua data di lingkungan kementerian. Data pendidikan lebih cepat disusun, kebijakan lebih tajam dan efisiensi dapat ditingkatkan.

KETERSEDIAAN data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan terintegrasi amat diperlukan dalam proses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika sebelumnya data-data yang ada itu terpisah, melalui berbagai proses yang panjang dan keputusan yang tegas pada akhirnya Kemendikbud berhasil menyatukannya dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dapodik adalah Sistem Pengelolaan Data Pendidikan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu sehingga bisa menghasilkan satu data. Dapodik ini dapat membuat program-program pembangunan pendidikan lebih terarah dan mempermudah penyusunan perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

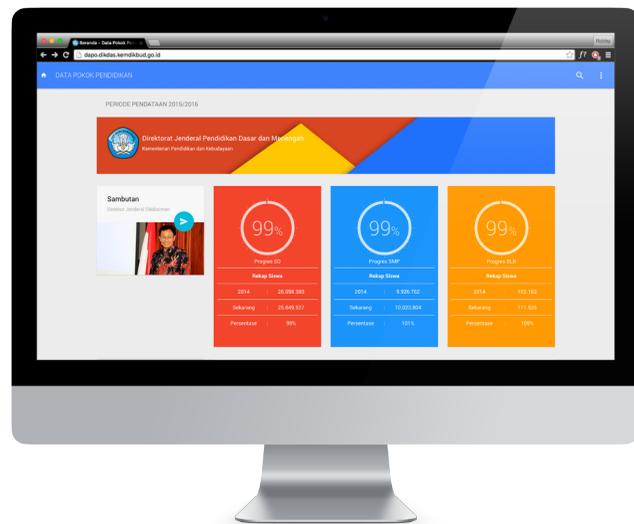
Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan pembangunan pendidikan nasional, Dapodik harus memuat empat faktor

pendidikan yaitu: pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan.

Aplikasi Dapodik merupakan satu-satunya aplikasi penjangkaran pendataan di lingkungan Kemendikbud saat ini. Sebelumnya dikenal beberapa sistem pendataan yang

dikembangkan terpisah dan pada tahun ini melalui proses yang sulit dan keputusan yang tegas, akhirnya semua sistem pendataan dapat disatukan dan mengusung nama tunggal, Dapodik.

Karenanya aplikasi Dapodik diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan data di Kemendikbud.





Guru dan murid berinteraksi bersama, mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah mereka. Bagaimana pun, kualitas pendidikan di sekolah ditentukan oleh guru berkualitas. Dengan Dapodik, Kemendikbud bisa mengetahui secara jelas pemetaan kualitas dan kuantitas guru se-Indonesia.



Penyatuan Dapodik akan meningkatkan kehandalan data yang menjadi acuan utama bagi Kemendikbud untuk menciptakan kebijakan yang lebih tajam, lebih responsif dan lebih efisien.

Bila ada atribut yang masih belum tersedia, maka unit utama yang membutuhkan atribut tersebut untuk segera mengusulkan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Di samping itu, aplikasi Dapodik yang dirancang juga harus bisa mengakomodasi dari sekolah yang masuk kategori SPM sampai sekolah yang sudah memenuhi SNP. Pengembangan fitur yang ada di sistem aplikasi Dapodik dapat memudahkan operator sekolah dalam memenuhi kebutuhan data yang ada di tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan agar

tidak terjadi pengulangan entri data oleh operator sekolah.

Salah satu contoh manfaat penyatuan Dapodik adalah Kemendikbud bisa mengetahui pemetaan guru secara pasti dan konkret. Dapodik yang valid ini dapat menjadi acuan, baik untuk kepentingan menyusun perencanaan kebutuhan, peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pembinaan karier, maupun pemberian tunjangan profesi dan tunjangan lainnya. Dapodik bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan aneka tunjangan, kesejahteraan,

penyetaraan guru bukan PNS, penilaian angka kredit, karier, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan, serta beasiswa guru dan tenaga kependidikan.

Bagi satuan kerja pembinaan sekolah, Dapodik digunakan untuk merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi, Bantuan Beasiswa Miskin (BSM), dan izin belajar peserta didik. Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan melakukan penjarangan peserta ujian nasional, datanya juga diambil dari Dapodik yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh PDSPK.

Pemanfaatan secara bersama-sama sumber data ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan satu satuan kerja selalu sinergis dengan satuan kerja yang lain. •



Seorang bapak menggendong sambil menyeberangi sungai untuk mengantarkan kedua anak ke sekolah.



HARI PERTAMA SEKOLAH

Pendidikan adalah kemitraan antara orang tua dan guru. Kini orang tua tak lagi menjadi penonton di luar pagar sekolah. Kemendikbud membuat tradisi baru agar sekolah bisa lebih aktif bermitra dengan orang tua dan orang tua lebih aktif dalam proses pendidikan anak.

ORANG tua sebagai pelaku pendidikan jarang mendapat perhatian. Bahkan mungkin belum pernah disentuh. Padahal, peran orang tua dalam pendidikan sangat besar. Dalam sehari, seorang anak di sekolah paling banter 6-8 jam. Sisanya dia habiskan di rumah dan lingkungan sekitarnya.

Menyadari arti pentingnya orang tua dalam pendidikan anak,

kemendikbud mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Selain meminta orang tua untuk mendampingi anak belajar selama dua puluh menit setiap malam, aturan itu juga meminta agar orang tua mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Tak sebatas sampai pagar dan gerbang sekolah, tapi masuk hingga ke ruang kelas untuk berkomunikasi dengan para guru, terutama wali kelas dan guru yang akan mengajar sang anak.

Berdasarkan aturan tersebut, Kemendikbud melahirkan Gerakan Hari Pertama Sekolah. Menurut Mendikbud, hari pertama masuk sekolah merupakan hari yang penting bagi siswa. Sebab, setiap siswa memiliki reaksi psikologis yang berbeda-beda ketika masuk sekolah di hari pertama. Ada siswa yang sudah merasa nyaman, tetapi ada pula siswa yang diliputi perasaan khawatir, kurang percaya diri, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. “Kehadiran orang tua menemani anaknya mengirimbkan pesan yang jelas bagi si anak, bahwa orang tua memercayai sekolah itu untuk mendidik anak-anaknya beberapa jam setiap hari selama bertahun-tahun ke depan,” katanya.

Hal ini dirasakan sendiri oleh Made Andi, seorang dosen di Universitas Gajah Mada. Menjelang mandi pagi, Made Andi (37) tertegun setelah membaca kicauan Mendikbud dan para pengikutnya di Twitter tentang #HariPertamaSekolah. Pagi 27 Juli 2015 itu dia berencana terbang ke Singapura untuk menghadiri acara pendidikan tingkat Asia Tenggara. Pada hari itu juga Lita, putrinya,



masuk hari pertama kelas lima SD. Tapi, malam sebelumnya dia memutuskan, “Biar Lita diantar ibunya saja.”

Lita dan ibunya sudah berangkat ke sekolah ketika akhirnya Andi memutuskan untuk menyusul mereka.

“Saya mungkin terlambat karena Lita bisa jadi sudah masuk kelas ketika saya tiba di sekolahnya, tetapi saya tidak mengurungkan niat,” katanya. Betul saja, sekolah anaknya sudah agak sepi, cuma tinggal beberapa anak yang masih belum masuk kelas.



Seorang ibu mengantarkan anaknya sekolah. Orang tua yang memberikan dukungan penuh dalam proses pendidikan akan sangat memengaruhi perkembangan kepribadian dan karakter anak.

Penyesalan menyergapnya. “Saya telah melewatkan hal paling penting, memastikan bahwa seorang anak usia sepuluh tahun merasa didukung dalam menjalani perjuangannya.”

Dia sudah bersiap melangkah pulang ketika anaknya sambil berlari

memanggil, “Ayah!” Andi memeluk erat putrinya itu. Dunianya berubah cerah. Dia merasakan bahwa energi semesta tumpah kepadanya dan rasa haru merampoknya.

Made Andi hanya satu dari sekian banyak orang tua yang tersadarkan

tentang pentingnya hari pertama anak bersekolah. Setelah membaca kicauan Mendikbud, dia sadar bahwa mengantarkan anaknya ke sekolah tak kalah penting ketimbang menghadiri acara pendidikan internasional.

Selain itu, kehadiran pada hari pertama masuk sekolah menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk melihat dan mengenali lebih dekat sekolah sebagai rumah kedua anaknya dalam menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Orang tua seyogianya menemani masa transisi ini karena orang tua harus mengenali siapa saja yang diberi kepercayaan dalam membantu mempersiapkan masa depan si anak. Sebaliknya, bagi sekolah dan para guru, ini menjadi kesempatan untuk mengetahui lebih dekat latar belakang orang tua siswa.

Gerakan hari pertama masuk sekolah ini disambut baik oleh guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Menurut mereka, masuknya orang tua ke lingkungan sekolah membuat komunikasi antara pihak sekolah dengan para orang tua terjalin lebih baik. Komunikasi dan kerja sama seperti itu sangat bermanfaat untuk menyukseskan program pendidikan yang dikembangkan sekolah, termasuk pendidikan karakter siswa.

Kepala SMP Negeri 1 Depok, Jawa Barat, Ety Kuswandarini, memandang perlu Permendikbud No. 23/2015 ini karena mengajak orang tua memasang antena terhadap perkembangan anak-anak mereka. “Orang tua cenderung menganggap pendidikan urusan antara guru dan murid. Mereka tidak lagi mengindahkan perkembangan anak di sekolah,” katanya. Padahal,



Bu Tasmi bergegas mengantar anaknya pergi sekolah ke SDN Banyuroto-Sawangan-Magelang. Anak bungsunya rewel dalam gendongan kainnya. Meski begitu, beliau tetap melangkahkan kakinya, karena yakin sekolah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

dalam sehari seorang anak tinggal di sekolah hanya sepertiga hari. Sisanya di rumah bersama keluarga. Permen-dikbud No. 23/2015 ini upaya aktif melibatkan orang tua ke sekolah.

Kegiatan ini didukung penuh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB). Menteri Yuddy Chrisnandi menganjurkan kepada seluruh

Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan aparatur pemerintah lainnya untuk meluangkan waktu mengantar anak-anak mereka berangkat sekolah pada hari pertama masuk. Pada hari itu mereka diberi kesempatan terlambat masuk kantor. “Masa depan Indonesia terletak pada budi pekerti anak. Untuk itu, ASN sebagai pemimpin di tengah-tengah

masyarakat harus menjadi contoh dan teladan dalam melahirkan dan mendesain anak Indonesia yang berbudi pekerti dan berkarakter kuat,” kata Menteri Yuddy.

Akibat begitu antusiasnya masyarakat menyambut gerakan ini, tanda pagar #HariPertamaSekolah menjadi *trending topic* di Twitter pada hari itu. •



“

Setiap anak berhak mendapatkan pendampingan dalam proses pendidikannya.. Keterlibatan orang tua sejak hari pertama sekolah sangat diharapkan.



HARI PERTAMA SEKOLAH



Gerakan yang mendorong para orang tua mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Tidak sebatas sampai pagar dan pintu gerbang sekolah, tapi masuk hingga ke ruang kelas.

“Kehadiran orang tua menemani anaknya akan mengirimkan pesan yang jelas bagi si anak bahwa orang tua dan sekolah bergandengan erat dalam mendampingi proses pendidikannya.”

— MENDIKBUD ANIES BASWEDAN



Gerakan ini bertujuan untuk membangun komunikasi antara orang tua dan para guru, terutama wali kelas dan guru yang akan mengajar sang anak. Dalam pertemuan inilah ada semacam ijab kabul pertanda orang tua menitipkan anaknya kepada guru di sekolah.



Kemendikbud meyakini bahwa sekolah adalah wahana persemaian perkembangan karakter anak. Karena itu, Kemendikbud berikhtiar mewujudkan sekolah sebagai taman yang menyenangkan dengan menghentikan segala perpeloncoan dan kekerasan di sekolah.



MASA ORIENTASI SISWA

Hentikan perpeloncoan di sekolah. Siswa datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk dipermalukan dan disiksa.

BIASANYA siswa baru diliputi kecemasan menjelang Masa Orientasi Siswa (MOS). Bagi siswa baru, MOS itu menakutkan. MOS memang kerap dijadikan ajang untuk memermalukan dan tak jarang menyiksa

siswa baru. Bertahun-tahun praktik ini dibiarkan dan dianggap sebagai tradisi, Kemendikbud menegaskan bahwa MOS harus benar-benar bebas dari perpeloncoan. Tak boleh lagi ada kekerasan dalam proses

belajar-mengajar. Menurut Mendikbud, ini bukan pembelajaran. “Siswa datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk dipermalukan,” katanya. “Ini pesan untuk semua. Orang tua, siswa baru, jangan diam. Kalau Anda melihat sekolah Anda melakukan itu, tantang, protes. Jangan diam. Peraturannya sudah ada.”

Memang, Permendikbud Nomor 55/14 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru mengatur bahwa tidak boleh ada kekerasan terhadap siswa baru dan pungutan liar kepada orang tua siswa. Namun, rupanya, tak semua sekolah memerhatikan dan



Tahun ini Kemendikbud menekankan bahwa MOS atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) harus menjadi wahana bagi siswa baru untuk mengenal lebih dalam sekolah dan segala lingkungannya. Kemendikbud tak tinggal diam mengatasi kekerasan di sekolah. Jika menemukan pelanggaran, sila melaporkannya melalui laman <http://mopd.kemdikbud.go.id>.

menerapkan aturan itu. Untuk lebih menekankan aturan itu, sebelum tahun ajaran baru 2015 dimulai, Kemendikbud melayangkan surat edaran yang dialamatkan kepada gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia. Surat edaran itu menegaskan bahwa tak boleh lagi ada perpelonconan, pelecehan, dan kekerasan selama MOS. Selain itu, sekolah dilarang mengutip uang dari orang tua siswa untuk mendanai kegiatan MOS.

Namun, ada juga sekolah-sekolah yang tak mengindahkan peraturan itu. Meski sudah mengetahui adanya peraturan itu, mereka tak melaksanakannya karena menganggapnya sebagai tradisi. Makanya, pada Senin 27 Juli 2015 itu Mendikbud gusar ketika melakukan inspeksi mendadak di sejumlah sekolah di Tangerang. Pagi itu dia melihat semua siswa baru mengenakan atribut aneh. Siswa-siswa itu mengenakan topi yang terbuat dari bola plastik yang dipotong separuh, *name tag* yang terbuat dari kardus besar, dan mengganti tali sepatu dengan tali rafia.

Di hadapan ratusan siswa baru itu, Mendikbud meminta mereka mencopot atribut-atribut itu. Siswa baru pun bersorak menanggapi perminnannya. Segera mereka meloloskan



Bersama-sama mewujudkan sekolah sebagai taman menyenangkan.

semua atribut yang membuat mereka tampak seperti badut, jauh dari kesan seorang siswa di sebuah lembaga pendidikan.

Melalui Permendikbud No. 55/14 dan surat edaran kepada semua kepala daerah seluruh Indonesia, Kemendikbud meminta semua pihak mengubah kebiasaan buruk ini. Jika tak segera dihentikan saat ini juga, ini akan menjadi tradisi yang terus berjalan hingga entah kapan. “Tradisi perpelonconan ini apak, kuno, tak menunjukkan sikap beradab,” kata Mendikbud.

Karena itu Kemendikbud meminta semua kepala daerah menindak tegas kepala sekolah yang melakukan pembiaran atau malah terlibat dalam kegiatan memalukan ini. Bila perlu kepala sekolah itu digeser posisinya. “Kita ingin orang-orang yang memimpin lembaga pendidikan adalah orang-orang yang berani menegakkan aturan, berani membuat tradisi baru, berani membuat tradisi bahwa manusia Indonesia beradab. Karena itu, perlakukan siswa baru dengan cara beradab. Jangan biarkan cara-cara tak beradab hidup di sekolah

anda. Seorang kepala sekolah yang membiarkan tindakan-tindakan tak beradab untuk terus berlangsung maka dia tak pantas memimpin sebuah lembaga pendidikan,” kata Mendikbud.

Terkait soal ini, Kemendikbud membuka layanan pelaporan secara daring ke laman <http://mopd.kemdikbud.go.id>. Melalui laman itu, semua pihak—baik siswa, orang tua, guru maupun alumni—bisa melaporkan praktik-praktik tak beradab ini kepada Kemendikbud. Untuk menghindarkan kekhawatiran tertentu, Kemendikbud akan menganggap semua laporan yang masuk sebagai anonim. Dengan begitu, orang-orang yang melaporkan tak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi kepadanya di kemudian hari. Keselamatannya tetap terjaga. Karena, pada prinsipnya, yang masuk ke Kemendikbud adalah isi laporannya. Sampai berakhirnya MOS 2015 ini Kemendikbud mendapatkan pengaduan sebanyak 273 laporan yang berasal dari seluruh Indonesia. (Tabel Infografis)

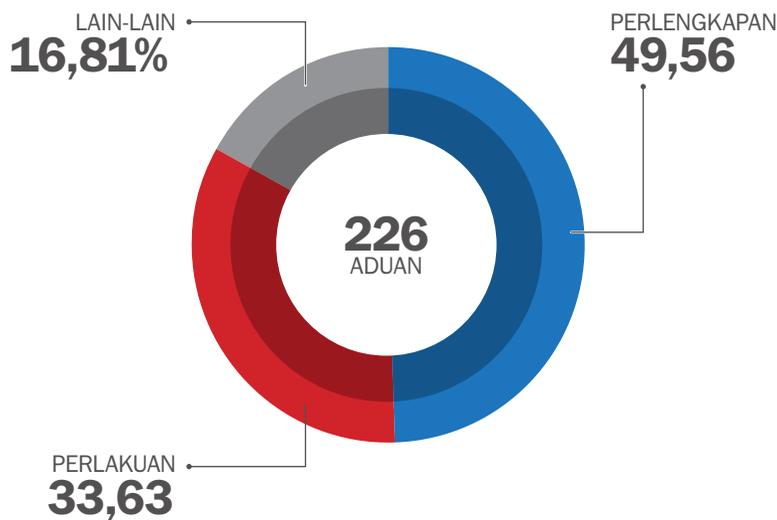
Selalu ada celah dalam setiap kesempatan. Untuk menanggapi celah yang terjadi pada MOS, Kemendikbud bersikap sigap dan responsif. Pada tahun ini ada beberapa kasus yang terjadi terkait MOS, seperti di Bekasi, Tanjung Uban, Bintan, Tuban, dan Garut.

Berkaitan dengan kasus meninggalnya seorang siswa di SMPN 11 Tanjung Uban, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi langsung terbang menuju Bintan untuk menyelidiki kasusnya. Ketika ada



Di sekolah, kami belajar, bermain merangkai imajinasi, dan mewujudkannya.

GRAFIK PENGADUAN MOPDB 2015



SUMBER: WWW.MOPD.KEMDIKBUD.GO.ID



Anak-anak siswa SD Negeri 1 Kopeng, Salatiga sedang saling merias dengan menggambari wajah kawannya sebelum pentas. Ekspresi kebahagiaan dan keceriaan anak-anak mesti dilanggengkan oleh sekolah. Berangkat dari kesadaran tersebut, Kemendikbud melarang setiap upaya perpeloncoan, kekerasan ataupun cara-cara tak beradab di lembaga pendidikan.

seorang siswa yang terseret arus di Garut, Jawa Barat, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad berangkat ke Garut untuk mengetahui duduk soalnya. Sementara, Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto bersama tim langsung meluncur ke Bekasi untuk menangani kasus yang terjadi.

Tahun ini Kemendikbud menekankan bahwa MOS atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) harus menjadi wahana bagi siswa baru

untuk mengenal lebih dalam sekolah dan segala lingkungannya; mulai dari bagaimana kurikulumnya, apa saja jenis ekstrakurikuler, siapaakah alumninya, sampai apa saja prestasi sekolah itu dari tahun ke tahun. Dengan begitu, menurut Kemendikbud, siswa baru bisa lebih menyelami dan mengetahui akan ke mana kiranya dia melangkah dan berproses di dalam MOS, mestinya sekolah tersebut.

Mendikbud menegaskan bahwa proses MOS yang baik adalah upaya

pengejawantahan gagasan sekolah sebagai taman pendidikan yang menyenangkan. “Mari kita bangun sebuah kebiasaan siswa baru yang beradab, yang menunjukkan karakter terdidik, dan hentikan cara-cara yang tak beradab. Kalau itu kita mulai hari ini, Insha Allah akan menjadi tradisi. Dan mudah-mudahan ini menjadi budaya baru. Bahwa masuk sekolah baru artinya dihormati, dihargai. Izinkan itu menjadi tradisi baru di dunia pendidikan kita.” •



PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Karakter positif siswa harus diajarkan, dibiasakan, dan dikonsistenkan hingga menjadi budaya.

SESAAT setelah turun dari motor, remaja lelaki itu menyalami ayahnya. Begitu melewati gerbang sekolah, remaja itu lekas mencium tangan ibu dan bapak gurunya yang berbaris menunggu kedatangan murid-murid mereka. Remaja itu lalu bergabung dengan teman-temannya yang berada di beranda sekolah, dan mereka memasuki kelas.

Pukul 7.30 WIB bel masuk kelas berdering. Seorang murid maju, memimpin teman-temannya berdoa. “Mari kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing,” katanya. Selesai, tapi pelajaran belum juga dimulai. Anak-anak itu diminta membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Beberapa jam kemudian, jarum jam menunjukkan waktu pulang sekolah. Sebelum kelas berakhir pada hari itu, seorang siswa diminta maju lagi untuk memimpin berdoa.

Demikianlah keseharian di satu sekolah menengah pertama di bilangan Jakarta Selatan. Terlebih setelah Kemendikbud pada Juli 2015 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan



Sejumlah siswa SDN 02 Pasir Haur, Kampung Sitoko, Lebak Banten memunguti sampah jajanan yang berserakan di halaman sekolah tersebut.

Budi Pekerti (PBP). PBP ini mengatur ihwal pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak orientasi siswa baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang SD sampai SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. “Karakter positif siswa harus diajarkan, dibiasakan, dan dikonsistenkan hingga menjadi budaya,” kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, hal pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa adalah diajarkan kemudian terbentuk karakter dan selanjutnya menjadi budaya, terutama budaya di sekolah. Intinya, kata Mendikbud, budi pekerti itu perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan bukan hanya pengetahuan. Jika budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan, ia akan menjadi karakter dan selanjutnya menjadi budaya.

Dari segi istilah, Kemendikbud memilih menumbuhkan, bukan menanamkan. “Penumbuhan berarti memandang siswa, guru, dan anggota masyarakat sekolah sudah memiliki bibit karakter baik. Tugas kita semua ialah menciptakan iklim sekolah yang lebih baik agar semua perangkat sekolah turut berbudi pekerti, bukan dari luar ditancapkan dan ditanamkan,” kata Mendikbud.

Selama ini Kemendikbud sudah menanamkan budi pekerti pada jalur kurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, PBP ini akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan nonkurikuler di seluruh jenjang pendidikan dan disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan siswa. Di SD, misalnya, pelaksanaannya lebih fokus kepada perilaku positif guru dan kepala

sekolah sebagai sosok yang diteladani siswa. Di tingkat SMP dan SMA, pelaksanaannya dilakukan dengan metode yang lebih pada kemandirian siswa. Karena memang nonkurikuler, lingkup kegiatan PBP ini lebih bersifat persuasif dan partisipatif, sehingga tercipta iklim yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.

Lingkup kegiatan penumbuhan budi pekerti dibagi menjadi tujuh. Pertama, menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual. Pada lingkup ini, para siswa dilatih menghayati hubungan spiritual dengan sang pencipta dan diwujudkan dengan sikap moral keseharian untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar. Kedua, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan kebinekaan. Melalui nilai kedua ini para siswa dilatih untuk teguh menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan bangsa melalui berbagai kegiatan. Ketiga, mengembangkan interaksi positif antarpeserta didik dengan melatih mereka peduli terhadap kondisi fisik dan psikologis kawan, adik, dan kakak kelas. Membangun sikap simpati dan empati terhadap semua.

Keempat, mengembangkan interaksi positif dengan guru dan orang tua, antara lain dengan melatih mereka menghormati guru, kepala sekolah, warga masyarakat sekolah, dan orang tua. Kelima, menumbuhkembangkan potensi diri siswa secara unik. Keenam, pemeliharaan lingkungan sekolah, antara lain, dengan melatih kebersihan seperti diterapkan para guru di sekolah tersebut. Ketujuh, pelibatan orang tua dan masyarakat,





Para siswa mendengarkan guru yang sedang mengajar. Sekolah memang sudah semestinya melahirkan anak didik yang berbudi pekerti baik. Kemendikbud bertekad menumbuhkan generasi muda yang berbudi pekerti dengan mengeluarkan Permendikbud No. 23/2015. Tak hanya kepada siswa, Permendikbud itu juga menekankan peran orang tua dan guru dalam pembentukan karakter anak.



Siswa beragama Hindu melakukan ritual menjelang hari raya Nyepi tahun baru SAKA 1937 di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Permendikbud No. 23/2015 itu juga mendorong siswa untuk lebih memerhatikan aspek spiritual, agar keseimbangan intelektual dan spiritual terjadi.

seperti mengajak serta mereka dalam kegiatan-kegiatan khusus sekolah.

Karena pendidikan adalah gerak-ang semesta, PBP ini juga melibatkan orang tua. Maka, Permendikbud No. 23 Tahun 2015 itu mengatur penguatan peran orang tua dalam menumbuhkan budi pekerti pada anak melalui pendidikan dalam keluarga dan di rumah. Tak hanya itu, Kemendikbud melembagakan peran orang tua dalam pendidikan ini dengan pembentukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Dengan unit kerja baru ini pemerintah mengajak orang tua untuk lebih berperan dalam memberikan pendidikan informal, terutama dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan pelatihan teknik dasar komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. “Ini sebuah

“

Penumbuhan berarti memandangi siswa, guru, dan anggota masyarakat sekolah sudah memiliki karakter baik. Tugas kita semua ialah menciptakan iklim sekolah yang lebih baik agar semua perangkat sekolah turut berbudi pekerti, bukan dari luar ditancapkan dan ditanamkan.

—MENDIKBUD ANIES BASWEDAN

gerakan besar yang nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan, dengan memperkuat peran orang tua,” kata Dewi Hughes, Duta Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Salah satu cara menumbuhkan-kembangkan hal tersebut adalah dengan mewajibkan setiap siswa membaca buku selain buku-buku

mata pelajaran kurang lebih selama 15 menit setiap harinya sebelum jam belajar dimulai. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan minat baca paling rendah di dunia.

Mendikbud menyampaikan, dengan pembiasaan membaca buku pada anak-anak diharapkan



Penumbuhan Budi Pekerti

Sekolah selanjutnya menjadi taman. Di dalamnya anak-anak akan mendapatkan suasana belajar penuh tantangan, menyenangkan, dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Bersamaan dengan dimulainya Tahun Ajaran 2015/2016 Kemendikbud melahirkan gerakan Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan ini tertuang dalam Permendikbud No. 23/2015. Melalui serangkaian kegiatan non-kurikuler, yaitu rangkaian kegiatan harian dan periodik wajib maupun pilihan, gerakan ini bertujuan menumbuhkembangkan nilai-nilai dan karakter positif anak-anak Indonesia.

Budi pekerti luhur yang diharapkan dapat tumbuh mencakup antara lain:

- Internalisasi nilai moral dan spiritual dalam kehidupan.
- Rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
- Interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orangtua.
- Interaksi positif antar siswa.
- Pengembangan potensi utuh siswa.
- Pemeliharaan lingkungan sekolah yang mendukung iklim pembelajaran.
- Pelibatan orangtua dan masyarakat.

Alur Kebudayaan

Contoh kasus: hidup bersih

Diajarkan

Diajarkan tentang cara hidup bersih dan bahaya hidup kotor.

Dibiasakan

Dibiasakan membersihkan yang kotor dan membuang sampah pada tempatnya.

Dilatih Konsisten

Diarahkan bila tidak dikerjakan, ditegur jika dilanggar.

Menjadi Kebiasaan

Menjadi kebiasaan (tanpa disadari) membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya.

Menjadi Karakter

Suka kebersihan dan tidak nyaman melihat sampah bukan pada tempatnya.

Menjadi Budaya

Masyarakat yang berbudaya hidup bersih.

Kegiatan Sehari - hari di Sekolah

● Beberapa kegiatan wajib ● Contoh-contoh pembiasaan baik

Sebelum Memulai Pembelajaran:



- Membaca buku non-pelajaran sekitar 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
- Hari pelajaran dimulai dengan berdo'a, dipimpin bergantian oleh siswa di bawah bimbingan guru.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional atau lagu terkini yang menggambarkan semangat cinta tanah air

Sesudah mengakhiri Pembelajaran:



- Menyanyikan satu lagu daerah (dari seluruh nusantara).
- Mengakhiri dengan berdo'a, dipimpin bergantian oleh siswa di bawah bimbingan guru.

Kegiatan Rutin Tiap Minggu:



- Upacara bendera tiap hari senin.
- Olah raga bersama seluruh warga sekolah minimal satu minggu sekali.
- Siswa piket membersihkan kelas dan lingkungan sekolah secara bergantian.

Kegiatan Periodik/Insidental Lainnya:



- Pertemuan wali kelas dan orangtua siswa untuk menjelaskan visi, misi dan aturan sekolah serta tahapan belajar siswa.
- Siswa dibiasakan belajar kelompok baik di sekolah maupun di rumah dengan sepengetahuan guru dan orangtua.
- Siswa terlibat dengan masyarakat untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah nyata di lingkungan sekolah.
- Masyarakat dari berbagai profesi berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa di sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

www.kemdikbud.go.id @kemdikbud_RI

dapat mengubah predikat Indonesia sebagai negara yang minat bacanya termasuk paling rendah di dunia. Budaya membaca, kata dia, dimulai dengan membaca singkat tapi rutin dilakukan terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya.

“Kita ingin anak-anak kita membaca maka bangun kebiasaan membaca. Insya Allah kita nanti memiliki budaya membaca,” kata Mendikbud.

Mendikbud mengungkapkan, potensi dan minat setiap anak berbeda-beda, termasuk dalam hal membaca buku. Maka, Kemendikbud memberikan keleluasaan kepada sekolah

untuk menentukan tema buku yang layak dibaca dan disukai oleh siswa. Sebagai bahan referensi, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menerbitkan dan akan mendistribusikan buku-buku yang dapat dijadikan bahan siswa dalam kegiatan membaca tersebut ke beberapa sekolah di tanah air. Terdapat banyak metode atau model kegiatan membaca bagi siswa sebagai variasi agar tidak membosankan, seperti membaca dengan suara nyaring secara bergantian, membaca di perpustakaan, membaca di luar ruangan—misalnya di pekarangan sekolah—dan

sebagainya. “Biarkan anak-anak kita itu menikmati membaca sebagai sebuah kebiasaan,” katanya.

Mendikbud mengimbau sekolah yang telah memiliki perpustakaan untuk mendukung kegiatan membaca di sekolah tersebut. Anak-anak, kata dia, sebaiknya membaca buku-buku sastra sesuai dengan usia mereka sehingga kemampuan anak-anak untuk berimajinasi tumbuh. Dia mengatakan, siswa-siswa yang sudah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA saat ini belum tentu pernah membaca sebuah karya sastra. “Kita justru ingin membangun semangat literasi itu,” katanya. •



REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Menangkal lenyapnya cagar budaya lewat pendaftaran objek cagar budaya.

KENDALA terbesar dalam registrasi cagar budaya adalah prosesnya yang panjang dan bertele-tele. Karena itu, banyak sekali penemu maupun pemilik cagar budaya enggan meregistrasikannya ke Kemendikbud. Padahal, amat disayangkan bila warisan budaya itu lenyap begitu saja. Mengatasi hal ini Kemendikbud mengambil



Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas setelah dibongkar.

langkah terobosan dengan membuat sistem registrasi cagar budaya secara daring.

Berkat sistem baru ini angka peningkatan registrasi meningkat drastis. Semula, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menargetkan 3.000 objek teregistrasi pada tahun ini. Setelah dibuka proses registrasi secara



Pabrik Gula Kalibagor ketika masih aktif.

daring, jumlah registrasi yang masuk hingga September 2015 ini tercatat sebanyak 10.532 objek cagar budaya.

Kondisi ini berbeda betul dengan sebelumnya. Akibatnya sangat fatal, seperti peristiwa yang menimpa Imam Humaidi Antassalam (33), penggiat sejarah asal Banyumas. Ketika mendapati bangunan *Suikerfabriek Kalibagor* yang didirikan tahun 1839 oleh Sir Edward Cooke Jr akan diluluh-lantahkan, Humaidi giat mencari informasi pendaftaran objek cagar budaya.

Berbulan usahanya mencari informasi tak membuahkan hasil, hingga sebuah kabar hinggap kepadanya. Seorang kawannya tiba-tiba menyokong informasi penting. “Kalau masih ingin mendaftar, lekas berangkat ke Semarang. Lawang Sewu,” kata kawannya. Ia girang bukan kepalang.

Tak menunggu lama ranselnya sudah berjejal baju ganti, bekal, dan terpenting dokumen, foto, film *Jejak Warisan Yang Dilenyapkan*, dan segala hal terkait Pabrik Gula Kalibagor.

Setibanya di Lawang Sewu, lokasi Pameran Cagar Budaya Warisan Dunia gelaran Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, langkahnya kontan membidik gerai Registrasi Nasional Cagar Budaya. “Selesai mendaftar, langsung mendapat status terverifikasi. Sebab data penunjang seperti arsip, dokumen, foto, film, dan sebagainya yang saya serahkan begitu lengkap,” kata Humaidi. Proses pendaftaran berjalan mulus, ia pun bisa pulang dengan lega.

Kelegaannya tak berlangsung lama. Belum genap seminggu pasca-pendaftaran, bangunan bersejarah berusia ratusan tahun itu telah menjadi



Ruangan dalam PG Kalibagor, setelah pembongkaran.

onggokan puing. Kejadiannya tentu takkan seperti ini bila dia bisa meregistrasikannya lebih dini.

Tata alur pendaftaran daring ini dirancang untuk memudahkan masyarakat terlibat aktif mendaftarkan objek cagar budaya. Harapannya kasus Pabrik Gula Kalibagor tak akan terulang. “Peran masyarakat sangat penting bagi penyelamatan objek cagar budaya. Pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah langkah awal penyelamatan objek cagar budaya,” kata Kacung Marijan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

Direktorat PCBM membuka layanan pendaftaran objek cagar budaya melalui sistem daring pada laman www.cagarbudaya.kemendikbud.go.id. “Pendaftaran *online* adalah

“

Berkat sistem baru ini angka peningkatan registrasi meningkat drastis. Semula, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menargetkan 3.000 objek teregistrasi pada tahun ini. Setelah dibuka proses registrasi secara daring, jumlah registrasi yang masuk hingga September 2015 ini tercatat sebanyak 10.532 objek cagar budaya.

cara baru yang kami tempuh untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan objek cagar budaya,” kata Desse Yussubrata, Subdit Regnas. Masyarakat, lanjut Desse, perlu mendapat penyadaran pentingnya melakukan pendaftaran objek cagar

budaya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Terobosan pendaftaran objek cagar budaya melalui sistem daring perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Direktorat PCBM gencar



Becho/ekskavator yang bersiap meratakan PG Kalibagor.

mengampanyekan program itu melalui media sosial yang mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat. “Sosialisasi secara aktif adalah kunci. Usaha itu kami lakukan dengan workshop dan kampanye melalui media sosial,” katanya.

Penyebarluasan informasi itu penting untuk mengikis anggapan miring masyarakat yang keliru tentang pendaftaran cagar budaya, bahwa “bila mendaftarkan objek cagar budaya miliknya akan dikuasai oleh negara. Itu salah besar. Kami hanya menginventarisasi,” katanya.

Pendaftaran secara daring sukses mengangkat capaian pendaftaran cagar budaya. Hingga per-September 2015 tercatat sebanyak 10.532 objek cagar budaya terdaftar, melampaui

target yang ditetapkan sejumlah 3.000 objek.

Selain melalui pendaftaran daring, PCBM Kemendikbud secara aktif mendorong para dinas kabupaten/kota maupun provinsi yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan, mendaftarkan objek cagar budaya melalui pendayagunaan workshop pendaftaran terintegrasi tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, ketika mendapati rendahnya objek cagar budaya yang telah terdaftar mengundang dinas tingkat kabupaten atau kota untuk melakukan pendaftaran bersama. Hasilnya pendaftaran objek cagar budaya meningkat sebanyak 15 persen.

Upaya penyamaan persepsi dan pemahaman tentang proses pendaftaran

objek cagar budaya yang selama ini menjadi masalah serius, dapat dilakukan melalui pembinaan teknis pejabat eselon dan staf di lingkungan kantor dinas kabupaten atau kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

Objek cagar budaya yang sudah terdaftar via daring dan mendapat nomor registrasi kemudian diverifikasi oleh tim ahli tersertifikasi melalui sebuah kajian. Hasil kajian berupa rekomendasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh bupati atau walikota di tingkat kabupaten/kota; gubernur di tingkat provinsi; dan menteri di tingkat nasional dengan mengeluarkan surat keputusan (SK).

Hasil pendaftaran dan penetapan kemudian dicatat sebagai Registrasi Nasional Cagar Budaya. Objek cagar budaya dapat naik peringkatnya bila diajukan kembali dan mendapat verifikasi dari tim ahli. Hingga september 2015 terdapat dua objek cagar budaya yang masuk peringkat nasional; Bendera Sang Saka Merah Putih melalui SK 003/M/2015 dan Satuan Ruang Geografis Sangiran melalui SK 019/M/2015, sementara 26 objek cagar budaya masih dalam proses akhir penetapan.

Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya sangat penting sebagai usaha awal penyelamatan benda cagar budaya. Di samping itu, “tujuan Registrasi Nasional Cagar Budaya untuk melihat pemetaan dan persebaran cagar budaya yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat diketahui jumlah dan aset cagar budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia” pungkas Desse. •

ALUR UMUM PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

- Pemilikan/ Penguasaan
- Penemuan
- Pencarian

Pendaftar

Tim Pengolah Data

KAJIAN
Tim Ahli

REKOMENDASI

- Penetapan
- Penghapusan
- Peringkat

REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

KEMENDIKBUD membuat terobosan program Registrasi Nasional Cagar Budaya secara daring (*online*). Masyarakat pemilik dan penemu dapat terlibat aktif mendaftarkan benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan melalui laman cagarbudaya.kemdikbud.go.id.

TANDA BUKTI

- SK Cagar Budaya
- Surat Kepemilikan

Cagar Budaya

● Register Nasional

● Peringkat

● Tingkat

PENETAPAN
Kepala Daerah

TAHAPAN REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

Pendaftar (masyarakat/dinas terkait yang membidangi kebudayaan) mendaftarkan objek cagar budaya secara daring.

Objek cagar budaya terdaftar mendapat nomor registrasi untuk selanjutnya melalui tahap pengkajian oleh tim ahli bersertifikasi.

Hasil kajian berupa rekomendasi; penetapan, penghapusan, dan peringkat diserahkan kepada kepala daerah (bupati/walikota, gubernur).

Kepala daerah menetapkan objek cagar budaya terpilih melalui surat keputusan (SK) bupati/walikota, gubernur.

Pencatatan objek cagar budaya dilakukan oleh Direktorat PCBM, Kemendikbud.

Peringkat objek cagar budaya dapat dinaikkan ke peringkat yang lebih tinggi melalui proses penyeleksian dan pengkajian tim ahli cagar budaya di tiap tingkatan.

Penetapan objek cagar budaya tingkat nasional dikukuhkan melalui SK menteri.

CAPAIAN REGISTRASI NASIONAL

Rekap Data Pendaftaran Objek Cagar Budaya Nasional Per-7 Oktober 2015

Dari target

3.000 objek

telah tercapai

10.532

objek cagar budaya yang telah terdaftar

PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL 2015

1

Bendera Sang Saka Merah Putih SK 003/M/2015

2

Satuan Ruang Geografis Sangiran SK 019/M/2015

3

26 Cagar Budaya dalam proses penetapan



Siswa di SDN 181/IV, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, belajar dalam Sekolah Aman Asap. Sistem ini menetralisasi dan mengurangi dampak jahat asap dari pembakaran hutan. Kemendikbud sedang merancang agar sistem ini bisa diterapkan di semua sekolah di daerah-daerah yang terkena darurat asap.



SEKOLAH AMAN ASAP

Keselamatan dan kesehatan siswa lebih utama.

SEPULUH tahun lebih siswa-siswa di Sumatera dan Kalimantan terpapar asap pembakaran hutan. Kesehatan dan sekolah mereka terganggu. Tapi, upaya untuk mengatasinya masih minim. Tak ingin mendiamkan masalah ini, Kemendikbud segera mengambil dua cara untuk menyelesaikannya.



Siswa-siswa di Palangkaraya, Kalimantan Barat, yang terpaksa belajar menggunakan masker. Sadar bahwa asap dari pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah membahayakan siswa-siswa, Kemendikbud mengeluarkan SE yang meminta agar kepala daerah memberikan keringanan kepada sekolah-sekolah yang terkena darurat asap.

Pertama, pada 23 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Dalam SE itu Kemendikbud meminta agar para kepala daerah menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan di daerah terdampak bencana asap. “Keselamatan dan kesehatan siswa

lebih utama. Sekolah nomor dua,” kata Mendikbud.

Dalam SE itu Kemendikbud merancang sembilan langkah untuk dijalankan pemerintah daerah, seperti meliburkan sekolah jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di atas ambang batas berbahaya. Nilai

ambang batas ISPU berbahaya adalah 200 untuk tingkat PAUD dan SD, serta 300 untuk seluruh tingkat, mulai dari PAUD sampai SMA/ sederajat.

Bagi sekolah yang liburnya 28 hari lebih akan mendapatkan keringanan, berupa fleksibilitas waktu belajar, penyesuaian kalender akademik,



target pencapaian kurikulum, jadwal ujian sekolah, jadwal dan bobot UN, serta jadwal dan bobot ujian masuk perguruan tinggi. Untuk yang terakhir ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“

Sistem ini akan juga digunakan di sekolah-sekolah di daerah yang kerap terpapar polusi asap selain asap pembakaran hutan, seperti sekolah dekat terminal atau dekat tempat pembuangan sampah.

–**ANANTO KUSUMA SETA**, Staf Ahli Kemendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing

Meskipun libur, guru tetap memberikan tugas kepada siswa agar mereka belajar di rumah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk tetap memberikan tunjangan profesi dan tunjangan lainnya secara penuh kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sekolahnya diliburkan.

Kedua, Kemendikbud menyiapkan Sekolah Aman Asap. Sistem yang ditemukan Prof. Dr. Zeily Nurachman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini sangat mudah dan murah. Mudah karena hanya memasang dakron atau kaos basah di setiap lubang ventilasi, memasang kipas exhauster untuk mengeluarkan udara kotor, dan memasang sistem aerasi pada akuarium yang ditaruh di dalam ruangan. Dakron atau kaos basah untuk menangkap partikel-partikel asap yang terbang di udara; kipas exhauster untuk mengusir udara dari ruangan kelas ke luar; akuarium yang ada aerasinya berguna menangkap partikel-partikel mineral yang masih masuk ke ruangan kelas.

“Tapi jangan lupa, akuariumnya harus diisi tumbuhan ganggang yang biasa kita dapatkan di kolam-kolam.

Ganggang juga berguna untuk menyerap CO2 dan memproduksi oksigen dalam ruangan. Karena itu akuarium perlu dipasang lampu ultraviolet agar fotosintesis terjadi. Kalau bisa, kita taruh tanaman-tanaman berdaun lebar di akuarium, agar fotosintesis semakin banyak,” kata Zeily. Murah karena untuk membuat sistem ini maksimal membutuhkan Rp 1 juta.

Pemerintah telah mengujicobakan Sekolah Aman Asap ini di Padang dan Jambi. Pengujian di kedua daerah itu cukup berhasil. Berkat sistem ini, ISPU di luar kelas sebesar 228 menjadi 78 di ruang kelas, angka aman untuk anak-anak. Kemendikbud sedang menyiapkan agar semua sekolah di daerah yang terpapar asap bisa menerapkan sistem ini.

Ananto Kusuma Seta, Staf Ahli Kemendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing, mengatakan bahwa sistem ini akan juga digunakan di sekolah-sekolah di daerah yang kerap terpapar polusi asap selain asap pembakaran hutan, seperti sekolah dekat terminal atau dekat tempat pembuangan sampah. •



2

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES

*Kerugian adalah jika hari ini tak lebih baik
ketimbang kemarin.*

KEMENDIKBUD telah melahirkan gerakan-gerakan untuk meningkatkan kualitas mutu dan akses pendidikan dan kebudayaan. Alhamdulillah, gerakan-gerakan ini berjalan dengan baik. Berikut ini sejumlah gerakan tersebut:

- 1) Kemendikbud menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas. Karena itu Kemendikbud mengajak lembaga pemerintah lainnya dan publik untuk lebih memerhatikan lintasan berbahaya yang kerap dilalui siswa-siswa di seantero negeri.
- 2) Belajar Bersama Maestro (BBM), gerakan yang memberikan kesempatan kepada siswa se-Indonesia terpilih untuk mengunduh inspirasi secara langsung dari para maestro kebudayaan.
- 3) Kami juga menggelar Gerakan Terima Kasih Guru, sebuah ikhtiar untuk memuliakan guru-guru yang telah mengantarkan kita ke jenjang lebih baik.
- 4) Demi meningkatkan tingkat literasi anak-anak Indonesia, Kemendikbud melahirkan Gerakan Indonesia Membaca-Menulis (GIMM).
- 5) Untuk menyiapkan generasi berkualitas, Kemendikbud merancang sejumlah program/gerakan menuju wajib belajar 12 tahun.
- 6) Untuk lebih mengeratkan tenun kebangsaan, Kemendikbud periode ini meningkatkan mutu dan akses program Afirmasi pendidikan menengah (ADEM).
- 7) Kami juga senantiasa mendorong agar para siswa dapat meraih penghargaan internasional.
- 8) Sadar bahwa investasi pada usia emas anak sangat memengaruhi masa depannya, kami bertekad menyelenggarakan Gerakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas.
- 9) Penerbitan *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* adalah upaya kami untuk menyatukan mozaik-mozaik pengetahuan dalam bidang sejarah dan kebudayaan Indonesia.
- 10) Senantiasa mengupayakan agar warisan budaya kita masuk nominasi UNESCO. •



Siswa melewati lintasan berbahaya kerap menghiiasi berita. Kali ini Kemendikbud memastikan bahwa keselamatan mereka adalah prioritas. Ini adalah siswa-siswa yang melintas di jembatan gantung irigasi yang menghubungkan Desa Plemungan, Karanganyar, dan Desa Sura, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (28/2). Jembatan yang dibangun pada zaman Belanda yang berfungsi sebagai saluran irigasi tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai jalur alternatif yang dapat mempersingkat jarak.



LINTASAN BERISIKO BAGI SISWA

Kemendikbud menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas.

PEMANDANGAN para siswa menerjang lintasan berbahaya acap menghiiasi berita. Para siswa bertaruh nyawa demi menggapai layanan pendidikan. Meskipun infrastruktur ini bukan kewenangannya, Kemendikbud kali ini tak tinggal diam. Kemendikbud memastikan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas.

Karena itu ketika jembatan penghubung antara Desa Tambak dan Desa



Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenpupera berkomitmen mengedepankan pembangunan infrastruktur yang selama ini dianggap sebagai lintasan berbahaya bagi siswa. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Dalam foto ini terlihat seorang guru menggendong muridnya yang takut melalui jembatan yang sudah rapuh.

“

Meskipun infrastruktur bukan kewenangannya, Kemendikbud kali ini tak tinggal diam melihat siswa yang kerap melewati lintasan berbahaya. Kemendikbud memastikan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas.

Pejagan runtuh dan menghempaskan 44 siswa SDN 1 Pejagan pada 10 Maret 2015, Kemendikbud segera bertindak. Kemendikbud mengajak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mengatasi hal ini. Selain melakukan inspeksi ke lapangan langsung, Kemendikbud

bersama Kemenpupera membuat laman <http://sahabat.kemdikbud.go.id>. Laman ini dibuat sebagai peluang bagi masyarakat untuk melaporkan infrastruktur kurang memadai yang kerap dilalui siswa.

Dia berharap agar seluruh masyarakat mempunyai andil dalam

pelaporan adanya lintasan yang berbahaya bagi anak-anak sekolah. "Semua tentu harus ada peran dari masyarakat. Kita minta bantuan semua pihak, sekolah ya masyarakat. Kalau kita melintasi lintasan yang berisiko dan berbahaya tolong laporkan. Ayo masyarakat untuk melaporkan. Karena kalau mengandalkan sekolah saja mungkin terbatas," lanjutnya.

Kemendikbud ingin memastikan bahwa keselamatan anak-anak kita, baik di sekolah maupun di perjalanan menuju ke sekolah dan pulang ke rumah, sangatlah penting. Pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan ini. Jika ada laporan masuk maka sesegera mungkin diverifikasi dan ditangani. Kemdikbud berharap masyarakat yang menemukan kejadian langsung melapor.

"Ada tim khusus, kalau ada laporan langsung diverifikasi. Dari kita ada kejadian langsung kirim. Karena data ini (laporan ke website) penting. Kita melihat bahwa keselamatan siswa menuju sekolah harus diperhatikan," kata Mendikbud.

Inisiatif Kemendikbud ini ditanggapi positif oleh pemerintah daerah dan lembaga lain. Pemda Lebak, Banten, bekerja sama dengan Asa SCTV dan Kementerian Sosial meresmikan jembatan penghubung antara Desa Tambak dan Desa Pejagan pada 08 Agustus 2015.

Kemendikbud akan terus memantau perkembangan tentang lintasan berbahaya ini dan memastikan bahwa keselamatan siswa tetap menjadi prioritas. •



I Nyoman Nuarta mendemonstrasikan proses kreatif keseniannya kepada siswa peserta Belajar Bersama Maestro (BBM).



BELAJAR BERSAMA MAESTRO

Sengatan inspirasi maestro bakal menjadi bekal generasi muda sepanjang hidup.

SUARA petikan gitar mengalun, bersambut kemudian denting piano yang mengantar nada-nada ritmis. Tiga penyanyi laki-laki lantas berdendang lagu *Bolelebo*, disusul kemudian seorang dara manis melantunkan tembang *Kicir-kicir*, *Bubuy Bulan*, lantas keempatnya menyambung *Suwe Ora Jamu*, *Lir Ilir*, *Cublak-Cublak Suweng*, *Si Patokaan*, dan *Paris Barantai*.

Sekilas kelompok musik yang baru saja tampil di Ruang Teater Purwacaraka Music Studio tampak punya jam terbang tinggi. Mahir. Namun siapa sangka, mereka adalah siswa SMA/SMK terpilih yang meluangkan waktu libur untuk “mondok” di kediaman musisi senior, Purwacaraka, di kawasan Serpong, Tangerang. Garapan musik bertajuk “Medley Nusantara” itu merupakan hasil latihan selama seminggu dalam program Belajar Bersama Maestro (BBM), sebuah program rintisan pembelajaran siswa yang menonjolkan sinergi antara pendidikan dan kebudayaan.

Program yang kali pertama diadakan oleh Kemendikbud ini diawali dengan tahap seleksi, 18-21 Juni 2015, terhadap 279 siswa SMA dan SMK di segala penjuru Nusantara. Terjaring

sebanyak 80 siswa berbakat dari berbagai kota yang mendapat kesempatan belajar (mondok) langsung bersama maestro di bidang seni musik, tari, lukis, teater, patung, dan film, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Berawal dari gagasan sederhana, Program BBM, berusaha memberikan pengalaman otentik kepada siswa-siswi Indonesia untuk berinteraksi langsung dengan idola mereka, sang pemberi inspirasi. Kegiatan belajar-mengajar, utamanya untuk mengembangkan bakat dan minat para siswa, tak hanya diperoleh di bangku sekolah, kelas, tapi juga lewat interaksi langsung dengan para maestro. “Banyak pengalaman anak yang tumbuh menjadi besar karena interaksi sejenak tapi penuh makna. Ibaratnya ‘sengatan’ para maestro ini akan menjadi inspirasi anak-anak ini dalam perjalanan kehidupan mereka,” ujar Mendikbud.

Para siswa yang memilih seni musik dapat berinteraksi, berkeseharian, dan berguru langsung dengan musisi senior Purwacaraka, pemain drum Gilang Ramadhan, ahli karawitan sunda Tan De Seng, dan penggiat angklung



Aditya Gumay bersama para cantriknya.



Gilang Ramadhan menggebuk drum di hadapan siswa peserta BBM.

Sam Udjo putra maestro angklung mendiang Mang Udjo. Mereka dapat memahami dan meresapi setiap transfer ilmu yang diberikan sang maestro dengan caranya sendiri.

Bagi siswa yang meminati seni tari mendapat pengalaman mondok di kediaman penari Irawati Durban dan Didi Ninik Thowok. Sedangkan para siswa yang gemar terhadap seni rupa, akan mendapat bimbingan langsung dari pematung kenamaan asal Bali, I Nyoman Nuarta, dan pelukis Nasirun. Selain itu, para siswa juga bisa belajar seni suara tradisi semisal *nembang* dengan pesinden Supadmingtyas, serta belajar teater dan film bersama Aditya Gumay.

Program BBM dilaksanakan di enam kota, yakni Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, dari tanggal 25 Juni

hingga 3 Juli 2015. Sepuluh seni-man yang mahir di bidangnya tak segan-segan membagi ilmu kepada para “cantrik” mereka. Setelah lebih kurang sembilan hari berolah rasa bersama, mereka akan memperlihatkan pencapaian mereka melalui pementasan pagelaran karya bersama.



Diawali dengan tahap seleksi, 18-21 Juni 2015, terhadap 279 siswa SMA dan SMK di segala penjuru Nusantara. Terjaring sebanyak 80 siswa berbakat dari berbagai kota yang mendapat kesempatan belajar (mondok) langsung bersama maestro di bidang seni musik, tari, lukis, teater, patung, dan film, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.



Purwacaraka bermusik bersama salah seorang siswa peserta BBM yang memainkan biola.

Para siswa yang mondok di wilayah Bandung bersama Tan De Seng, Sam Udjo, dan Irawati tampil bersama di panggung Saung Angklung Mang Udjo. Siswa asuhan Tan De Seng mendapat kesempatan tampil pertama dengan membawakan empat lagu Sunda klasik dan satu lagu Barat *The Autumn Leaves* melalui perkawinan alat musik karawitan dan kontemporer. Kemudian siswa yang dibimbing oleh Irawati menyajikan tarian Puspa Ligar dan Hayu Batur. Sementara para anak didik singkat Sam Udjo menyetujui dua lagu Sunda dan lagu nasional melalui harmonisasi bunyi angklung. Keseluruhan pertunjukan ini berhasil memukau para penonton yang menyambut dengan tepuk tangan meriah.

Keseruan penampilan tak hanya berakhir di Bandung. Para cantrik

yang tersebar di Yogyakarta menampilkan kolaborasi unik antara tarian Tari Tala Rasa oleh anak bimbingan Didi Ninik Thowok serta gubahan lagu dan puisi yang dibingkai oleh lukisan potret diri hasil pulasan bersama para cantrik Nasirun. Kolaborasi itu terselenggara di Rumah Seni Sidoarum. Didik mengaku anak bimbingnya tampil optimal, padahal dia hanya memberi sentuhan sedikit pada koreografinya.

Demikian pula dengan anak-anak asuh Gilang yang berhasil menyelaraskan musik ansambel dengan gabungan alat musik kontemporer dan tradisional, di Jakarta. Perkaraban lain datang dari Bogor. Di sana para cantrik Aditya Gumay berhasil menyusun skenario sebagai bekal peningkatan kemampuan akting di atas pentas.

Upaya para maestro untuk menularkan ilmu dan pengalamannya kepada peserta BBM memang tidak sia-sia. Dalam tempo sembilan hari, anak-anak asuh dadakan itu mampu menampilkan karya-karya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Program ini ternyata mampu memberi kesan tersendiri bagi para maestro. Salah satunya Purwacaraka yang merasa puas dengan capaian kesepuluh anak didiknya. Kepada mereka ia berpesan agar senantiasa berpikir besar dan tidak biasa demi menjadi insan yang luar biasa. Bagi Purwacaraka, program BBM ini adalah sebetulnya rasa pertanggungjawaban dia sebagai pelaku seni dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat dan generasi muda.

“Saya berharap program Belajar Bersama Maestro ini tetap berlangsung dan semakin banyak membawa perubahan terhadap para insan muda Indonesia,” ujarnya.

Harapan itu sejalan dengan harapan Mendikbud. Ia menilai, sinergi pendidikan dan kebudayaan bisa menjadi sebuah gerakan semesta sehingga kegiatan BBM bisa berlanjut dengan inisiatif dari berbagai pihak. Para maestro di daerah lain pun bisa menduplikasi program ini untuk melahirkan maestro-maestro baru dan demi keberlanjutan cabang-cabang seni yang mereka tekuni. Demikian pula, pemerintah daerah bisa mengadopsi program ini untuk memunculkan maestro dari daerah sekaligus melestarikan seni-budaya lokal. •



Menko PMK Puan Maharani dan Mendikbud Anies Baswedan berfoto bersama para siswa pemenang sebuah lomba tingkat nasional di Istana Bogor.



Seorang guru berinteraksi dengan seorang muridnya. Keduanya terlihat nyaman melakukan kegiatan belajar-mengajar. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Berkat guru-guru kita, kini kita meraih sedikit demi sedikit kesuksesan. Namun, setelah sejauh ini melangkah, sudahkah kita mencium lagi tangan guru-guru kita atau sekadar bersilaturahmi kepada mereka?

GERAKAN TERIMA KASIH GURU

Bisakah kita sampai pada posisi kita saat ini tanpa bantuan guru? Kemendikbud periode ini mengajak kita untuk menjalin lagi silaturahmi dengan guru-guru yang telah mengantarkan kita ke keadaan kita sekarang.

MENJADI guru itu mengambil jalan kehormatan. Untuk meningkatkan penghormatan kepada mereka, Kemendikbud melahirkan Gerakan Terima Kasih Guru. Terobosan ini mengajak semua orang yang sudah mendapatkan banyak manfaat berkat didikan guru untuk menengok kembali sekolah dan menyapa guru-guru mereka. Bahkan, Kemendikbud membuat laman tersendiri untuk menampung mereka yang ingin

nimbrung ke dalam gerakan ini, yaitu www.terimakasihguru.org.

Ajakan ini mendapat tanggapan positif. Ligwina Hananto, misalnya. Pada 20 November 2014, penulis dan perencana keuangan terkemuka itu berangkat pagi hari dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan menuju SMA Negeri 2 Bandung. Tanpa dia sadari, dia sudah tak bertemu guru-gurunya selama dua puluh tahun. Wina, panggilan akrabnya, yang lulus pada 1994 berujar, “Ada *lho* orang-orang di sekolah dulu yang sangat penting, tapi *kok* saya tidak kunjungi lagi, ya? Ada beberapa guru yang pengaruhnya cukup besar untuk pribadi saya, tapi ada satu guru namanya Pak Toto Utomo, guru matematika... dia berjasa *banget lho*, bisa bikin saya betah ketemu sama rumus-rumus.”

Pak Utomo sedang mengajar di kelas ketika Wina datang dan menyapa. Pak Utomo langsung mengenali muridnya itu. Dalam kesempatan itu Wina berterima kasih kepada Pak Utomo karena telah banyak membantu dia. “Doakan juga biar bisa lebih bermanfaat buat orang banyak,” kata Wina. Pak Utomo, sambil menyalami Wina, berbinar bangga melihat muridnya itu.

Lain halnya dengan Chozin Amirullah. Alumnus SMP Negeri 1 Sragi, Pekalongan, yang kini menjadi pejabat teras di Kemendikbud itu mendatang kembali sekolahnya setelah dua puluh lima tahun tak bertemu. Bersama teman sekelasnya, Basuki, yang juga telah berhasil menapaki kariernya di ibu kota, Chozin mendatangi kembali sekolahnya untuk berterima kasih kepada guru-guru mereka. “Saya itu

termasuk yang nakal. Kalau ke sini lagi, ingin mengulang lagi masa-masa itu dan menjadi baik,” katanya.

Bocah nakal yang sering menaruh kelereng di bawah meja, alih-alih buku, itu memang patut berbangga. Berkat pendidikan yang ia reguk di SMP Negeri 1 Sragi, dia lalu bisa bersekolah di Ohio University di Amerika dan aktif di beberapa organisasi pemuda tingkat nasional dan internasional. “Kita itu hidup dari yang bawah sampai yang atas, merasakan semua. Nah, itu saya kira anugerah yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Itu, rasanya tidak mungkin terjadi jika kita tidak diajar guru kita. Tapi, kita *kok* sepertinya lupa kepada guru-guru kita.” Padahal mereka, bagi Chozin, adalah orang yang paling berjasa. “Saya tidak bisa membayarnya. Utang saya kepada mereka tidak akan bisa terbayar.”

Tanpa sungkan, Chozin dan Basuki mencium tangan dan menyampaikan terima kasih kepada guru-guru yang dulu pernah mengajar mereka. Begitu bertemu Pak Gardo, salah satu guru favoritnya, Chozin mengulurkan tangannya hendak mencium tangan sang guru. Namun, sebelum sempat melakukannya, Chozin lebih dulu diserbu pelukan hangat gurunya itu. Dua puluh lima tahun berpisah dan kini mereka dipertemukan kembali. “Kalau bukan karena gerakan ini, tampaknya saya juga tidak akan kembali ke sini,” katanya.

Sejatinya, gerakan ini adalah langkah awal. Wina, Chozin, dan Basuki pada awalnya mungkin hanya menengok kembali sekolah mereka, tapi sebenarnya mereka sedang



membuka kembali tali silaturahmi yang telah lama terputus. Dengan tersambung silaturahmi, mereka akan tahu secara konkret apa yang bisa mereka lakukan dan berikan kepada sekolah mereka dahulu.

Selain mereka, ajakan Kemendikbud ini direspons banyak lembaga, baik pemerintah maupun swasta. PT. Garuda Indonesia, misalnya. Melalui direktur utamanya, M. Arif Wibowo, PT. Garuda Indonesia berkomitmen mendukung gagasan ini. Pada Jumat, 31 Juli 2015, itu Dirut Garuda dan Mendikbud Anies menandatangani nota kesepahaman itu di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

“Jalin kerja sama ini sebagai wujud kerendahan hati yang dijalankan



Keteladanan itu menular. Guru membimbing siswa Paud Al Husna Banyudono, menanam padi di persawahan Pengging, Banyudono, Boyolali, Jateng.

menjadi sebuah kenyataan. Kami ini (Kemendikbud dan PT Garuda Indonesia) menjadi salah satu contoh bagaimana kita bisa membangun pendidikan sebagai gerakan, khususnya dalam memuliakan guru,” kata Mendikbud.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata, menyatakan bahwa pemerintah sangat mendorong masyarakat untuk memberikan

penghargaan, terutama penghargaan non-finansial kepada guru dan pendidikan.

Kerja sama ini diberikan dalam bentuk pemberian diskon khusus sebesar 5 persen untuk rute domestik dan 10 persen untuk rute internasional. Selain itu, ada pemberian fasilitas bagasi tambahan sebesar 10 kilogram untuk kelas J, C, D, Y, B, M, K, dan N. Diskon ini dikhususkan bagi perjalanan dinas beserta

perjalanan pribadi dan keluarga inti yang terdiri dari pasangan dan tiga anak. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga memberikan layanan *check-in* khusus, donasi poin penerbangan, dan fasilitas lainnya.

Juga ada donasi 1 miliar *mileage*, setara dengan 100 miliar rupiah, untuk menerbangkan guru secara gratis ke tempat-tempat yang dibutuhkan para guru. Satu miliar poin *mileage* ini dikumpulkan dari para pelanggan Garuda. Poin-poin yang didapatkan bisa diserahkan kepada Garuda untuk didonasikan kepada para guru berprestasi melalui pendaftaran ke laman GarudaMiles dengan besaran *mileage* mulai 1.000 *miles* dan kelipatannya. Melalui program ini Garuda bisa menerbangkan guru-guru berprestasi di Indonesia secara gratis untuk mengembangkan diri, pendidikan atau melakukan penugasan.

Menurut Direktur Niaga Garuda Indonesia, Handayani, masih banyak yang belum sempat membalas jasa para guru. Karena itu, dia menyatakan, “Garuda Indonesia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk membalas budi guru.”

Kemendikbud mencanangkan pendidikan sebagai gerakan dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Sambutan dari Wina, Chozin, Basuki, dan Garuda ini adalah bagian dari mengajak semua elemen untuk bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai gerakan bersama. “Ini adalah contoh inisiatif keterlibatan publik dalam gerakan memuliakan guru. Kita berharap keterlibatan masyarakat akan semakin meluas ke berbagai elemen,” kata Mendikbud. •

“

Terobosan Kemendikbud ini mengajak semua orang yang sudah mendapatkan banyak manfaat berkat didikan guru untuk menengok kembali sekolah dan menyapa guru-guru mereka.



“

Pendidikan kita tidak
memakai syarat paksaan

— KI HADJAR DEWANTARA





Dua ibu menemani anak-anak mereka belajar di kolong jembatan di salah satu jalan di Jakarta. Menurut UNESCO pada 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru 0,001. Ini berarti dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Untuk meningkatkan minat baca, Kemendikbud melalui Permendikbud No. 23/2015 mensyaratkan bahwa lima belas menit sebelum pelajaran dimulai siswa harus membaca buku di luar buku pelajaran. Selain itu, juga menyelenggarakan Gerakan Indonesia Membaca-Menulis.

GERAKAN INDONESIA MEMBACA-MENULIS

*Membaca dan menulis tak sekadar aktivitas kelas,
tetapi penggerak roda peradaban.*

TENTU saja bangsa ini tak boleh memproduksi “generasi nol buku, yang rabun membaca dan lumpuh menulis” seperti keluh-kesah penyair Taufiq Ismail atas minat baca pelajar Indonesia yang sangat rendah.

Generasi penerus bangsa musti punya bekal dan wahana imajinatif dari



Belajar memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan.

pengalaman membaca buku. Tunas bangsa tidak hanya diasup hafalan-hafalan kaku yang hitam-putih dan menjemukan, tapi juga perlu senantiasa dirangsang daya ungkapnya. Kemendikbud merespon keadaan itu dengan mencanangkan Gerakan Masyarakat Membaca. Kegiatan ini menyebar ke seluruh provinsi. Mendikbud mencanangkan Gerakan Indonesia Membaca di Parigi Moutong (Parimo), lokasi Sail Tomini 2015. Gerakan itu dimulai dari Kabupaten Parimo yang selanjutnya akan meluas ke berbagai daerah. Kegiatan itu mencatatkan nama Kabupaten Parimo dalam rekor MURI sebagai jumlah pembaca dari kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) dengan jumlah peserta 2.500 orang.

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan itu sangat diharapkan sebagai upaya mempercepat penuntasan

niraksara,” kata Mendikbud dalam pidatonya dalam acara itu. Mendikbud berharap agar kegiatan Gerakan Parigi Moutong Membaca untuk Indonesia Membaca menjadi momentum dalam menuntaskan buta aksara di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Parimo.

Kemendikbud tak hanya memberi inisiasi agar generasi dan masyarakat luas, tetapi memberi bahan bacaan yang beragam melalui perpustakaan keliling dan kantung-kantung pustaka baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Membaca, mempopulerkan budaya membaca kepada masyarakat, tak akan berjalan mulus bila angka buta huruf yang masih tinggi di beberapa daerah tak segera ditangani.

Kampanye membebaskan Indonesia dari buta huruf kemudian bergulir

ke beberapa daerah. “Pemerintah akan menugaskan tenaga ahli pendidikan ke daerah-daerah pelosok, melalui dinas pendidikan setempat. Dimulai dari tingkat buta huruf yang tinggi di Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat,” kata Erman Syamsudin, Direktur Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemendikbud.

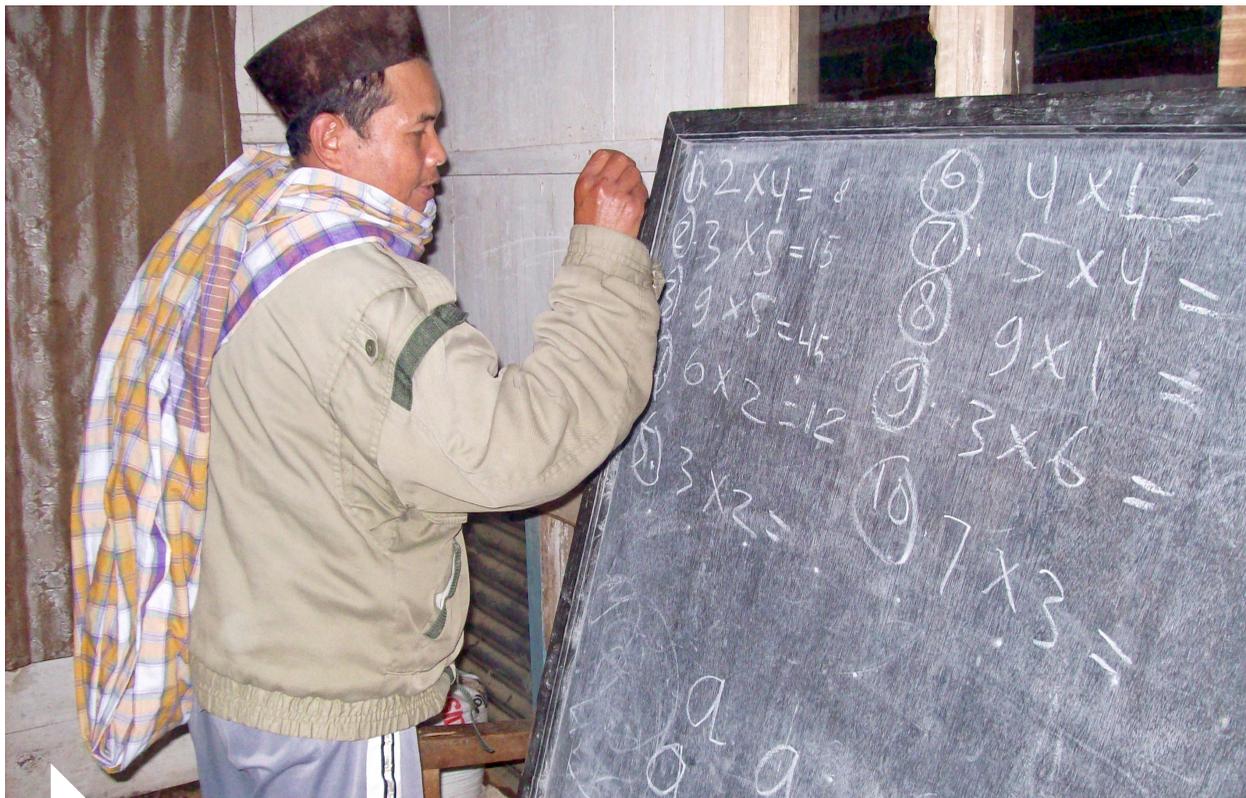
Kepada para orang tua, Erman mengimbau agar berperan aktif membantu membebaskan Indonesia dari buta huruf dengan pengenalan aksara sedari dini. Pembebasan buta huruf dengan gerakan masyarakat membaca lantas berjalan beriringan di beberapa daerah.

Sebagai bagian dari misi memopulerkan budaya membaca, Kemendikbud, melalui Permendikbud No 23 tahun 2015 mengenai Program Penumbuhan Budi Pekerti, menginisiasi kegiatan wajib membaca bagi para siswa minimal 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Menurut Firman Venayaksa, Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat, siswa di Indonesia tidak pernah dituntut untuk membaca sehingga gamang dalam menganalisis sesuatu yang sifatnya problematis. “Siswa kita lebih terpaku pada proses pembelajaran hafalan, bukan menghayati bacaan.”

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal tak kalah penting untuk diperhatikan terkait budaya literasi masyarakat. “Kemendikbud tidak boleh hanya mengarahkan titik tekan budaya literasi hanya pada pendidikan formal,” kata Firman.

Menurut Firman, secara historis pemeliharaan keberaksaraan banyak



Belajar tak pernah mengenal batas usia.

dibentuk lewat pendidikan nonformal. Melalui Taman Bacaan Kampung (serupa Taman Bacaan Masyarakat) yang banyak dipelopori masyarakat peranakan Tionghoa yang mulai menggeliat pada abad ke 19. Pada kenyataannya kini telah tumbuh sekira 8.000 Taman Bacaan Masyarakat yang dikelola masyarakat. TBM hadir mulai dari pelosok pedesaan, ruang-ruang publik semisal terminal, pasar, alun-alun, bahkan posyandu.

Di sisi lain, kegiatan yang menyokong budaya membaca tak akan lengkap bila tak dipersunting dengan

gerakan menulis. Membaca dan menulis adalah padu padan roda peradaban. Lewat membaca manusia menjelajah dunia tanpa batas dan berjumpa buah pikir, namun dengan menuliskan pengalaman itu maka penjelajahan dan perjumpaan akan tetap lestari.

“Sejarah peradaban manusia ada dua fase historis, yaitu fase prasejarah dan fase sejarah. Pembeda antara fase prasejarah dan fase sejarah adalah tulisan,” kata Prof. Dr. Mahsun M.S., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tak hanya terbukti melahirkan peradaban, kegiatan membaca dan menulis pun berkait erat dengan pengembangan sumber daya manusia. Kegemaran membaca dan produktivitas menulis di Indonesia nyatanya masih sangat rendah. Hasil studi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2012 menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam bidang membaca dan menulis (literasi) berada di posisi ke-64 dari 65 negara. Masih sangat rendah dan



“

Sejarah peradaban manusia ada dua fase historis, yaitu fase prasejarah dan fase sejarah. Perbedaan antara fase prasejarah dan fase sejarah adalah tulisan.

— PROF. DR. MAHSUN M.S.

Mencatat petuah dan ajaran guru untuk dijadikan bekal pengalaman hidup.

jauh tertinggal dari banyak negara berkembang lainnya.

Dalam upaya pengembangan tradisi literasi, Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, menyelenggarakan kegiatan Gerakan Indonesia Membaca-Menulis (GIMM) pada 2015. Kegiatan ini bermaksud melatih siswa, dan mahasiswa, dan guru agar mampu menulis teks sesuai dengan standar dan kriteria, serta mampu memanfaatkan teks tersebut untuk kebutuhan berbagai ranah komunikasi, baik sosial, vokasional, maupun akademik. Kegiatan GIMM akan bermuara pada perwujudan generasi literasi yang suka membaca dan pintar menulis.

Tiap provinsi menggelar GIMM dengan beragam tema. Balai Bahasa Sumatera Selatan, misalnya, menggelar kegiatan GIMM bersamaan dengan peringatan bulan bahasa. Penyelenggaraan dibagi menjadi

empat kegiatan, antara lain sayembara penulisan cerita pendek untuk remaja, sayembara penulisan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat umum, dan gerakan membaca sastra untuk siswa.

Para siswa, mahasiswa, dan guru yang berhasil menang di tingkat provinsi, kemudian diundang mengikuti kegiatan GIMM tingkat Nasional yang diselenggarakan di Hotel Cempaka, Jakarta, pada 24–29 Agustus 2015.

Nurdahlia, salah seorang peserta kategori mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara berharap GIMM sebagai gerakan partisipatif, terutama dalam memerangi plagiarisme dan kebiasaan menulis yang mengandalkan *copy paste*. Setelah kegiatan ini, mahasiswa Sastra Indonesia itu bisa mengajak orang-orang terdekatnya meluangkan waktu untuk membaca. “Semoga semangat mahasiswa untuk menulis semakin baik,” katanya.

Kegiatan GIMM rupanya menulurkan semangat gerakan sadar membaca dan aktif menulis. Harapan agar kegiatan ini tak berhenti pada tahun pertama penyelenggaraan didengarkan oleh peserta. Sabir ST, salah satu peserta asal Sulawesi Selatan yang begitu serius mengikuti tahap demi tahap acara merasa bahwa kegiatan GIMM begitu bermanfaat dan mubazir bila tak diteruskan.

“Harapan saya ikut GIMM bisa menambah ilmu menulis dan berharap GIMM ini benar-benar sebuah gerakan melahirkan penggerak-penggerak yang akan menyebar ke setiap provinsi, bukan sekadar program yang berakhir di hari penutupan,” kata Sabir.

Harapan Sabir itu senapas dengan cita-cita penyelenggara. Menurut Prof Dr. Mahsun, M.S, untuk lebih menggerakkan lagi kegiatan membaca dan menulis, setelah program GIMM ini akan diadakan Olimpiade Literasi yang format dan bentuk konkret acaranya sedang dirancang. •

“

Barang siapa cakap membaca dan menulis wajib mengajarkan membaca dan menulis kepada siapa pun juga, baik anak-anak maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan.

— KI HADJAR DEWANTARA







Generasi pelajar saat ini adalah generasi yang akan memimpin Indonesia di usia negara yang ke-100 tahun.



PADA September 2012 The McKinsey Global Institute (MGI), satu lembaga penelitian ekonomi dan bisnis, mengeluarkan laporan khusus yang bisa melambungkan kebanggaan kita sebagai bangsa. Dalam laporan berjudul *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*, MGI meramalkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ketujuh besar dunia pada 2030. Ini bisa terjadi berkat bonus demografi; kondisi demografi ketika jumlah penduduk produktif melebihi jumlah penduduk yang



MENUJU WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Program ini memberikan kesempatan luas kepada anak bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu dan difasilitasi pemerintah.



Suasana kelas dan sekolah yang menyenangkan.

tidak dalam usia produktif. Kondisi seperti ini tidak mudah terjadi atau bahkan bisa dikatakan kesempatan ini hanya datang sekali.

“Indonesia,” ringkas MGI, “memiliki mayoritas penduduk berusia muda dan sedang dalam proses urbanisasi, dan dengan demikian mendorong pertumbuhan penghasilan.” Lembaga penelitian yang bermarkas pusat di Amerika ini memperkirakan bahwa sampai 2030 Indonesia akan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 90 juta konsumen tambahan dengan

daya beli yang cukup besar. “Pertumbuhan kelas konsumen di Indonesia lebih kuat jika dibandingkan dengan negara mana pun selain Cina dan India. Sebuah sinyal bagi perusahaan internasional dan investor tentang peluang baru yang cukup besar,” demikian MGI.

Namun, sebagus apa pun kesempatan yang terbentang dengan adanya bonus demografi tentu akan terbuang percuma bila ternyata penduduk usia produktif yang berjumlah besar itu tak mampu berbuat banyak.

Tak terampil, tak berpendidikan, tak berwawasan luas, dan tak memiliki mental pejuang. Pendeknya, tak berkualitas. Jika demikian kondisinya, bukannya bonus demografi, melainkan bom demografi yang akan kita raih.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas manusia, Kemendikbud menjalankan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini memberikan kesempatan luas kepada anak bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah



yang bermutu, difasilitasi pemerintah, pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk menyambung program Wajib Belajar 9 Tahun yang diamanatkan konstitusi kita; untuk mendorong anak-anak yang bersekolah agar tetap meneruskan hingga lulus pendidikan menengah.

Kebijakan bidang pendidikan dilanjutkan dengan memperluas layanan wajib lewat penerapan wajib belajar pendidikan 12 tahun. Kebijakan ini memberi kesempatan memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah yang bermutu

bagi setiap warga negara Indonesia berusia sampai dengan 21 tahun. Semua komponen pendidikan menjadi perhatian.

Laporan *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013* yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKK-BN), Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) masih tinggi: sekitar 91 persen. Namun, pada tingkat SMP menurun menjadi 66 persen dan SMU lebih turun lagi menjadi 47 persen.

Sementara, Kemendikbud melaporkan bahwa pada 2012-2013 APM tingkat SD sekitar 95 persen, tingkat

SMP menjadi 78 persen, dan SMA menjadi 58 persen. Adapun APK mereka yang mengenyam pendidikan tinggi berkisar 28 persen. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak bangsa ini yang tak mendapatkan pendidikan. Selain faktor biaya, juga karena sekolah yang ada tak mungkin bisa menampung semua.

Demi mengatasi hal ini Kemendikbud merancang sejumlah kebijakan. Misalnya, untuk tingkat siswa, Kemendikbud meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP). Program yang diluncurkan Mendikbud pada 3 November 2014 itu kini



Membaca itu memperkaya sudut pandang.

sudah dilaksanakan dan akan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Dengan PIP ini, orang tua dan siswa yang masuk dalam kategori tak mampu tak perlu lagi khawatir dengan biaya sekolah dan pengeluaran lainnya terkait sekolah, seperti seragam, biaya beli buku, dan transportasi. Selain itu, juga ada BOS SM (Bantuan Operasional Sekolah Siswa Miskin), Pengembangan Bakat dan Minat (PBM), dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Untuk tingkat satuan pendidikan, Kemendikbud akan melakukan langkah seperti pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, ruang belajar lainnya, rehabilitasi ruang kelas, asrama guru dan siswa, peralatan pendidikan, sekolah terbuka, manajemen dan kultur sekolah. Kemendikbud merencanakan jumlah satuan pendidikan SMA

di Indonesia sebanyak 14.311 sekolah dengan rasio 386 siswa per sekolah. Saat ini rasionya adalah 361 siswa per sekolah dengan jumlah 12.329 SMA.

Mulkirom, Penanggung Jawab PIP SMA Kemendikbud, menyatakan akan terus meningkatkan jumlah dan kualitas guru SMA. Data 2014 menunjukkan jumlah guru SMA sebanyak 346.751 orang dengan rasio 14,5 siswa per guru. Target 2019 adalah sebanyak 358.459 guru dengan rasio 15,4 siswa per guru.

Dalam sistem pembelajaran, meliputi kurikulum dan pendidikan karakter, bahan pembelajaran, kewirausahaan penyelarasan, sistem evaluasi dan penilaian, mengait-eratkan Sekolah Menengah Kejuruan, Technopark, dan Teaching Factory. Sementara, isu ketenagaan terkait adalah penyediaan, distribusi, kualifikasi, sertifikasi, pelatihan, karier

dan kesejahteraan, penghargaan, serta perlindungan.

Pada 2014 Kemendikbud menasar 54,2 siswa bisa tertampung PMU ini. Dan, sampai 2019 sebanyak 59,4 juta siswa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan mendapatkan prioritas utama. “Dengan lebih banyak SMK, pemerintah berharap harapan orang tua terhadap relevansi pendidikan bisa berubah,” katanya.

Kemendikbud menargetkan persentase SMK dan SMA sebanyak 60:40. Menurut Hamid, angka ini diharapkan bisa tercapai pada 2019. Target ini, lanjut dia, akan berjalan dengan program pengadaan sarana dan prasarana Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. •



Siswa ADEM sedang belajar merakit komputer di salah satu sekolah di Jawa Tengah.

AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH

*Merajut tenun kebangsaan
melalui gerakan pendidikan.*

MESKI bukan program rintisan, Afir-
masi Pendidikan Menengah (ADEM)
merupakan salah satu program
unggulan Kemendikbud 2014-2019.

Pada 2014 program ini memasuki tahun ketiga. Program ini pada dasarnya dibentuk untuk memberi-
kan kesempatan kepada putra-putri
Papua, Papua Barat dan daerah 3T
(Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk
melanjutkan pendidikan menengah
di luar provinsinya. Program ini juga
dalam rangka meningkatkan keterse-
diaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan, dan kepastian mem-
peroleh layanan pendidikan yang
bermutu bagi peserta didik usia
sekolah menengah yang terkendala
hambatan geografis dan ekonomi.
Mereka tersebar di Jawa, Bali dan ibu
kota provinsi masing-masing.

Program ini diberikan kepada
lulusan SMP atau bentuk lain yang
sederajat, dan hanya diberikan
kepada putra-putri asli Papua, Papua
Barat dan daerah 3T. Pesertanya me-
rupakan siswa pilihan yang memiliki
motivasi tinggi untuk melanjutkan
pendidikan ke tingkat menengah di
luar provinsinya. Selain itu, program
ini juga dalam rangka untuk mem-
percepat pembangunan sumber daya
manusia di Provinsi Papua, Papua
Barat dan daerah 3T, serta mewujudkan
akulturasi keragaman budaya
melalui program implementasi
pendidikan layanan khusus afirmasi
pendidikan menengah.



Praktik siswa ADEM.

“

Semoga inisiatif dan ajakan ini akan terus melebar ke berbagai daerah di Indonesia. Sehingga, akan benar-benar terjadi tenun kebangsaan. Karena pendidikan merupakan komitmen negara untuk memajukan anak bangsa.

Chozin Amirullah, Staf Khusus Mendikbud Bidang Pemangku Kepentingan, mengatakan bahwa akan ada beberapa perbaikan. Misalnya, jika saat ini anak-anak ADEM ini tinggal di kos-kosan atau asrama, dia akan mengajak masyarakat untuk lebih terlibat. Caranya dengan menjadikan siswa ADEM sebagai anak asuh. “Mereka itu ya akan tinggal di sebuah keluarga yang memang orang situ (penduduk setempat). Ini akan sangat membantu proses akulturasi budaya,” kata Chozin.

Dalam pengamatan Chozin, siswa ADEM ini memiliki perasaan atau

kesan bahwa di tempat barunya mereka masih merasa sebagai orang baru dan membawa kultur berbeda. Tak jarang, hal ini membuat mereka canggung. Akhirnya membuat mereka hanya berkumpul sesama mereka. “Kalau begini, mereka tidak bisa berkembang,” kata Chozin.

Menurut Chozin, kalau seorang anak ditiptikan di sebuah keluarga, statusnya akan berubah. “Masyarakat akan mengenalnya sebagai anak dari keluarga yang ditinggali. Sehingga masyarakat tidak memandangnya sekadar sebagai anak daerah 3T, tapi sebagai anak dari tokoh di situ. Ini

akan membantu dia dalam proses sosialisasi.”

Selain itu, program keluarga asuh ini juga akan membangun hubungan jangka panjang. Karena keluarga yang ditinggali akan terus membangun hubungan dengan keluarga asalnya di Papua atau di daerah 3T. “Bisa jadi setelah anak ini nanti lulus, mungkin lanjut kuliah di tempat lain. Hubungan keluarga ini kan tidak akan berhenti. Akan terbangun hubungan jangka panjang, persaudaraannya abadi,” kata Chozin.

Dengan begitu, akulturasi budaya terjadi. Akan tercipta tenun kebangsaan. Proses pembudayaan terjadi dengan sendirinya. Anak didik juga tidak akan mengalami masalah dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat setempat.

Selain itu, akan terjadi silaturahmi yang abadi antara anak-anak didik itu dengan keluarga angkatnya. Dan, ini bisa terjadi berkat proses perembesan nilai-nilai budaya yang tercipta berkat keluarga asuh.

Chozin melihat itikad baik muncul dari para pemimpin daerah. Ridwan Kamil, wali kota Bandung, misalnya. Ketika dia menerima siswa ADEM, secara formal dia mengatakan bahwa mereka adalah anak angkatnya. “Ini kan simbol yang bagus sekali. Seorang kepala daerah mengangkat anak-anak ADEM yang ada di Bandung,” kata Chozin.

Chozin berharap, inisiatif dan ajakan ini akan terus melebar ke berbagai daerah di Indonesia. Sehingga, akan benar-benar terjadi tenun kebangsaan. Dan, pendidikan adalah komitmen negara untuk memajukan anak bangsa. •



KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR

Mencetak para pemimpin muda penggerak perubahan yang berkarakter, berintegritas, dan anti korupsi.

DEMI memenuhi kebutuhan pemimpin berkualitas di masa depan, Kemendikbud menggelar program Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP). Peserta KKP yang berjumlah 1.175 merupakan pengurus OSIS terbaik se-Indonesia, mulai dari SMP, SMA, SMK, sampai siswa penerima program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

“Saya membayangkan salah satu, dua, tiga, empat, anak-anakku nantinya berada di mimbar ini, menjadi Presiden Indonesia,” kata Presiden Jokowi, dalam pembukaan KKP pada 18 November 2015 di Istana Negara. Presiden mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Tantangan itu, menurutnya, harus dijawab dengan hadirnya sebuah pemimpin baru, pemimpin yang berkarakter. “Kepemimpinan yang berkarakter harus dibangun sejak dini, dimulai dari lingkungan sekolah”.

KKP menjadi kawah candradimuka bagi para pelajar untuk membekali diri dalam mengasah potensi kepemimpinannya di masa depan, sejalan dengan Nawacita poin kedelapan: melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan. “Setelah

mengikuti kegiatan KKP, adik-adik bukan sekadar pemimpin, canangkan pada diri sendiri bahwa saya adalah penggerak perubahan,” kata Mendikbud.

Mendikbud menegaskan bahwa penggerak perubahan berarti tak sekadar memimpin tapi mampu menggerakkan, mengajak semua orang merasa memiliki masalah dan bergerak bersama untuk menyelesaikannya. “Jangan tanya pada diri sendiri, kelak mau jadi apa? Tapi tantang diri untuk bertanya, kelak mau berbuat apa.”

Para peserta KKP akan mendapat penempatan selama kegiatan, mulai dari materi kepemimpinan, kewirausahaan, kebangsaan, pengenalan potensi diri, kepedulian, penanaman anti korupsi, anti narkoba, pengetahuan tentang HAM, kerohanian, 4 C (*communication, coloboration, creativity, & critism*), dan teknologi informatika. “Secara keseluruhan ada tiga dimensi dalam kegiatan KKP, yaitu dimensi integritas, kapabilitas, dan kebangsaan,” kata Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Integritas, lanjut Hamid, merupakan bekal dasar seorang pemimpin.



Para peserta KKP ditanamkan berbuat jujur, komitmen, disiplin anti korupsi, anti narkoba, dan berani mengambil keputusan serta bertanggung jawab terhadap pilihannya. Komponen kapabilitas digali melalui pengenalan kompetensi diri, manajerial, dan kemampuan berkomunikasi lintas usia dan area, baik secara lisan maupun tulis. Terkait



Presiden Jokowi menyalami peserta KKP di Istana Negara disaksikan Mendikbud Anies Baswedan dan Menpora Imam Nahrawi pada 18 November 2015. Kemendikbud menyelenggarakan KKP sebagai ikhtiar menyiapkan pemimpin berkualitas di masa depan.

kebangsaan, para peserta dari berbagai daerah yang saling berinteraksi dalam kegiatan ini menjadi sadar akan keragaman, sadar bahwa walaupun berbeda tapi tetap satu bangsa Indonesia.

Hamid menjelaskan bahwa kegiatan KKP berbeda dengan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). “LDK memberi pembekalan kepada siswa

bagaimana mereka menjadi pemimpin OSIS, sedangkan KKP tujuannya lebih luas dan mendalam, menyiapkan para pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang,” katanya. Salah satu materi baru yang tidak ada dalam LDK adalah penanaman anti korupsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di empat lokasi. Di lokasi kegiatan KKP jenjang

SMK di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata (PPPPTK Bispar), Sawangan, para peserta begitu antusias mendapat materi anti korupsi dari Gumilar Prana Wilaga, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta sempat menyoraki, geram, ketika



Peserta KKP SMA mengadakan kegiatan di luar. KKP dirancang sebagai wahana pembelajaran aktif agar semua peserta membaur, berproses bersama, sebagai bekal masa depan mereka.



Jangan tanya pada diri sendiri, kelak mau jadi apa?
Tapi tantang diri untuk bertanya, kelak mau berbuat apa.

—MENDIKBUD ANIES BASWEDAN

melihat wajah para terpidana kasus korupsi terpampang pada pemaparan bergambar. Mereka sangat membenci para koruptor. Sejak itu mereka berkomitmen tidak akan punya lema “korupsi” dalam kamus hidupnya.

Menurut Gumilar, penanaman anti korupsi sedari dini sangat penting. “Mereka adalah generasi pelurus bangsa, calon pemimpin negeri, harus meniadakan korupsi sedari dini. Kami membekali para peserta dengan sembilan nilai anti korupsi, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan begitu mereka telah menanamkan perilaku awal anti-korupsi,” katanya.

Selain pembekalan materi, ada pula kegiatan interkasi langsung dengan para inspirator muda. Pandji Pragiwaksono, penulis dan *stand up comedian*, mengajak para peserta KKP jenjang SMP di lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud, Sawangan untuk berinteraksi langsung. Pandji berpesan kepada mereka untuk tetap memperjuangkan mimpi mereka, terus berkarya, dan menciptakan sesuatu sesuai minat. “Satu hal yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah kebanyakan orang yang bekerja, dan bukan berkarya, dalam arti kata tak mencipta sesuatu dari nol. Jadi karya itu akan membangkitkan Indonesia,” katanya.

Pemandangan sedikit berbeda terjadi di lokasi KKP jenjang SMA, di hotel Safari Garden, Cisarua. Para peserta begitu semarak mengikuti kegiatan luar ruangan, seperti *out bond* dan ketangkasan lainnya. Mereka bahu-membahu dalam kelompok menyelesaikan setiap rintangan dan tantangan yang diberikan fasilitator. Begitu seorang kesulitan, dua, tiga, bahkan kelompok lainnya kontan memberi semangat. “Memecahkan macam-macam masalah harus dengan kecepatan dan ketepatan. Pemimpin pasti butuh anggotanya. Ketika pemimpin dan anggotanya gotong-royong, masalah jadi lebih mudah diselesaikan,” kata Taufik Irawan, siswa SMA Muhammadiyah 1, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Lain halnya dengan ketiga lokasi, peserta KKP program ADEM pada lokasi PPPPTK Penjas dan BK, Parung, tak pernah kekurangan energi. Mereka menebar keriaan di setiap sesi. Terkadang menari dan bernyanyi lagu daerah Papua atau lagu nasional. “Seperti reuni, sebab selama dua tahun lebih kami terpisah sekolah, sekarang berkumpul kembali untuk bersama-sama menggapai cita-cita menjadi pemimpin bangsa,” kata Carolina Aleak Elokpere, siswa asal Wamena, yang mengikuti program ADEM di SMAN 4 Kota Malang.

“Semua kami di sini senang dapat belajar dan menjadi tahu bagaimana seharusnya menjadi pemimpin berkualitas. Saya senang juga bisa bertemu Presiden Jokowi. Bisa masuk Istana Presiden. Tapi saya sedih kalau acara KKP selesai. Kita pisah dengan teman-teman,” kata Carolina. •



Rombongan siswa pemenang olimpiade internasional 2015

PENGHARGAAN INTERNASIONAL UNTUK SISWA

Siswa-siswi terbaik Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai ajang internasional.

SISWA-SISWI terbaik Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai ajang internasional periode 2014-2015. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di ajang 11th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School, yang digelar Oktober 2014, tim Indonesia menggondol lima medali emas dari dua bidang yang dilombakan,

yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Raihan medali ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga dunia dari 14 negara peserta. Posisi pertama ditempati Thailand yang meraih delapan medali emas, diikuti Singapura yang meraih tujuh medali emas.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), para siswa Indonesia

berprestasi di kejuaraan karate internasional The 5th Basel Open Masters 2014 dengan meraih enam medali emas. Ajang bergengsi ini diikuti 800 peserta dari 30 negara. Total medali yang diraup siswa Indonesia (termasuk SD) di ajang ini sebanyak 9 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Ini bukan kali pertama para duta cilik Indonesia berhasil



memenangkan kejuaraan karate internasional Basel Open Masters. Pada 2013 sebanyak 5 medali emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil disabet tim karateka Indonesia. Karateka Indonesia memang terkenal tangguh. Mereka kerap sanggup mengalahkan lawan dalam waktu singkat dan bermental baja.

Sementara, pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) para pelajar Indonesia berprestasi di ajang International Science Project Olympiad (ISPRO) 2015. Mereka mengharumkan nama bangsa setelah menggondol empat medali emas dan berhasil menjadi juara umum. ISPRO 2015 diikuti pelajar setingkat SMA dari 29 negara. Indonesia mengirimkan 10 tim dalam kompetisi ISPRO tahun ini.



ISPRO 2015



“

Siswa-siswi terbaik Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai ajang internasional periode 2014-2015.

Pelajar SMA Negeri 1 Bantaeng, Sulawesi Selatan, Irham Syarif (18) dan Ahmad Abrar (18), berhasil meraih medali emas lewat proyek sains mereka, yakni masker helm yang mampu menyerap timbal. “Kami membuat helm yang berasal dari daun nangka dan mahoni, karena bisa menyerap timbal dan mudah ditemui,” ujar Irham.

Berbagai penghargaan internasional lainnya juga diraih para siswa Indonesia di antaranya pada Korea International Mathematics Competitions (KIMC), The 11th International Junior Science Olympiad (IJSO 2014), dan International Olympiad On Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2015 yang diselenggarakan pada Agustus 2015 di Indonesia.

Pada ajang IOAA tim Indonesia menyabet total 9 medali, yakni 2 medali emas, 6 perak, dan satu perunggu. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Iran yang meraih 11 medali. Indonesia juga mendapat penghargaan khusus kategori Best Observation dan Best Data Analysis.

Prestasi membanggakan diraih oleh Joandy Leonata Pratama, siswa SMA Sutomo 1 Medan, yang menempatkan dirinya pada tiga posisi juara sekaligus. Ia meraih medali emas dengan ranking tertinggi dari total 11 orang. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan khusus untuk kategori Best Observation dan The Best Data Analysis. Ia bahkan dinobatkan sebagai The Absolute Winner. •



Siswa PAUD menyusun balok bersama-sama.



GERAKAN PAUD BERKUALITAS

Hasil investasi pada pendidikan usia dini sangat besar jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain.

ADA tiga aspek penting yang perlu diperoleh untuk mendukung perkembangan anak-anak usia dini, yaitu layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, serta pengasuhan dan perlindungan. Ketiga hal tersebut harus diberikan seoptimal mungkin agar upaya menyiapkan generasi bangsa ke depan yang lebih baik dapat tercapai.

Mengingat banyaknya jumlah anak usia dini yang mencapai hampir 30 juta, upaya persiapan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah.

Mengutip hasil penelitian James Heckman, peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi dari Universitas Chicago, hasil investasi pada pendidikan usia dini sangat besar jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Disebutkan, investasi sebesar US \$1 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas akan memperoleh imbal hasil sebesar US \$7.

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke lembaga PAUD adalah keterbatasan ekonomi. Guna mengatasi kendala tersebut, Kemendikbud telah menyelenggarakan program Bantuan Operasional PAUD.

Pada tahun ini pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional bagi sebanyak 74.848 lembaga. Tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi sebanyak 158.700 lembaga.

Bantuan Operasional PAUD digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar seperti subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.

PAUD berkualitas berarti tersedianya tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi tumbuh kembang, serta belajar anak. PAUD berkualitas juga bercirikan memiliki pendidik yang kompeten. Bila seluruh anak mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas maka akan menjadi titik awal yang cerah dan modal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih gemilang.

Di sisi lain, keberadaan PAUD membutuhkan kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat baik yang berada di kota maupun di daerah.

Kemendikbud mengatakan, fasilitas untuk penyelenggaraan PAUD



Berbaris bermain air. Kebiasaan antrre sudah ditanamkan sejak usia dini.



Seorang guru mengenalkan salah satu alat komunikasi tertua, kaleng yang disambungkan tali.

hanyalah penunjang, sedangkan peran serta masyarakat tetap menjadi faktor utama. “Masyarakat harus sadar akan keberadaan PAUD karena ini bukan sekadar menyelenggarakan pendidikan, tetapi membentuk wajah masa depan Indonesia,” katanya.

Tidak dimungkiri, penyelenggaraan PAUD yang ada saat ini masih banyak kekurangan, seperti alat permainan yang kurang memadai dan ruangan yang kurang baik. Umumnya, masalah kekurangan ini terjadi di daerah-daerah.

Mendikbud mendorong masyarakat agar berperan dalam penyelenggaraan PAUD dengan menjadikan rumah atau garasi sebagai tempat



Seorang guru membacakan cerita kepada siswa-siswa PAUD-nya.

“

Pendidikan anak usia dini sangat penting dan genting. Penting dalam artian anak berada dalam fase pengembangan seluruh potensi masa emasnya.

—MENDIKBUD ANIES BASWEDAN

bagi anak untuk berkumpul sebelum difasilitasi oleh pemerintah. “Rumah atau garasi rumah dapat dijadikan tempat berkumpul dan bermain anak-anak PAUD,” katanya.

Gerakan PAUD berkualitas merupakan strategi untuk meningkatkan

kualitas manusia Indonesia pada masa depan. Kurikulum dan bahan pengajaran pada anak PAUD tidak difokuskan pada proses belajar, tetapi lebih pada proses permainan. Anak diberi kesempatan bermain agar menerima rangsangan dengan baik.

Menurut Mendikbud, pendidikan anak usia dini sangat penting dan genting. Penting dalam artian anak berada dalam fase pengembangan seluruh potensi masa emasnya. “Genting (dalam arti) ketersediaan waktu yang sangat pendek karena anak hanya belajar sampai berusia enam tahun,” kata dia.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi peserta PAUD. Di antaranya, dengan memperbaiki PAUD secara kelembagaan, peraturan atau payung hukum, sistem pembelajaran, serta usaha perlindungan terhadap anak-anak. •



Masjid Karangantu, Koleksi Tropenmuseum

PENERBITAN BUKU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM INDONESIA

Mengabadikan jejak kebudayaan Islam Nusantara.

KACUNG Marijan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, resah melihat terbatasnya literatur sejarah Islam Indonesia. Hasil kajian yang sudah ada belum merajut mozaik-mozaik yang masih terpisah.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, rasanya janggal bila tidak memiliki sebuah buku

menyeluruh tentang sejarah Islam di Indonesia,” imbuhnya.

Tak mau berpanjang resah, ia pun menjajaki penggarapan buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia (SKII). Targetnya menyusun beragam tema dalam rentang panjang riwayat perjalanan Islam di Indonesia. Menyeluruh. Demi menapaki kemungkinan



Lima jilid Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia karya begawan intelektual muslim Indonesia.

itu, Dirjen Kebudayaan mengajak para begawan sejarah semisal Taufik Abdullah, Azyumardi Azra, dan Jajat Burhanuddin, serta berbagai pakar lintas studi, budayawan, filolog, dan arkeolog yang meminati kajian Islam.

Pada 6 November 2014 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, SKII yang semula direncanakan



Kongres Persatuan Penganut Tarekat Islam, di Banjarmasin 28 Desember 1952

terbagi menjadi enam jilid, akhirnya resmi diluncurkan dalam lima jilid, yakni Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, Tradisi Intelektual Sosial, Sastra dan Seni, Institusi dan Gerakan, dan Khazanah Budaya Bendawi.

“Keseluruhan tema itu memberi gambaran mengenai dimensi kebudayaan Islam di Indonesia yang khas, unik, dan berbeda dengan corak Islam di Timur-Tengah,” papar Kacung.

Selain itu SKII, menurut Mendikbud, “Penting menjadi refleksi. Bukan semata sebagai sebuah catatan sejarah namun menjadi pesan penting bagi kita sebagai sebuah negara.”

SKII menjadi terobosan penting Dirjen Kebudayaan dalam upaya mengidentifikasi warisan

kebudayaan Islam Indonesia lewat interaksi kajian pustaka dan revitalisasi benda cagar budaya.

Penggarapan kajian kebudayaan Islam Indonesia tak hanya selesai di atas kertas. Namun, beriringan dengan pengerjaan itu, Dirjen Kebudayaan berpartisipasi aktif dalam revitalisasi benda cagar budaya seperti beberapa situs makam kuno para tokoh penyebar Islam di bumi Nusantara.

“Penulisan buku sejarah dan revitalisasi menjadi sinergi. Kedua-duanya sangatlah penting bagi pengembangan keilmuan dan pelestarian,” ujar Kacung.

Penulisan sejarah Islam Indonesia pastinya memantik perdebatan. Silang pendapat para ahli yang acap

menyeruak dan tak kunjung usai terkait tema kedatangan Islam di Nusantara utamanya terkait empat pokok: tempat asal kedatangannya, para pembawanya, waktu kedatangannya, dan bagaimana proses penyebarannya.

Perdebatan itu tak lantas menjadi tabu dalam buku SKII yang penggarapannya berawal pada 2013. Itu justru menjadi dokumentasi dialog para ahli yang tersaji apik pada sub tema Teori-Teori Kedatangan Islam.

Salah satu jalan keluar memahami perdebatan itu, selain menelusur nama dan gelar para pendatang awal, juga pendayagunaan sumber-sumber lokal (historiografi lokal). Oleh sebagian peneliti, sumber lokal umumnya disingkirkan bagi penulisan sejarah,



Seorang Haji, *Nederlandsch Oost-Indische Typen*, 1856.

sebab terlampau banyak distorsi dan anakronis.

Adagium itu sepertinya tak berlaku dalam penyusunan buku SKII. Sumber lokal menjadi bahan bakar penting dalam jalinan narasi aneka ragam tema.

“Meski historiografi lokal ini sering bercampur dengan mitos dan

legenda, informasi yang termuat di dalamnya tak bisa dibuang begitu saja,” ujar Azyumardi Azra.

Sumber lokal, menurut Azra, membantu peneliti memandangi dari perspektif yang lebih luas. Lewat cerita yang telah mendarah daging, orang akan mudah memahami



Meski historiografi lokal ini sering bercampur dengan mitos dan legenda, informasi yang termuat di dalamnya tak bisa dibuang begitu saja.

— AZYUMARDI AZRA.

proses konvensi dan Islamisasi Nusantara.

Melalui telusur sumber-sumber lokal, penulisan sejarah tak lagi berhenti karena kehabisan narasi. Sumber lokal membantu memberi informasi “jaringan ingatan kolektif” yang transdaerah.

Guna melengkapi kajian tradisi lokal, SKII akan mendapat dua kawan baru pada akhir 2015 berupa buku *Ensiklopedi Suku-Suku Bangsa di Indonesia* yang merupakan hasil revisi buah karya M. Junus Melalatoa dan *Diaspora Melanesia* yang akan banyak mengungkap fakta menarik seputar persebaran Melanesia. •



Bangunan tua di area Tambang Sawahlunto yang sekarang dijadikan Kantor PT. Bukit Asam.



PENOMINASIAN WARISAN BUDAYA DUNIA

Menjaga warisan budaya menjadi tugas bersama.

KAWASAN Kota Tambang Sawahlunto sibuk berbenah. Tak tampak fisik bangunan yang dibiarkan ringkih. Para penghuni bekas bangunan kolonial itu bersama-sama menjaga lingkungan mereka, tak sudi bila kota tambang yang berkembang sejak abad ke-19 itu rusak. Masyarakat punya idiom baru dalam mengembangkan kota sebagai “Warisan Budaya Dunia”.



Nenek menjelaskan ihwal batik kepada siswa.



Anak-anak muda menarikan Tari Saman.

Persiapan Sawahlunto menuju kota terkemuka di mata dunia merupakan jalan panjang nan berliku. Sepuluh tahun kota yang terletak di lembah sempit yang terisolasi di punggung Bukit Barisan bersiap mengelola kekayaan sejarah, budaya, dan manusia sebagai wujud komitmen dalam menjaga warisan peradaban. Kerja keras itu terbayar setelah Mendikbud Anies Baswedan menetapkan Sawahlunto sebagai Warisan Nasional pada tanggal 29 Desember 2014. Peluang menuju kota Warisan Budaya Dunia semakin terbuka.

Pada penjajakan yang dilakukan oleh Direktorat Internalisasi, Ditjen Kebudayaan, penentuan beberapa situs atau kawasan yang masuk ke dalam Daftar Sementara (*Tentative List*) UNESCO tahun 2014, Kota Tambora Sawahlunto masuk dalam daftar bersama delapan lainnya; Kota Tua Jakarta, Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Percandian Muara-jambi, Situs Trowulan, Permukiman



Dalang cilik sedang beraksi.



Angklung, alat musik tradisi Sunda yang kian digemari anak-anak muda.



“

Kita mesti hati-hati dalam menyusun draft perencanaan. Sebab itu bekal yang akan ditagih pihak UNESCO kepada Indonesia mengenai pengelolaan warisan budayanya.

–**ROSERI**, Kasubdit Warisan Budaya Nasional dan Dunia

Tradisional Toraja, Pulau Banda, Kota Lama Semarang, dan Permu-
kiman Tradisional Sijunjung.

“Area kawasan Kota Tua Sawahlunto yang akan diajukan ke UNESCO itu seluas 89 hektar. Perlu sinergi di antara masyarakat yang meng-
huni kawasan, pejabat BUMN, dan Pemko Sawahlunto yang tengah menyiapkan kerja besar menuju kota Warisan Dunia,” kata Evrinaldi, Kepala Kantor Peninggalan Sejarah dan Permuseu-
man Sawahlunto.

Ada tiga justifikasi nilai universal luar biasa pada kawasan Sawahlunto. Pertama, kota yang semula lembah terisolir, bertransformasi menjadi kota tambang berpengaruh dalam perkembangan revolusi industri yang terjadi secara global di Eropa pada akhir abad ke-19. Kota Sawahlunto terbukti berperan bagi perkembang-
an ekonomi dan sosial dunia. Kedua, Sawahlunto dikenal sebagai kota tam-
bang tertua di Asia Tenggara, yang merupakan representasi tahapan penting dalam evolusi pertambangan





Seorang siswa memainkan salah satu kesenian tradisional Cirebon, Tari Topeng.

batu bara dunia. Keberadaan industri ini menumbuhkan dampak bagi sekitarnya, seperti pembangunan fasilitas kesehatan. Sawahlunto juga representasi pertukaran budaya. Ketiga, kawasan Sawahlunto memperlihatkan struktur perkotaan yang terintegrasi dengan aktivitas industri. Konsentrasi kawasan mengadaptasi kondisi geografis dan masyarakat. Ciri yang tampak antara lain dapur umum, fasilitas kesehatan, hunian pekerjaan, dan kantor administrasi.

Situs budaya yang masuk ke dalam Warisan Dunia harus melalui proses nominasi yang sangat ketat dan terukur. Tidak mudah bagi setiap negara memasukkan situs warisan budayanya karena harus berkomitmen untuk mengelola, menjaga, dan melindunginya dari ancaman kepunahan.

Indonesia telah meratifikasi konvensi UNESCO 1972 tentang perlindungan situs warisan dunia dan alam (Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage).

“Kita mesti hati-hati dalam menyusun *draft* perencanaan. Sebab itu bekal yang akan ditagih pihak UNESCO kepada Indonesia mengenai pengelolaan warisan budayanya,” kata Roseri.

Selain itu, terdapat penominasian lain yang tengah berjalan untuk kategori Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang menjadi Intangible Cultural Heritage (ICH) List UNESCO. WBTB kita yang telah mendapat sertifikasi dari UNESCO adalah Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman, dan Noken. Sebagai tindak lanjut penominasian ICH List UNESCO,

pemerintah wajib melaporkan secara berkala perkembangan WBTB setiap 4 tahun sekali untuk kategori Urgent Safeguarding dan 6 tahun sekali untuk kategori lainnya.

“Sudah dua tahun terakhir Indonesia tak berhasil mendapat sertifikasi WBTB dari UNESCO. Untuk tahun ini kami sudah belajar untuk memperbaiki seluruh persiapan mulai dari dokumen yang menjadi bahan utama pertimbangan hingga pengelolaan warisan budaya,” kata Roseri.

Pada tahun ini Indonesia telah mendaftarkan Tari Bali untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Para seniman, sesepuh, dan masyarakat Bali telah mengusulkan agar Tari Bali mendapat perhatian dunia. Seluruh proses telah selesai dilakukan dan tidak ada catatan khusus dari UNESCO.

“Tinggal menunggu hasilnya. Kami optimis Tari Bali yang telah didaftarkan akan membuahkan hasil,” kata Roseri.

Pada periode ini pemerintah telah menorehkan sejumlah prestasi di UNESCO. Dalam bidang *Memory of the World* (MoW) Kemendikbud bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Informasi mencatatkan Arsip Konferensi Asia Afrika; dalam bidang *Man and Biosphere* dua situs Indonesia telah diakui UNESCO, yaitu Bromo Tengger Semeru-Arjuna, dan Taka Bonerata Kepulauan Selayar. Dan, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemen-esdm mencatatkan Geopark Gunung Sewu, Pacitan. •



3

PENGEMBANGAN EFEKTIVITAS BIROKRASI MELALUI PERBAIKAN TATA KELOLA DAN PELIBATAN PUBLIK

Meski berat dan besar, bertindak cepat dan tepat adalah keharusan.

KEMENDIKBUD mengedepankan perbaikan dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan dengan melibatkan publik. Strategi ini meliputi aspek pengelolaan kebijakan berbasis data serta bukti di lapangan, meningkatkan penguatan kapasitas tata kelola pada sektor birokrasi pendidikan di daerah-daerah, serta mengembangkan koordinasi dan kerja sama di tingkat nasional di segala sektor. Setahun ini kami melakukan banyak kegiatan, seperti:

- 1) Untuk menyatukan langkah, Kemendikbud membuat satu lokakarya yang bertujuan untuk menyamakan visi dan misi Kemendikbud.
- 2) Sebagai wujud komitmen atas efektivitas birokrasi, Kemendikbud merampingkan dan membentuk struktur baru.
- 3) Melaksanakan seleksi terbuka untuk menjangkau potensi yang lebih luas untuk jabatan Eselon I dan II.
- 4) Menganangkan zona integritas, wilayah bebas korupsi.
- 5) Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga, Kemendikbud melakukan pengawasan ketat lewat pemantauan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 6) Menyelenggarakan Tamu Kehormatan di ajang Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman.
- 7) Untuk lebih menyebarkan duta-duta Indonesia ke dunia yang lebih luas, Kemendikbud meningkatkan ikhtiar ini lewat Darmasiswa. •



Mendikbud Anies Baswedan memaparkan konsep dan langkah-langkah Kemendikbud ke depan.



LOKAKARYA: MEMBANGUN VISI BERSAMA

Menyatukan langkah untuk bergerak bersama melunasi salah satu janji kemerdekaan, mencerdaskan anak bangsa.

GUNA menyatukan pemahaman soal arah kerja ke depan, Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan khusus untuk pejabat eselon I dan II. Kegiatan bernama Lokakarya: Membangun Visi Bersama itu dilaksanakan pada 16 - 18 September 2015. Ada 63 peserta yang mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan awal untuk seluruh eselon I dan II ini dihadiri penuh oleh Mendikbud sejak pembukaan hingga penutupan. Baginya, bekerja sama dengan orang baru seperti belajar naik motor baru dengan mesin baru, semuanya harus fokus untuk bergerak bersama menuju titik yang sama, saling menopang, dan memiliki tujuan yang sama agar tim baru ini berjalan dengan baik. “Kita berharap dalam kebersamaan ini kita menjadi grup yang solid, komunikasi jadi lebih baik, kerja sama lebih siap, seperti halnya pasukan jalan di tempat, saling menyesuaikan dan apabila sudah tertata lalu bergerak bersama,” katanya.

Dengan gamblang Mendikbud menggambarkan visi Kemendikbud, yaitu membentuk “insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi

semangat gotong royong”. Dia juga memaparkan strategi turunan yang terbagi ke dalam tiga kategori:

1. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan
 - Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
 - Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 - Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
2. Peningkatan mutu dan akses
 - Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.
 - Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.
 - Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk



Para pejabat eselon I dan II Kemendikbud berinteraksi dan berdiskusi, menyusun langkah untuk bergerak bersama melunasi salah satu janji kemerdekaan: mencerdaskan anak bangsa.

menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi.

3. Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik
 - Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.
 - Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.

“

Kita berharap dalam kebersamaan ini kita menjadi grup yang solid, komunikasi jadi lebih baik, kerja sama lebih siap, seperti halnya pasukan jalan di tempat, saling menyesuaikan dan apabila sudah tertata lalu bergerak bersama.

—MENDIKBUD ANIES BASWEDAN



- Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.
- Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemendikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, serta melibatkan publik.

Berbeda dengan kegiatan sejenis yang sudah sering dilaksanakan Kemendikbud sebelumnya, lokakarya ini tidak saja dilakukan melalui metode ceramah satu arah melainkan juga menggunakan metode *experiential learning*. Dengan metode itu, peserta diharapkan mampu menggali wawasan sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, baik itu permainan, tugas kelompok, atau aktivitas lainnya. Nyatanya cara ini ampuh untuk menarik minat peserta yang sejak awal hingga akhir acara tampak sangat antusias. Sebagian besar dari mereka juga mengatakan



bahwa mereka menjadi jauh lebih memahami apa yang menjadi target besar Kemendikbud periode ini.

Karena itu seluruh pejabat eselon I dan II sepakat untuk melakukan kegiatan serupa di unit masing-masing, agar visi Kemendikbud ini juga dapat dimaknai sama oleh seluruh pegawai Kemendikbud. Kesepakatan lain yang

muncul adalah pejabat akan melakukan kajian ulang terkait program-program di unit masing-masing. Penyamaan visi yang menyeluruh ke semua staf Kemendikbud ini diharapkan dapat membantu Kemendikbud mencapai target-target pendidikan dan kebudayaan dengan lebih mudah. •



SIMPOSIUM PENDIDIKAN NASIONAL

Kemendikbud membuat sejarah baru, dengan meningkatkan pelibatan publik dalam isu-isu pendidikan.

UNTUK lebih memantapkan semangat keterlibatan publik dalam isu-isu pendidikan, Kemendikbud bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menggelar Simposium Pendidikan Nasional. Acara yang dihelat pada 24-25 Februari 2015 di Graha Ki Hadjar Dewantara ini mengusung tema Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Nasional.

KMSTP adalah himpunan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja dan advokasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. KMSTP terdiri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Pattiro, dan Network for Education Watch (NEW) Indonesia. Dalam Simposium Pendidikan Nasional KMSTP membahas isu-isu strategis dunia pendidikan, seperti akses dan keterjangkauan, anggaran pendidikan, mutu dan kurikulum pendidikan nasional, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru.

Bagi Kemendikbud, langkah ini adalah sejarah. Pertama kalinya

Kemendikbud mengajak publik untuk lebih tahu jeroan pendidikan di Indonesia. Menurut Mendikbud, langkah ini merupakan salah satu cara mewujudkan pendidikan sebagai gerakan bersama. Selain itu, “Partisipasi publik di berbagai tingkat, nasional dan daerah, akan meningkatkan akuntabilitas dan membantu memastikan bahwa keputusan kebijakan yang diambil memang berdasarkan kebutuhan,” katanya.

Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, senang dengan perhelatan ini. “Kami mengapresiasi inisiatif Mendikbud yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini,” katanya.

Simposium Pendidikan ini bagian dari pengejawantahan salah satu strategi Kemendikbud periode 2014-2019, yaitu efektivitas birokrasi melalui tata kelola dan pelibatan publik. Kemendikbud sadar bahwa dengan keterlibatan publik ini bisa lebih cepat memajukan pendidikan di Indonesia.

Kemendikbud bertekad mengubah sistem komunikasi yang selama ini searah menjadi dua arah. Dengan



pola seperti ini, Febri mengajak masyarakat yang terlibat untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu yang baik, khususnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Pasalnya, Kemendikbud ini mengelola dana lebih dari Rp 400 triliun. Namun, 62,2% langsung ditransfer ke daerah, sementara Kemendikbud sendiri hanya mengelola 12,7%.



Suroto, Direktur Yayasan Satu Karsa Karya, Solo, menyampaikan pandangannya dalam Simposium Pendidikan Nasional. Kemendikbud mengajak khalayak untuk lebih terlibat dalam isu-isu pendidikan di Indonesia, agar peningkatan kualitas pendidikan Indonesia segera terlaksana.

Butuh pengawasan bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil agar semua dana itu tersalurkan untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Karena itu, keterlibatan publik dalam program pendidikan menjadi sangat penting.

Ada enam keputusan dalam Simposium Pendidikan Nasional. Di antaranya adalah, 1) pemerintah

diminta mengkaji ulang konsep dasar Kurikulum 2013; 2) memperkuat peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 3) memperkuat hukum dan pemerataan guru dari SKB 5 Menteri menjadi Peraturan Pemerintah; 4) tetap mendorong perbaikan regulasi pengelolaan guru; 5) mengkaji standar biaya satuan pendidikan untuk jenjang dasar, baik

negeri maupun swasta; 6) merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, bahwa Program wajib belajar harus ditingkatkan dari 9 tahun menjadi 12 tahun.

Kemendikbud kini sudah, sedang, dan akan menjalankan satu per satu keputusan Simposium Pendidikan Nasional tersebut. •



SIMPOSIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ajang para guru bertukar ide gagasan, inovasi pembelajaran, dan terobosan melalui karya ilmiah. Guru mulia karena karya.

“KEMULIAAN seorang guru memang dari karya-karyanya. Saya sendiri adalah karya dari guru-guru saya. Dan kita semuanya merupakan karya dari guru-guru kita,” kata Presiden Joko Widodo di hadapan lebih dari 12.500 guru dan tenaga pendidikan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, di Istora Senayan, 24 November 2015.

Presiden menegaskan bahwa menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi lebih dari itu, menyiapkan sebuah masa depan. Kualitas manusia Indonesia di masa depan ditentukan guru-guru kita hari ini. Sebagai peletak dasar masa depan, guru tak lagi pasif memberi materi. Guru dituntut untuk membuat terobosan, inovasi, dan kemajuan dalam proses pembelajaran. Salah satu wahana itu, dalam rangkaian Peringatan Hari Guru, Kemendikbud menggelar Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam simposium yang berlangsung 23-24 November itu para guru se-Indonesia saling bertukar ide, inovasi pembelajaran, dan mencari pemecahan isu strategis dunia pendidikan.

Ada 4.000 guru dan tenaga pendidikan yang berkumpul pada ajang tersebut. Mereka menyajikan karya terbaik mereka, inovasi, juga terobosan mereka sebagai bekal tukar ide dan gagasan. “Guru-guru berkumpul bukan untuk mendengarkan ceramah dari orang lain, justru guru-guru kita adalah para cendekiawan yang punya banyak terobosan dan saling belajar di acara Simposium Guru 2015,” kata Mendikbud.

Semula para peserta yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas, tutor, penilik, dan pamong belajar berbagai jenjang pendidikan seluruh Indonesia mengirim karya ilmiah terbaik via daring ke laman <http://simposiumguru2015.kemdikbud.go.id/>. Karya yang terunggah dan masuk proses seleksi oleh tim independen yang berisi para pakar pendidikan dan dosen sejumlah 3.366 karya. Sistem penilaian dilakukan melalui dua cara, penilaian pertama secara akademik sebesar 60%, dan penilaian kedua dengan pelibatan publik sebesar 40%. Terpilih 250 karya terbaik yang akan



diuji-presentasikan ke dalam enam belas ruang tematik.

“Ini pertama kalinya kami mengundang guru dan tenaga pendidikan bertukar ide dan gagasan dalam acara simposium tingkat nasional, untuk mengumpulkan ‘mutiara-mutiara’ yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Sumarna Surapranata, Direktur



Presiden Jokowi memeluk guru yang mengajarnya saat SMP, Ibu Sutopo. Dalam pidato Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan 24 Oktober 2015, Presiden Jokowi menandatangani bahwa guru mulia karena karya.

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Para pemenang di masing-masing bidang akan menyajikan kembali karya terbaik mereka di hadapan para guru lainnya. “Tak langsung pulang, sebab itulah sarana tukar gagasan. Guru lainnya bisa bertanya dan menanggapi,” katanya. Ajang

simposium kali ini memang semarak dengan ide-ide segar yang dibawa para guru dan tenaga kependidikan se-Indonesia.

Salah satu terobosan yang menjawab tantangan zaman, era digital, dikembangkan oleh Wahyu Sri Ningsih asal SMKN 1 Solok, Sumatera Barat. Juara 1 kategori Karya Ilmiah

dan Inovasi Pembelajaran (KIIP) tingkat nasional ini menghadirkan pengembangan inovasi dan pembelajaran melalui *e-learning* yang mudah diakses para siswa pengguna ponsel pintar, laptop, gawai, dan komputer. Program itu dilengkapi berbagai fitur penunjang yang atraktif, seperti video, permainan,

dan fitur lain yang menyenangkan bagi siswa.

Terobosan itu bermula kala Wahyu Sri Ningsih mendapat laporan dari seorang guru kalau muridnya sering mengesampingkan materi pelajaran di kelas, dan memilih main permainan digital. Dia lalu berpikir mengapa tidak keasyikan muridnya dijadikan media pembelajaran. “Saya berpikir akan sulit bila terus melarang. Saya termotivasi untuk membuat game dan fitur lainnya agar materi belajar bisa masuk ke dalamnya,” kata Wahyu Sri. “Awalnya saya belajar dari buku, teman, internet bagaimana cara membuat fitur tersebut. Otodidak. Sebab latar belakang saya akutansi. Tapi karena saya mengajar teknik komputer jaringan, saya malu kalau tak bisa dan masih menjadi *user*”. Alhasil media pembelajaran berbasis *e-learning* bukannya kini telah dinikmati oleh para siswanya.

Lain lagi dengan slogan KOMJAGO (Kompak, Kerja Keras, dan Gotong Royong) gubahan Amini, Kepala Sekolah SLB Asuhan Kasih Kota Kupang yang membawanya meraih juara satu Kepala SLB Berprestasi Pendidikan Dasar Tingkat Nasional. Melalui slogan tersebut, Amini yang telah membhakti selama 21 tahun di pendidikan SLB Kupang, mengajak para warga sekitar, orang tua, dan anak didik bersama-sama membangun sarana dan prasarana sekolah serta mental anak didiknya.

Mula-mula akses sekolah di jalan berbukit tepi pantai yang sangat rusak jadi perhatian. Bersama masyarakat dia terapkan bahan baku alam, batu karang, menjadi

bahan pijak. Sekolah yang semula sepi pengunjung, kini mulai ramai karena akses jalan sudah memadai. Selanjutnya bangunan sekolah yang berbahan bebak, melalui usaha keras dari segenap guru, orang tua murid, anak didik, dan warga sekitar, sudah menjelma dinding kokoh. Selain itu, penghijauan dia lakukan untuk mempercantik, kewirausahaan dia bina bersama anak didiknya yang ternyata ramai peminat. “Melalui kesabaran, keuletan, selalu berinovasi, telaten, dan melibatkan warga, mengubah dinding bebak dan batu karang menjadi sekolah impian,” kata Amini.

Sarana dan prasana penunjuang nayasannya berdampak positif bagi perkembangan anak didiknya yang berkebutuhan khusus. Prestasi pun mereka raih. Enam anak didiknya menuai prestasi, mengharumkan nama Indonesia dalam ajang *Special Olympics World Games 2015*. “Juara satu karya ilmiah saya menjadi motivasi bagi anak didik juga saya untuk terus mengembangkan potensi sekolah. Saya tak mau berhenti sampai di sini,” kata Amini.

Selesai mengikuti Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan yang berakhir pada 23 November 2015, 4.000 guru dan tenaga kependidikan itu tak lantas pulang. Keesokan harinya, 24 November 2015, mereka bergabung bersama 8.500 guru lainnya se-Indonesia di Istora Senayan dalam Puncak Peringatan Hari Guru yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menandakan semangat Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan itu, yaitu Guru Mulia Karena Karya. •





Seorang guru sedang mempresentasikan karyanya di hadapan guru-guru peserta Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan di Istora Senayan, 23-24 Oktober 2015. Dalam ajang ini para guru beradu inovasi dan kreasi. Merekalah contoh konkret guru mulia karena karya.



PEMBENTUKAN STRUKTUR BARU DALAM KEMENDIKBUD

Dengan perombakan dan pembentukan struktur baru ini, Kemendikbud ingin bergerak optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

PENDIDIKAN anak tak bisa hanya diserahkan kepada guru. Orang tua harus terlibat aktif dalam mendidik anak-anak mereka. Jika Ki Hadjar Dewantara diminta menulis lagi pesannya tentang pendidikan anak-anak, mungkin dia hanya akan mengulang pendapatnya yang ia sampaikan di sebuah radio pada 1950-an. Berikut ini pesannya: “Keliru sekalilah apabila orang mengira bahwa sudah cukup jika anak-anak itu disekolahkan. Dikiranya tak perlu lagi dalam rumah keluarga diadakan syarat-syarat pendidikan. Segala-galanya seolah-olah diserahkan secara borongan kepada guru-gurunya kanak-kanak. Di sinilah orang lupa bahwa kanak-kanak di sekolah hanya kurang lebih lima jam saja, sedang sebagian besar daripada hari yang lama itu dialami di luar perguruan, yaitu di dalam rumah keluarga atau di dalam alam pergaulannya dengan anak-anak lain.”

Pendeknya, pendidikan terbaik untuk anak lahir dari kerja sama yang apik antara guru dan orangtua. “Tumpuan harapan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan ada pada guru. Anak suka pada suatu mata pelajaran karena gurunya membuat anak itu cinta. Kuncinya ada di guru. Oleh karena itu, pemerintah secara khusus membuat direktorat jenderal guru,” kata Mendikbud .

Menyadari pentingnya guru dan orangtua dalam pendidikan, Kemendikbud membentuk struktur baru serta merombak unit yang telah ada untuk menguatkan peran pelaku pendidikan seperti Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) seperti yang disinggung di atas oleh Mendikbud .

Sebagai struktur baru, Ditjen GTK memang mendapat perhatian khusus. Direktur Jenderal (Dirjen) Sumarna Surapranata, mengatakan ia telah memiliki sembilan agenda untuk menyempurnakan perombakan ini. Sembilan agenda itu adalah Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Perencanaan Kebutuhan, Pendidikan Calon PTK, Rekrutmen, Distribusi, Pembinaan



Karir, Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan, dan Program Afirmasi. Menurut Pranata, agenda-agenda itu adalah untuk menyempurnakan kemampuan guru-guru dalam pembinaan dan pengembangan fungsional termasuk tenaga kependidikan lainnya. Bentuk pembinaan dan pengembangan tersebut, antara lain, Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG), Pengembangan



Kompleks Kemendikbud, dengan gedung utama berbentuk buku yang terbuka di atasnya.

Keprofesionalitas Berkelanjutan (PKB), dan Resertifikasi Guru (RSG).

Inti perombakan ini, menurut Mendikbud, tidak lain agar bangunan pendidikan Indonesia lebih kokoh. Fondasi proses belajar mengajar adalah para guru yang menjadi ujung tombak intelektualitas bangsa. Mendikbud mengandalkan para guru untuk dapat mengatasi beragam gejolak proses pendidikan. Misalnya saja

menghadapi kurikulum pendidikan yang kerap berubah sesuai tantangan zaman. “Jadi perombakan struktur ini agar mereka siap menghadapi hal seperti itu,” kata Mendikbud. Masalah lain dalam persoalan guru adalah penyebaran, pembinaan, hingga mutu pengajaran.

Kemendikbud juga merampingkan unit utama, dari yang semula sembilan kini hanya menjadi delapan. Dua

Ditjen digabung menjadi satu, yaitu Ditjen Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Ada dua unit utama yang mengalami perubahan nama yakni, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berubah menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Sedangkan, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) berubah menjadi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Lima unit utama lainnya tidak berubah, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Ditjen Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Selain itu, Kemendikbud juga membentuk satuan kerja bernama Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska). Satker ini berfungsi membantu mempercepat langkah perbaikan dan peningkatan mutu layanan di lingkungan Kemendikbud.

Satuan kerja lainnya yang baru dibentuk adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Direktorat ini menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan keluarga.

Dengan perombakan dan pembentukan struktur baru ini, Mendikbud berharap Kemendikbud bisa berperan optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. •



SELEKSI TERBUKA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

Meski seleksi dilakukan secara terbuka, pejabat yang terpilih memang benar-benar kompeten di bidangnya.

SETELAH melalui proses seleksi terbuka yang ketat, terpilih enam pejabat eselon I di lingkungan Kemendikbud. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Inspektur Jenderal Daryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan



Tim seleksi independen yang diketuai Erry Riyana Hardjapamekas sedang mewawancarai salah satu calon pejabat di lingkungan Kemendikbud, Harris Iskandar. Kemendikbud mengambil langkah ini sebagai komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang transparan dan kompeten.

Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar.

Mendikbud mengangkat dan mengambil sumpah jabatan mereka di Plaza Insan Berprestasi di Gedung Kemendikbud. Jika biasanya pengangkatan dan pengambilan sumpah pejabat dilakukan di ruangan tertutup, kali ini Mendikbud ingin melakukan hal berbeda, “Pelantikan kali ini tidak eksklusif tapi inklusif, artinya melibatkan semua pejabat dan pegawai Kemendikbud.”

Dengan begitu, mereka akan merasa saling memiliki dan mengetahui secara jelas siapa saja yang menjabat apa dan apa saja program yang mereka kerjakan. Selain itu, Mendikbud membuka seleksi terbuka untuk pemilihan pejabat di lingkungan Kemendikbud. Ini tradisi baru yang positif dan membuka kesempatan kepada siapa pun yang memiliki kecakapan untuk bisa bekerja secara optimal.

Meski seleksi dilakukan secara terbuka, pejabat yang terpilih

memang benar-benar kompeten di bidangnya. Tidak ada lagi istilah orang-orang titipan. Para pejabat yang terpilih adalah mereka yang benar-benar sesuai dan ahli dengan pekerjaannya.

Mendikbud menyadari bahwa jika ingin melakukan reformasi birokrasi, tentu yang pertama harus dilakukan adalah mengutamakan lingkungan dalam terlebih dahulu. Dengan begitu, reformasi itu bisa muncul dari dalam. Reformasi yang berjalan akan



Mendikbud Anies Baswedan melantik enam pejabat eselon I hasil seleksi terbuka. Kemendikbud bertekad menjadi lembaga yang berintegritas dengan melakukan perbaikan tata kelola birokrasi. Pertama kalinya Kemendikbud menyelenggarakan pelantikan pejabat secara terbuka.

langgeng karena berdasarkan sistem yang terukur.

“Semua yang dilantik bukan ‘drop-dropan’. Mereka meniti karier dari bawah, mengakumulasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman seiring kementerian ini membangun prestasi-prestasi besar,” kata Mendikbud.

Para pejabat ini, lanjut dia, juga telah membuktikan kompetensi, kinerja, serta integritas dari hasil seleksi berbagai metode, meliputi penelitian rekam jejak, wawancara, serta penulisan makalah dan esai yang dinilai oleh Panitia Seleksi

(Pansel) independen. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan kriteria penilaian yang meliputi kompetensi bidang (umum dan khusus) serta kompetensi manajerial. Partisipasi masyarakat yang berminat bersaing secara sehat dalam struktur terbuka ini cukup banyak. Untuk jabatan Dirjen GTK misalnya, tercatat 35 pelamar, Dirjen PAUD dan Dikmas sebanyak 10 pelamar, sementara untuk Sesjen dan Irjen masing-masing 7 orang calon.

Mereka harus menghadapi berbagai ujian yang telah ditentukan Pansel yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Anggota Pansel ini terdiri dari empat orang dari unsur masyarakat dan satu orang dari internal Kemdikbud yang diketuai oleh Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peserta lelang jabatan ini memang tak sembarangan. Persyaratannya cukup ketat. Mereka harus membuat surat bermaterai bahwa tidak terlibat, berafiliasi, atau terikat pada partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif partai politik. Selain itu, peserta harus melampirkan surat

“

Para pejabat ini telah membuktikan kompetensi, kinerja, serta integritas dari hasil seleksi berbagai metode, meliputi penelitian rekam jejak, wawancara, serta penulisan makalah dan esai yang dinilai oleh Panitia Seleksi (Pansel) independen. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan kriteria penilaian yang meliputi kompetensi bidang (umum dan khusus) serta kompetensi manajerial.



Peserta seleksi terbuka sedang mengikuti salah satu tahapan seleksi.

pernyataan dari atasan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diberi sanksi berat atau sedang, dan tidak pernah dihukum atau dalam proses pemeriksaan hukum. Para peserta seleksi terbuka ini juga tak boleh berumur lebih dari 57 tahun serta setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Selama proses seleksi berlangsung, mereka tak boleh berhubungan dengan cara apa pun dengan Panitia Seleksi. “Proses seleksi hingga pelantikan ini membuktikan kita menjunjung tinggi meritokrasi, integritas, dan kinerja. Bahwa proses yang baik dalam pembentukan pimpinan akan terus didorong secara internal. Organisasi ini mampu membentuk

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang kuat bagi setiap anggotanya dan setiap staf di sini memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier sampai puncak,” kata Mendikbud.

Mendikbud mengungkapkan, ada sejumlah alasan Kemendikbud merombak kursi eselon I. Misalnya, ada beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun, ada juga yang terpilih menjadi rektor di perguruan tinggi negeri. “Jadi pergantian harus segera dilakukan demi kelangsungan program pendidikan. Ini adalah bagian yang ingin kita bangun tradisinya, bukan selera menteri, ini adalah hasil seleksi objektif dengan prinsip meritokrasi untuk kemajuan kementerian,” kata dia.

Secara keseluruhan, mengiringi seleksi terbuka eselon I dan II, Mendikbud mengungkapkan seluruh pejabat eselon di lingkungan Kemendikbud diisi oleh orang-orang yang memiliki bukti prestasi. Proses seleksi yang menganut prinsip meritokrasi ini dijalankan dengan cara teliti, tertib, dan taat pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. •



PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Menghentikan gratifikasi, memberantas korupsi sejak dari hulu.

PERANG besar melawan korupsi tak bisa hanya dititipkan kepada para penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi garda depan penuntasan kerja besar itu, tak bisa dibiarkan berperang sendiri. Dunia pendidikan dan kebudayaan punya peran strategis dalam pemberantasan korupsi.

Upaya awal yang perlu dilakukan tentu menutup celah-celah masuknya tindak korupsi di lingkungan penentu kebijakan. Kemendikbud mengambil langkah nyata pemberantasan tindak korupsi melalui pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Suara sirine berteman denting gamelan riuh menggema di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kemendikbud. Ribuan pegawai Kemendikbud yang hadir mendengar gema ikrar “tidak akan melakukan tindak korupsi dan berani melaporkan atau mencegah tindak korupsi yang dilakukan oleh rekan kerja di Kemendikbud”.

“Para pejabat di lingkungan Kemendikbud yang hadir di sini bukan menjadi penonton. Merekalah di luar sana, rakyat Indonesia, yang menonton, mengawasi kinerja kita, janji yang telah kita ucap untuk tidak melakukan tindak korupsi,” kata Mendikbud dalam pidato Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, 6 Oktober 2015.

“Integritas tidak cukup hanya jujur, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral.”

Pencanangan itu disaksikan pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Deputy Pengawasan Instansi pemerintah bidang Polsoskam BPKP.

“Pencanangan yang dilakukan oleh Kemendikbud merupakan peneguhan dari upaya-upaya intensif yang telah dilakukan sejak 2012,” ujar Menteri Yuddy Chrisnandi.





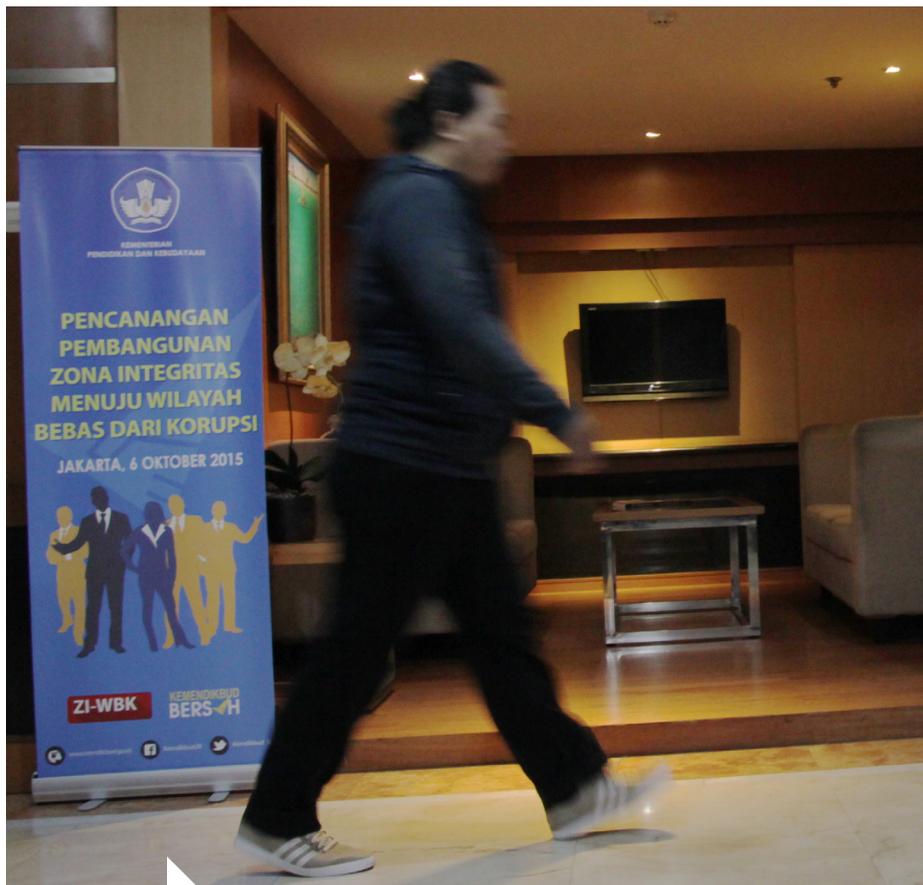
Wakil Ketua KPK Zulkarnain menandatangani Piagam Komitmen Zona Integritas disaksikan Mendikbud Anies Baswedan, Menpan-rb Yuddy Chrisnandi, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polsoskam BPKP, Binsar H. Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto.

Salah satu langkah yang ditempuh terkait program ini adalah Workshop Wilayah Bebas Korupsi secara intensif sejak 2012 berdasarkan Permenpan dan RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dengan 20 indikator proses. Workshop ini terus dilakukan setiap tahunnya, pada tahun 2015 menginformasikan Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dengan 6 komponen pengungkit.

Upaya meningkatkan integritas aparatur Kemendikbud dilakukan dengan usaha konkret berupa penandatanganan pakta integritas. “Selain sumpah jabatan, para pejabat yang baru dilantik wajib menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bebas dari korupsi,” kata Daryanto, Irjen Kemendikbud.

Tak kalah penting, menurut Daryanto, kepatuhan pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah mencapai 98 persen (melapor sebanyak 2.177 orang dari 2.232 orang Wajib Lapor) dan tingkat kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) saat ini telah mencapai 81,7 persen (melapor sebanyak 11.342 orang dari 13.878 orang Wajib Lapor). “Sisanya yang belum melapor adalah para pejabat yang sudah memasuki purna bhakti, pensiun, namun tetap kami dorong untuk tetap melakukan pelaporan LHKPN,” kata Daryanto.

Sosialisasi kepada institusi pendidikan, menyusun rencana aksi, pemantauan pelaksanaan rencana



Seorang pengunjung menuju ruangan Biro Umum Kemendikbud. Dengan adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Kemendikbud berkomitmen secara aktif memangkas korupsi sejak dari hulu. Agar kondisi pendidikan dan kebudayaan Indonesia semakin membaik dan jauh dari praktik korupsi.



Penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan oleh guru dengan inovatif, kreatif, dan menyenangkan saat proses belajar-mengajar di sekolah.

aksi, serta kampanye anti korupsi rutin diselenggarakan ke pelbagai daerah. Diseminasi WBK ke seluruh provinsi dengan sasaran satuan pendidikan; kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan komite sekolah,

juga unit pelaksana teknis, dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota secara rutin dilaksanakan sejak 2013.

“Penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan oleh guru dengan inovatif, kreatif, dan menyenangkan



saat proses belajar-mengajar di sekolah,” ujar Mendikbud.

Guru diharapkan dapat memberikan teladan yang baik, mencerminkan sikap anti korupsi kepada para peserta didik. “Keteladanan ini sangat kuat perannya. Kalau gurunya sudah menunjukkan sikap anti korupsi, saya yakin siswanya pun akan melakukan hal yang sama,” imbuhnya.

Guna menunjang setiap pihak di Kemendikbud berani melaporkan usaha tindak korupsi dan gratifikasi, pelapor akan dijamin dan dilindungi identitasnya melalui program Whistleblowing System yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengaduan dapat

berbentuk laporan langsung (lisan), surat tertulis, maupun surat elektronik (surel).

“Jangan takut, akan dijamin kerahasiaan data pribadinya,” kata Daryanto.

Tak ketinggalan transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi modal utama kepercayaan dan komitmen Wilayah Bebas Korupsi.

Jenis korupsi yang susah dibenturkan di kalangan penyelenggara negara adalah gratifikasi. Ada dua kecenderungan seseorang melakukan gratifikasi; tidak mengerti atau memang sengaja melakukannya. Kemendikbud tentu tak akan membuka pintu bagi hadirnya hantu gratifikasi.

Melalui Permendikbud Nomor 72 tahun 2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi dan Permendikbud Nomor 51 tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud, terbentuk sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memiliki tugas menyadarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang gratifikasi sebagai embrio korupsi.

Hadirnya Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan langkah jitu. Selain memberikan penyadaran dan pengertian gratifikasi, juga sebagai wadah penangkal. Kesadaran pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud meningkat. Banyak pegawai yang telah berani mengambil inisiatif melaporkan dugaan gratifikasi ke UPG. Hasilnya kontan terlihat. Pada tahun 2013 dan 2014, Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud meraih Penghargaan Kementerian dengan Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK.

Kendati upaya pengendalian gratifikasi gencar dilakukan, upaya pemberian hadiah atau fasilitas yang berkenaan dengan jabatan kepada penyelenggara negara di Kemendikbud masih saja terjadi. Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi hingga September 2015, terdapat 227 jenis gratifikasi dengan nilai Rp 1.568.460.500,00.

“Kita tidak boleh memberi celah terhadap praktik korupsi,” ungkap Daryanto. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Demi mencapai hal itu, diperlukan integritas dari seluruh pemangku kepentingan yang tak hanya sekadar janji. •



PENYERAPAN ANGGARAN

Di tengah pergulatan restrukturisasi, kinerja dan penyerapan anggaran Kemendikbud tetap efektif.

SABAN dua pekan, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyambangi ruang kerja Mendikbud. Berjilid hasil laporan serapan anggaran dan kinerja tiap unit utama Direktorat Jenderal selama dua pekan terakhir dia usung sebagai bekal diskusi. “Dengan begitu, target serapan dan target kegiatan bisa tercapai dengan baik,” kata Didik.

Rutinitas tersebut lumrah Didik lakoni sejak Mendikbud menerapkan kebijakan mewajibkan tiap-tiap unit utama memberi laporan serapan anggaran dan kinerja per dua pekan. Didik memberi laporan, mendiskusikan capaian target, dan mencari jalan keluar atas masalah yang mengemuka.

Jurus jitu laporan dua pekan serapan anggaran dan kinerja bertujuan untuk pemantauan kinerja secara ketat dan kecepatan menganalisis masalah agar mudah ditanggulangi sejak dini.

Penerapan kebijakan ini berbuah manis. Berdasarkan data Peringkat Realisasi Anggaran (per 19 Juli 2015) untuk 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kemendikbud menempati urutan

ketiga, menempel Kepolisian Negara RI dan Kementerian Keuangan di posisi puncak.

Pada enam bulan pertama, serapan anggaran Kemendikbud mencapai Rp 19,3 triliun atau 41,25% dari Rp 46,8 triliun pagu anggaran Kemendikbud dalam APBN 2015 (sebelum APBNP). Dibandingkan tahun lalu, serapan anggaran Kemendikbud tahun ini meningkat signifikan. “Ini karena pemantauan kinerja yang ketat,” kata Didik.

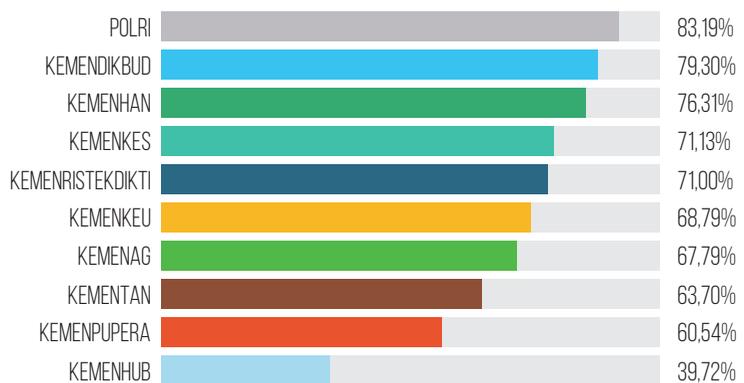
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pada Juni 2015 serapan anggaran naik sebesar 8%, sedangkan bulan Juli kenaikannya mencapai 6,25%. Jalan Kemendikbud menempati posisi tiga sebagai kementerian dengan serapan tertinggi pada

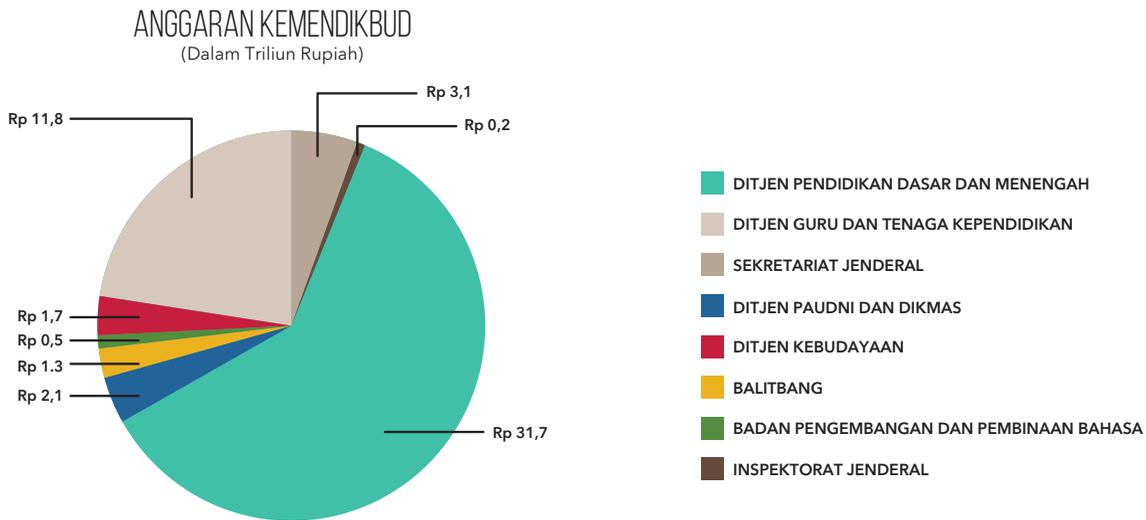
Kabinet Kerja bukan tanpa aral. Ada beberapa pihak yang menyebut bahwa data serapan anggaran Kemendikbud sejatinya rendah.

Menurut Didik, anggapan itu lumrah terjadi sebab data yang diperoleh bersumber dari anggaran gabungan Kemendikbud dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang kini telah bergabung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Data itu semula masih menjadi acuan Kementerian Keuangan dan belum diubah dalam alokasi anggaran Kemendikbud sesuai nomenklatur yang baru. Sementara, faktanya Ditjen Dikti sudah berpindah dan bergabung dengan Kemenristek.

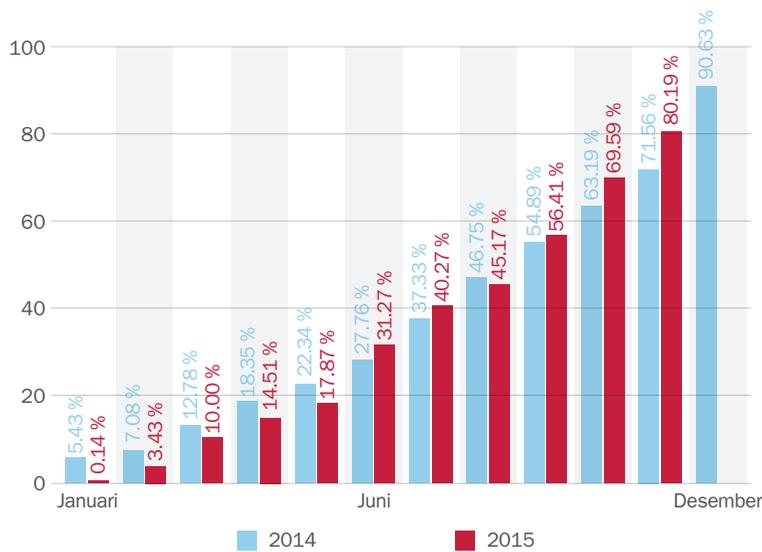
PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA





Anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2015 sebesar Rp 52,4 triliun

PENYERAPAN ANGGARAN KEMENDIKBUD



Ini prestasi penting. Di tengah banyak melakukan restrukturisasi internal, Kemendikbud ternyata bisa tetap melaksanakan kinerja secara cepat dan efektif. Kuncinya ada di pengawasan dan pemantauan kinerja secara periodik, juga segera bertindak jika terjadi masalah.

Alhasil, alokasi APBN bagi Kemendikbud tertulis Rp 122 triliun, bukan Rp 53.278.544 triliun sebagaimana mestinya. “Akibatnya, serapan Kemendikbud yang sebesar Rp 19,3 triliun jadi terlihat kecil secara persentase.”

Selepas Kementerian Keuangan mengoreksi catatan alokasi anggaran, tampak bahwa Kemendikbud menempati serapan anggaran ketiga teratas di antara 10 kementerian/lembaga di Kabinet Kerja. Setelah sebelumnya menurun menjadi peringkat kelima dan keempat, per November 2015 Kemendikbud menempati posisi kedua dalam penyerapan anggaran. Anggaran Kemendikbud setelah APBN menjadi Rp 52.462.435.477 triliun.

Ini prestasi penting. Sebagai lembaga yang gemuk dan tengah banyak melakukan restrukturisasi internal, Kemendikbud ternyata bisa tetap melakukan kinerja secara cepat dan efektif. Kuncinya ada di pengawasan dan pemantauan kinerja secara periodik, juga segera bertindak jika terjadi masalah. •



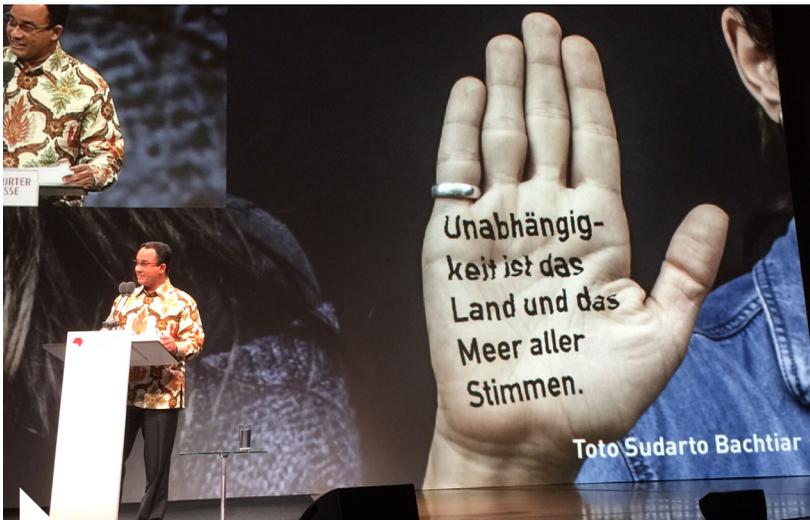
Searah jarum jam: 1. Ahmad Tohari mendiskusikan bukunya di Leipzig Book Fair. Sebelum menuju FBF, ada dua acara besar juga di Eropa, yaitu Leipzig Book Fair dan Bologna Book Fair. 2. Raffly Kande menyajikan keahliannya dalam memainkan musik etniknya dalam arena FBF. Selain buku, FBF juga menjadi ajang kebolehan kesenian dan kebudayaan Indonesia. 3. Para pengunjung memenuhi paviliun Indonesia

MENJADI TAMU KEHORMATAN FRANKFURT BOOK FAIR 2015

Mengenalkan kekayaan literasi Indonesia lewat pesta buku terbesar di dunia.

INDONESIA tampil memukau saat menjadi Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. Paviliun dan stand Indonesia dibanjiri pengunjung. Pentas dan acara-acaranya dikerubungi banyak peminat. Meski ini gawe besar Kemendikbud, sejatinya prestasi ini adalah hasil kolaborasi semua pihak. Dan, ini adalah langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi percakapan dunia.

Sebagai Tamu Kehormatan (*Guest of Honour*) pada ajang Frankfurt Book



Penggalan puisi Toto Sudarto Bachtiar berjudul “Kemerdekaan”, *Kemerdekaan ialah tanah air dan laut semua suara*, menjadi latar saat Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan pidato pembukaan FBF di Jerman, 13 Oktober 2015.

Fair (FBF) yang diselenggarakan di Frankfurt, Jerman, 13–18 Oktober 2015, Indonesia menampilkan tema “17.000 Islands of Imagination”. Mendikbud menegaskan ihwal imajinasi ini dalam pidato pembukaannya.

Menurut dia, imajinasilah yang membuat Indonesia bersatu. Pada mulanya, kata mendikbud, tidak ada Indonesia, lalu para pendiri republik yang berasal dari beragam suku, seperti Jawa, Sunda, Bugis, Minang, bersepakat untuk menjadi Indonesia. Menyatakan satu bahasa pada 1928 sebelum ada negara.

“Indonesia dibangun lewat imajinasi kolektif. Imajinasi itu akan dibawa ke Frankfurt Book Fair. Akan ditunjukkan kepada dunia sebagai

ekspresi budaya, ekspresi peradaban yang ada di 17.000 kepulauan ini,” katanya.

Frankfurt Book Fair adalah pameran buku terbesar dunia yang diikuti lebih dari 100 negara, disorot lebih dari 9.300 jurnalis dunia, dan dihadiri lebih dari 260.000 pengunjung tiap tahunnya. Ini menjadi kesempatan sangat baik bagi Indonesia untuk memamerkan pencapaian terbaik kita, terutama di bidang literasi dan kebudayaan.

Karena itu, tak kurang dari belasan sesi seminar tentang Indonesia diadakan di Goethe University of Frankfurt, seni instalasi bambu dan seni rupa dari para perupa Indonesia dipamerkan di alun-alun kota,

pameran karya fotografer-fotografer Indonesia ditampilkan di galeri foto di Frankfurt, karya arsitek-arsitek muda Indonesia menempati satu lantai khusus di German Architecture Museum, dan kuliner Indonesia menjadi alat diplomasi budaya di kompleks pameran serta di alun-alun kota Frankfurt. Pendeknya, Indonesia menampilkan dirinya secara penuh-seluruh sebagai tamu yang mempesona.

Ikhtiar panitia tak sia-sia. Antusias publik dunia sangat kentara begitu menjelajah paviliun Indonesia di ajang tersebut. “Kita harus menjelajahi 17.000 pulau imajinasi yang ditawarkan Indonesia,” kata Heinrich Riethmuller, Direktur Ikatan Penerbit Jerman.

Heinrich, begitu pula para hadirin, yang berkunjung ke paviliun Indonesia berdecak kagum setelah menjelajah tujuh arena pulau *Island of Words; Island of Scene, Island of Images, Island of Spices, Island of Illumination, Island of Tales, dan Island of Inquiry*.

“Sangat detail dan mengagumkan. Beberapa teman saya yang tidak tahu tentang Indonesia menjadi terkesan,” kata Irene Jansen, Direktur DAAD Indonesia.

Imaji tentang Indonesia turut tersaji melalui berbagai diskusi yang menghadirkan para budayawan, seniman, sastrawan, komikus, dan pelaku seni lainnya di Stan Nasional dan Paviliun Indonesia. Topik pembahasan begitu beragam, mulai dari permasalahan peristiwa 1965, Islam dan toleransi, hingga identitas gender.

Perpaduan imaji tak berhenti di meja diskusi, namun berlanjut pada

“

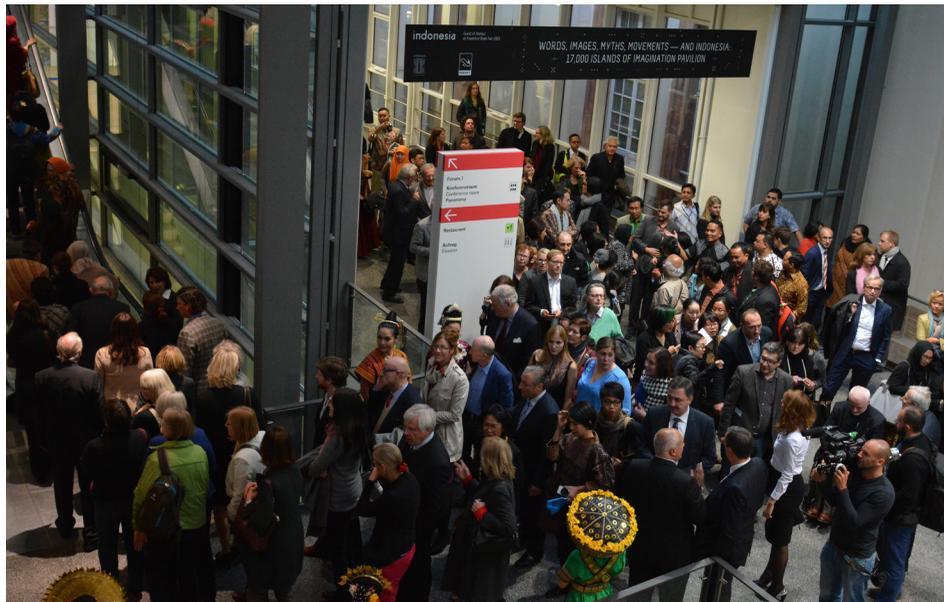
Sangat detail dan mengagumkan. Beberapa teman saya yang tidak tahu tentang Indonesia menjadi terkesan.

—IRENE JANSEN
DIREKTUR DAAD INDONESIA

berbagai pertunjukan seni, baik tradisi dan kontemporer menyumbang imaji yang cukup kuat terhadap ke-Indonesiaan. Salah satu yang mendapat sambutan hangat di Frankfurt adalah penampilan musisi tradisi asal Aceh, Rafli Kande, yang atraktif, menyenangkan, menghibur, penuh spirit, dan humoris. Selesai pentas, para pengujung mengerubunginya, lalu bertanya kapan tampil lagi dan bagaimana mendapat albumnya.

Sambutan tak kalah gemitanya juga menghampiri sesi *story telling* asuhan Murti Bunanta dan Tety Elida yang mempraktikkan cara bercerita dengan menggunakan alat peraga tali dan origami di area *Island of Tales*. Salah seorang pengunjung, Monika Mertens, berkunjung ke Pekan Raya Buku Frankfurt, khusus untuk menyambangi untuk mempelajari tehnik bercerita Murti Bunanta dan Tety Elida. “Saat ini di daerah tempat saya tinggal, di Oberursel banyak sekali keluarga pengungsi. Kami ingin sekali menghibur anak-anak pengungsi ini dengan bercerita, dan saya pikir teknik ini sangat cocok untuk mereka. Anak-anak dapat dengan mudah terlibat tanpa terhalang oleh perbedaan bahasa,” kata Monika yang berprofesi sebagai pustakawan ini.

Sambutan positif mengalir begitu deras ke paviliun Indonesia di FBF 2015. Capaian itu diraih dari kerja keras yang panjang. Kemendikbud sebagai ujung tombak Indonesia dalam perhelatan tersebut mulai merancang rangkaian kegiatan menjelang hari penyelenggaraan tiba. Tiga pameran buku internasional, yakni Leipzig



Book Fair (12–15 Maret 2015), Bologna Book Fair (30 Maret–2 April 2015), dan London Book Fair (14–16 April 2015), dijajaki sebagai bagian dari promosi dan pemanasan menuju perhelatan FBF 2015. Dari ketiga ajang itu, buku dan para pengarang

Indonesia mulai mendapat sorotan positif dari publik dan media internasional.

Komite Penerjemahan menangani penerjemahan buku Indonesia ke bahasa asing melalui Program Pendanaan Penerjemahan. Dana



Rangkaian kegiatan di paviliun Indonesia pada Frankfurt Book Fair 2015

penerjemahan diberikan dalam jumlah tertentu sebagai subsidi kepada penerbit/pemilik hak cipta yang karyanya lulus seleksi konten dan mutu terjemahan, atau kepada penerbit asing yang membeli hak cipta buku Indonesia.

Dari tahun 2014 hingga kini, Komite Penerjemahan telah menerima lebih dari 3.000 judul buku dari penerbit Indonesia untuk diseleksi dan diikutsertakan dalam Program Pendanaan Penerjemahan. Sebanyak 144 judul buku telah diputuskan layak menerima subsidi. Bahasa sasaran judul buku yang lulus seleksi: bahasa Jerman (54 judul), bahasa Inggris (89 judul), dan bahasa Belanda (1 judul). Untuk penerbit asing, Komite Penerjemahan sudah menyetujui subsidi untuk 11 buku yang akan diterbitkan

ke dalam bahasa Jerman (8), Belanda (1), dan Italia (1).

Di antara 144 judul buku yang merupakan karya terbaik para penulis Indonesia itu, sebagian besar adalah karya sastra. Selain karya sastrawan legendaris kita yang telah dikenal dunia seperti Pramoedya Ananta Toer, terdapat karya para pengarang muda potensial seperti Ratih Kumala dengan novel *Gadis Kretek* dan Anton Kurnia dengan kumpulan cerpen *A Cat on the Moon and Other Stories* yang diterjemahkan dari buku *Insomnia*.

Aspek utama yang menjadi tanggung jawab Komite Buku mencakup seleksi penulis dan buku yang akan ditampilkan, serta pembuatan katalog dan penentuan acara yang akan ditampilkan sebelum dan pada

FBF 2015. Buku-buku layak seleksi itu bergenre sastra, novel populer, cerita anak, cerita rakyat, komik, buku masakan, sosial-budaya, serta arsitektur, desain, dan seni.

Beberapa buku Indonesia yang telah dibeli hak penerjemahannya oleh penerbit asing akan dipamerkan pula di FBF 2015, antara lain *Lelaki Harimau* karya Eka Kurniawan (Italia dan Inggris), *Tarian Bumi* karya Oka Rusmini (Jerman, Italia), *Amba* karya Laksmi Pamuntjak (Jerman), *Pulang* karya Leila S. Chudori (Jerman, Perancis, Belanda), dan *Putri Kemang* karya Murti Bunanta (Jerman).

Seluruh upaya tim Komite Nasional ini bermuara pada tujuan menampilkan Indonesia secara gemilang dan membanggakan sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. •



Mahasiswa peserta Darmasiswa yang datang dari berbagai negara sedang mendapatkan penjelasan mengenai Indonesia.

DARMASISWA

Menyebarkan duta-duta Indonesia ke dunia internasional.

DARMASISWA RI (DRI) adalah program pemberian beasiswa oleh Pemerintah RI kepada mahasiswa asing dari negara-negara mitra untuk belajar bahasa Indonesia, seni budaya, dan sains pada perguruan tinggi di Indonesia. Sifat program DRI adalah program non-gelar selama satu tahun dan bertujuan untuk mempromosikan bahasa Indonesia, seni budaya, dan sains kepada masyarakat internasional. Program ini

juga telah menjadi timbal-balik (resiprokal) pemberian beasiswa antara Indonesia dengan negara mitra serta menjadi salah satu unsur diplomasi pendidikan dan kebudayaan.

Program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ini dimulai pada tahun 1974 sebagai bagian dari inisiatif ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dan hanya



menerima siswa yang berasal dari Negara-negara di kawasan ASEAN. Mulai tahun 1976 program ini dipeluas dengan menerima siswa dari negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Hungaria, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1990 dan selanjutnya program ini ditawarkan kepada semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dan

sampai saat ini sudah lebih dari 80 negara yang berpartisipasi.

Minat mahasiswa mancanegara untuk berpartisipasi dalam program ini juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2003 hanya 83 mahasiswa dari 34 negara yang terlibat dalam program ini, pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 587 mahasiswa dari 79 negara. Mahasiswa yang terlibat dalam program Darmasiswa tahun

ajaran 2015/2016 saat ini sedang mengikuti pendidikan di 54 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan semakin banyaknya alumni yang tersebar di seluruh dunia, akan lebih banyak lagi duta-duta yang akan memperkenalkan Indonesia pada dunia, menceritakan kebhinekaan dan kerukunan hidup di Indonesia, dan menjadi sahabat-sahabat Indonesia. •



PENUTUP

Alhamdulillah, buku ini telah sampai pada ujungnya. Bagaimana pun, langkah-langkah yang telah kami tempuh dalam setahun ini masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak; masih banyak kekurangan di sana sini. Karena itu, kami sangat bersyukur atas dukungan dan dorongan dari banyak pihak yang datang kepada kami selama setahun ini.

Demi mendapatkan kualitas yang lebih baik pada masa-masa mendatang, mari kita bergandengan tangan kembali untuk bersama-sama melukis masa depan Indonesia.



SENARAI RUJUKAN

Buku/Dokumen:

- Laporan Tahunan delapan unit utama Kemendikbud
- *Kilas Kinerja Semester I 2015 Kemendikbud*, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), 2015

Laman:

- www.kemdikbud.go.id

Foto:

- Ditjen Kebudayaan
- BPKLN
- BKLM
- Biro Kepegawaian
- Antara
- Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015



DAFTAR SINGKATAN

ADEM	: Afirmasi Pendidikan Menengah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BBM	: Belajar Bersama Maestro
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Dikdasmen	: Pendidikan Dasar dan Menengah
FBF	: Frankfurt Book Fair
GGD	: Guru Garis Depan
GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
GIMM	: Gerakan Indonesia Membaca-Menulis
IIUN	: Indeks Integritas Ujian Nasional
Irjen	: Inspektur Jenderal
Itjen	: Inspektorat Jenderal
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKP	: Kawah Kepemimpinan Pelajar
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MA	: Madrasah Aliyah
Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MOS	: Masa Orientasi Siswa
MOPD	: Masa Orientasi Peserta Didik
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBP	: Penumbuhan Budi Pekerti
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PIP	: Program Indonesia Pintar

PMK	: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SM3T	: Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
Sekjen	: Sekretariat Jenderal
Sesjen	: Sekretaris Jenderal
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
UN	: Ujian Nasional
UNESCO	: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UBK	: Ujian Berbasis Komputer
UBKP	: Ujian Berbasis Kertas dan Pensil
UKG	: Ujian Kompetensi Guru



PEMOTRET

HALAMAN	PEMOTRET
Sampul	Muhammad Raihan Putra Apriadi/ Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
	Agung Kuncahya B/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
	Basmah Syadza Aras/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
	Kemendikbud
	Abriansyah Liberto/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
	Ditjen Kebudayaan Kemendikbud
d	Buyung Sukananda/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
d	Dhoni Setiawan/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
d	Jilan Rifai/BKLM Kemendikbud
d	Jessica Wuysang/Antara
e	Muhammad Abdiwan Zulkifli/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
e	Hani Utami Rahayu/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
e	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
e	Yuliana Hema/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
f	Muhammad Noviandri /Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
f	Dirpsma Kemendikbud

HALAMAN	PEMOTRET
f	Wisnu Prawiguna/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
f	Wisnu Prawiguna/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
g	Hani Utami Rahayu/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
g	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
g	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
g	Ridwan Maulana
i	Kurniawan Arie Wibowo/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
l	Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
o	Andri Hidayat/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
p	Buyung Sukananda
2	Maulana Muhammad Fahmi/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
3	Gholib/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
4-5	Iis Zalnika/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
7	Hani Utami/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
8	Jessica Wuysang/Antara

HALAMAN	PEMOTRET
9	Samada Poda/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
10	Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
12–13	Asprilla Dwi Adha/Lomba Foto PIH Kemendikbud Umar Abdul Aziz Assunnani Gani Kurniawan/Tribun Jabar Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
14	Dhoni Setiawan/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
17	Samada Poda/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
19	Zamher/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
21	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
23	Andri Hidayat/Lomba Foto PIH Kemendikbud
24–25	Adeng Bustomi/Lomba Foto PIH Kemendikbud
27	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
28	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
32	Muhammad Burhanuddin Irsyadi/ Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
33	Muhammad Abdiwan Zulkifli/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
34–35	Iwan Christian/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
36	Zulkarnaen Syri Lokesywara/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
37	Imam Wahyudin/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
39	Ikrimah Haiza Putri/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015

HALAMAN	PEMOTRET
40	Suwandi Gani/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
41	Fajar Shodiq Kurniawan/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
42	Giri Wijayanto/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
43	Hani Utami Rahayu/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
44–45	Ramelan/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
46	Gholib/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
48–49	Jatmiko Wicaksono/Koleksi Pribadi
49	Wiwit Yuni Hartono/
50	Imam Hamidi Antassalam/Koleksi Pribadi
51	Imam Hamidi Antassalam/Koleksi Pribadi
53	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
54–55	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
56	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
58	Aloysius Jarot Nugroho/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
59	Abriawan Abhe/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
60–61	Ditjen Kebudayaan Kemendikbud
62–63	Ditjen Kebudayaan Kemendikbud
64	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
65	Hani Utami Rahayu/Lomba Foto PIH Kemendikbud
65	Yuliana Hema/Lomba Foto PIH Kemendikbud

HALAMAN	PEMOTRET
66–67	Aloysius Jarot Nugroho/Lomba Foto PIH Kemendikbud
68–69	Maman Sukirm/Lomba Foto PIH Kemendikbud an
70	Ismail Ilo/Lomba Foto PIH Kemendikbud
71	Fitriadi Maulidin/Lomba Foto PIH Kemendikbud
72	Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
73	Dedy Istanto/Lomba Foto PIH Kemendikbud
74–75	Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
76	Basmah Syadza Aras/Lomba Foto PIH Kemendikbud
76–77	Muhammad Raihan Putra Apriadi/Lomba Foto PIH Kemendikbud
78	Alvian Ramadya/Lomba Foto PIH Kemendikbud
79	Basmah Syadza Aras/Lomba Foto PIH Kemendikbud
80	Ditjen Dikdasmen Kemendikbud
81	Ditjen Dikdasmen Kemendikbud
82–83	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
84	Dirpsma Kemendikbud
85	Jilan Rifai/BKLM Kemendikbud
86	Jilan Rifai/BKLM Kemendikbud
87	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
87	Arif Budiman/BKLM Kemendikbud
88–89	Muhamad Noviandri/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015

HALAMAN	PEMOTRET
90 atas	Ahmad Sidiq/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
90 bawah	Shirley Angelica/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
91	Shirley Angelica/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
92	PNRI
92	PNRI
93	PNRI
94	PNRI
95	Ditjen Kebudayaan Kemendikbud
96	Tulus Adiyantoro/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
96–97	Ditjen Kebudayaan
96–97	Sumali Ibnu Chamid/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
97	Muhammad Hatta/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
98	Rangga Bramasta/Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
99	Wisnu Prawiguna//Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
100	Hani Utami Rahayu//Lomba Foto PIH Kemendikbud 2015
102–103	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
104	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
105	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
106–107	Arif Budiman/BKLM Kemendikbud
108–109	Jilan Rifai/BKLM Kemendikbud
110–111	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
112–113	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud

HALAMAN	PEMOTRET
114–115	Biro Kepegawaian Kemendikbud
116	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
117	Biro Kepegawaian Kemendikbud
118–119	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
120–121	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
124	Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015
125	Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015

HALAMAN	PEMOTRET
126	Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015
128–129	BPKLN Kemendikbud
130	Azis Purwanto/PASKA Kemendikbud
140–141	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
142	Ridwan Maulana/BKLM Kemendikbud
143	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud
144–147	Muhammad Husnil/PASKA Kemendikbud

TERIMA KASIH

TENTU saja, buku ini takkan mungkin bisa terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada semua unit utama dalam lingkungan Kemendikbud.

Mereka adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berkat laporan yang mereka berikan kepada kami, kami bisa menulis buku ini. Juga kepada para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli Mendikbud dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN). Serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kami mintai komentar lebih lanjut.

Juga kami sangat berterima kasih kepada para peserta lomba foto Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Kemendikbud 2015, baik itu siswa, guru, masyarakat, maupun fotografer. Foto-foto yang kami gunakan dalam buku ini adalah karya yang mereka kirimkan kepada kami. Karena foto-foto mereka, kami bisa lebih membumikan pesan-pesan kami tentang dunia pendidikan dan kebudayaan. Banyak terima kasih kepada mereka. Semoga karya apik mereka mendorong perubahan dalam pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

Amin.

PARA PELAKON DI BALIK LAYAR

Terkadang, kita kagum dengan kerja-kerja besar satu lembaga. Namun, di sisi lain, kita juga acap lupa bahwa kerja besar itu takkan mungkin terselenggara tanpa bantuan banyak orang. Mereka bekerja dalam sunyi, tanpa kilauan kilatan kamera. Merekalah para pelakon di balik layar.

Berikut ini sebagian dari mereka yang membantu kami bekerja selama setahun ini, dan senantiasa setia dalam tahun-tahun mendatang. Tanpa bantuan mereka, sungguh, kami tak mungkin bisa bekerja dengan baik. Dengan menyesal, kami tak bisa menampung semua kali ini; kali lain kami akan menampilkan mereka lebih menyeluruh.

















**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**